



# Indeks Pembangunan Desa 2014

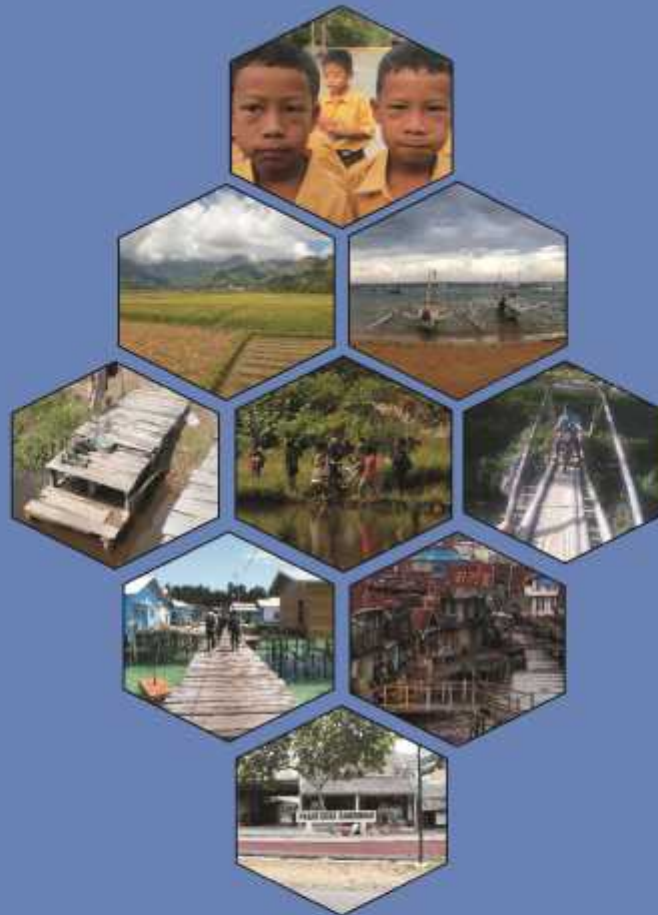
"Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa"





# Indeks Pembangunan Desa 2014

"Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa"



**Pengarah**

Imron Bulkin

**Penanggung Jawab**

Hayu Parasati

Thoman Pardosi

**Tim Penyusun**

Hindun Barokah

Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami

Karmaji

Citra Sawita Murni Sugiarto

Udin Suchaini

Dwita Widyaningsih

Eko Hadi Nurcahyo

Ardina Putri Rahtama

Muhammad Abduh

**Desain Konsep**

Udin Suchaini

Ardina Putri Rahtama

Azhar Rizki Muttaqien

Cetakan Pertama, 2015

Diterbitkan oleh:



**Kementerian Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**  
Jl. Taman Surapati No.2 Menteng Jakarta, 10310



**Badan Pusat Statistik**  
Jl. Dokter Sutomo No. 6 – 8  
Jakarta, 10710



**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**PRAKATA**



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 dapat dipublikasikan. Buku ini dimaksudkan untuk memotret tingkat perkembangan desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 74.093 desa. Buku Indeks Pembangunan Desa ini merupakan pengukuran yang dipersiapkan atas fondasi kepemilikan nasional dalam rangka mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015–2019, yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai

5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa ditahun 2019. Pembangunan desa masih memiliki tantangan yang cukup besar dikarenakan hingga saat ini jumlah desa mandiri di Indonesia hanya sekitar 3,91% dari keseluruhan desa di Indonesia.

Indeks ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menggunakan data Potensi Desa 2014 sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks, dan disinkronkan dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagai rujukan standar untuk jumlah desa teregistrasi di Indonesia. Di dalam Indeks Pembangunan Desa disajikan indeks untuk 74.093 desa di Indonesia, rata-rata indeks di 7 pulau, per provinsi, dan setiap Kabupaten/Kota. Indeks Pembangunan Desa ini juga menggambarkan dimensi-dimensi pembangunan desa yang dijabarkan kedalam 42 indikator yang menggambarkan sedekat mungkin pelayanan pada masyarakat desa yang bisa mewakili pemenuhan standar pelayanan minimal di desa. Dengan Indeks Pembangunan Desa, pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dapat memberikan prioritas pembangunan desa menurut indikator yang dianggap perlu.

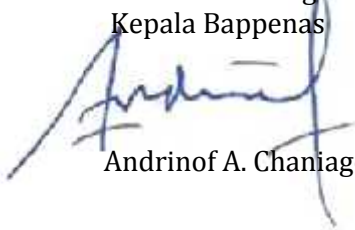
Besar harapan kami agar Indeks Pembangunan Desa dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan di seluruh Indonesia. Kedepan, Indeks Pembangunan Desa ini perlu terus disempurnakan seiring

dengan penyempurnaan indikator yang tercantum dalam pendataan Potensi Desa untuk lebih menggambarkan kondisi desa yang sesungguhnya. Berbagai masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam publikasi Indeks Pembangunan Desa ini, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi. Semoga publikasi Indeks Pembangunan Desa ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 31 Juli 2015  
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Bappenas



Andrinof A. Chaniago



## **KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**

### **SAMBUTAN**



selanjutnya.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga publikasi Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014 dapat diterbitkan. Publikasi ini disusun oleh tim yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Saya menyambut gembira terbitnya publikasi IPD 2014 dengan tema "Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa". Saya yakin bahwa indeks yang ada pada publikasi ini dapat secara jelas menggambarkan kondisi pembangunan di semua desa yang ada di seluruh Indonesia. Informasi terkait kondisi pembangunan desa ini akan menjadi baseline bagi pemantauan tingkat perkembangan pembangunan desa

Melalui komponen penyusunnya, IPD dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup 5 dimensi yaitu: 1) Pelayanan Dasar, 2) Kondisi Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Publik, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan. Kelima dimensi tersebut disusun dari 42 indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa. Dengan memperhatikan berbagai kondisi yang digambarkan pada setiap indikator, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan, yaitu dengan memberikan prioritas dan seleksi pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat terkait indikator yang masih rendah kualitasnya serta yang dianggap perlu.

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penyusunan IPD ini berasal dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2014. Secara periodik Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Dengan demikian IPD dapat disusun dan ditampilkan secara serial untuk mengkaji, memonitor dan evaluasi.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang terdiri dari tim Bappenas dan tim BPS. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam upaya penyusunan publikasi ini. Akhirnya, semoga kerja baik ini bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Jakarta, 31 Juli 2015  
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc.





## **MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

### **SAMBUTAN**



*Assalamu'alaikum WarahmatullaahiWabarokatuh*

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG. Jalan perubahan menuju visi tersebut salah satunya, ditempuh melalui "Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan." Pembangunan Desa telah menjadi agenda strategis Pemerintah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penguatan paradigma pembangunan desa tersebut juga selaras dengan amanat UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Agenda Pembangunan desa juga menjadi salah satu prioritas dan fokus koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Terbitnya UU Desa memberikan peluang kepada Desa dan masyarakat desa untuk menjadi subyek pembangunan. Dengan semakin diperkuatnya peran Masyarakat Desa di dalam UU Desa maka Pemerintahan Desa juga dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa, terbuka, serta bertanggungjawab. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mempertegas komitmennya dalam mempersiapkan dan menjalankan UU Desa yang diterapkan didalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi kebijakan, pendampingan dan program pembangunan berbasis desa.

Perumusan Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan pengejawantahan dari upaya pemerintah pusat dalam menjalankan UU Desa terutama terkait perencanaan pembangunan dan sebagai alat monitoring, yaitu mengukur perkembangan desa untuk menjadi Desa Mandiri. Oleh karena itu saya harapkan IPD dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan perencanaan kebijakan dan pengawasan pembangunan desa. Selain itu, dengan IPD dapat diberikan prioritas pada indikator pembangunan yang mana yang sekiranya dianggap paling perlu untuk segera ditangani. IPD juga menggambarkan kebhinekaan desa di tanah air yang jumlahnya mencapai 74.093, sehingga pendekatan pembangunan menyamaratakan setiap desa menjadi perihai yang sangat dihindari, mengingat masing-masing memiliki tingkat kompleksitas masalah yang berbeda dan beragam.



Pada tahap awal, IPD bagi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sangat penting untuk dipergunakan dalam menetapkan sasaran Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa). Esensi dari Gerakan Desa adalah meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang berbasis Desa dan kawasan perdesaan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa. Gerakan Desa yang kami luncurkan pada tanggal 7 April 2015 lalu, telah mendapat berbagai masukan dari ke-22 Kementerian/Lembaga, sehingga kita harapkan dapat mengawal pencapaian target RPJMN 2015-2019 yaitu mengentaskan paling tidak 5.000 Desa tertinggal dan membangun 2.000 desa mandiri. Target minimal ini, akan terus dievaluasi, agar dapat menjangkau jumlah Desa yang lebih banyak sehingga nantinya dapat ditingkatkan kualitasnya.

Saya menyambut baik dengan diterbitkannya buku “Indeks Pembangunan Desa 2014: Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa” semoga akan semakin meningkatkan upaya sinergitas pemerintah dalam mendorong dan mencapai perwujudan kesejahteraan dari desa, yaitu membangun dari pinggiran. Selamat kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Kepala Badan Pusat Statistik, saya yakin buku ini akan sangat bermanfaat bagi pembangunan bangsa sekarang dan nanti.

*Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarokatuh*

Jakarta, 25 Agustus 2015

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan



Puan Maharani

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar Menteri PPN/Kepala Bappenas .....</b>	<b>iii</b>
<b>Sambutan Kepala Badan Pusat Statistik .....</b>	<b>v</b>
<b>Sambutan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiv</b>

## **BAB I Kontekstualisasi Indeks Pembangunan Desa(IPD)**

1.1	Sekilas Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan .....	1
1.2	Sekilas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.....	1
1.3	Urgensi Indeks Pembangunan Desa (IPD).....	4
1.4	Konsep dan Metodologi IPD .....	5
1.4.1	Kerangka Konseptual IPD .....	5
1.4.2	Dimensi dan Variabel IPD .....	6
1.4.3	Metodologi Pengukuran IPD .....	8
1.4.4	Penentuan Bobot Dimensi , Variabel, dan Indikator.....	27
1.4.5	Penghitungan Indeks Tiap-tiap Dimensi, Variabel, dan Indikator .....	30
1.4.6	Klasifikasi Desa menurut Tingkat Kemajuannya .....	30

## **BAB II Indeks Pembangunan Desa 2014**

2.1	Kondisi Perkembangan Desa di Indonesia .....	33
2.2	Kondisi Perkembangan Desa Indonesia berdasarkan Pulau .....	34
2.3	Kondisi Perkembangan Desa Indonesia berdasarkan Provinsi .....	40

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ketersediaan dan Akses Ke TK/RA/BA .....	8
Tabel 1.2.	Ketersediaan dan Akses Ke SD Sederajat.....	8
Tabel 1.3.	Ketersediaan dan Akses Ke SMP Sederajat .....	9
Tabel 1.4.	Ketersediaan dan Akses Ke SMA Sederajat .....	9
Tabel 1.5.	Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Rumah Sakit.....	10
Tabel 1.6.	Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke RS Bersalin .....	10
Tabel 1.7.	Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Puskesmas .....	11
Tabel 1.8.	Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Poliklinik/Balai Pengobatan .....	11
Tabel 1.9.	Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Tempat Praktek Dokter .....	12
Tabel 1.10.	Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Tempat Praktek Bidan .....	13
Tabel 1.11.	Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Poskesdes Atau Polindes.....	13
Tabel 1.12.	Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Apotek .....	14
Tabel 1.13.	Ketersediaan Pertokoan, Minimarket Atau Toko Kelontong.....	15
Tabel 1.14.	Ketersediaan Pasar.....	15
Tabel 1.15.	Ketersediaan Restoran, Rumah Makan Atau Warung/Kedai Makan .....	16
Tabel 1.16.	Ketersediaan Akomodasi Hotel Atau Penginapan.....	16
Tabel 1.17.	Ketersediaan Bank.....	17
Tabel 1.18.	Elektrifikasi .....	17
Tabel 1.19.	Kondisi Penerangan di Jalan Utama .....	17
Tabel 1.20.	Bahan Bakar Untuk Memasak.....	18
Tabel 1.21.	Sumber Air Untuk Minum .....	18
Tabel 1.22.	Sumber Air Untuk Mandi/Cuci.....	18
Tabel 1.23.	Fasilitas Buang Air Besar .....	19
Tabel 1.24.	Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler .....	19
Tabel 1.25.	Ketersediaan Fasilitas Internet dan Pengiriman Pos Atau Barang.....	19
Tabel 1.26.	Lalu Lintas Dan Kualitas Jalan .....	20
Tabel 1.27.	Aksesibilitas Jalan .....	20
Tabel 1.28.	Ketersediaan Angkutan Umum .....	21
Tabel 1.29.	Operasional Angkutan Umum.....	21
Tabel 1.30.	Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Camat.....	21
Tabel 1.31.	Biaya Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Camat.....	22
Tabel 1.32.	Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Bupati/Walikota.....	22

Tabel 1.33. Biaya Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Bupati/Walikota.....	23
Tabel 1.34. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) .....	23
Tabel 1.35. Penanganan Gizi Buruk .....	23
Tabel 1.36. Ketersediaan Fasilitas Olah Raga .....	24
Tabel 1.37. Keberadaan Kelompok Kegiatan Olah Raga .....	24
Tabel 1.38. Kelengkapan Pemerintahan Desa .....	25
Tabel 1.39. Otonomi Desa .....	25
Tabel 1.40. Aset/Kekayaan Desa.....	26
Tabel 1.41. Kualitas SDM Kepala Desa.....	26
Tabel 1.42. Kualitas SDM Sekretaris Desa.....	27
Tabel 1.43. Besarnya kontribusi setiap indikator penyusun IPD .....	29
Tabel 2.1. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Menurut Sebaran Pulau.....	34
Tabel 2.2. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Sumatera .....	35
Tabel 2.3. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Jawa- Bali .....	36
Tabel 2.4. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Nusa Tenggara .....	37
Tabel 2.5. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Kalimantan.....	38
Tabel 2.6. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Sulawesi .....	39
Tabel 2.7. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Maluku.....	39
Tabel 2.8. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Papua .....	40
Tabel 2.9. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Aceh.....	42
Tabel 2.10. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara .....	43
Tabel 2.11. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sumatera Barat .....	45
Tabel 2.12. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Riau .....	47
Tabel 2.13. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Jambi .....	48
Tabel 2.14. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan .....	49
Tabel 2.15. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Bengkulu.....	51
Tabel 2.16. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Lampung.....	52
Tabel 2.17. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	53
Tabel 2.18. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Riau.....	54
Tabel 2.19. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat.....	56
Tabel 2.20. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah .....	59

Tabel 2.21. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	60
Tabel 2.22. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur .....	62
Tabel 2.23. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Banten.....	63
Tabel 2.24. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Bali.....	65
Tabel 2.25. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	66
Tabel 2.26. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	67
Tabel 2.27. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat .....	69
Tabel 2.28. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Tengah .....	70
Tabel 2.29. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Selatan .....	72
Tabel 2.30. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Timur.....	73
Tabel 2.31. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Utara .....	73
Tabel 2.32. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Utara.....	75
Tabel 2.33. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tengah.....	76
Tabel 2.34. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan.....	78
Tabel 2.35. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara.....	79
Tabel 2.36. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Gorontalo.....	80
Tabel 2.37. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Barat.....	81
Tabel 2.38. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Maluku.....	82
Tabel 2.39. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara .....	84
Tabel 2.40. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Papua Barat .....	85
Tabel 2.41. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Papua .....	88

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Formula Penghitungan IPD .....	30
Gambar 2.1.	Indeks Pembangunan Desa 2014 Menurut Pulau .....	33
Gambar 2.2.	Sebaran Persentil Indeks Pembangunan Desa 2014 Menurut Pulau .....	34
Gambar 2.3.	Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Sumatera .....	35
Gambar 2.4.	Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Jawa-Bali .....	36
Gambar 2.5.	Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Nusa Tenggara .....	37
Gambar 2.6.	Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Kalimantan .....	37
Gambar 2.7.	Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Sulawesi.....	38
Gambar 2.8.	Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Maluku .....	39
Gambar 2.9.	Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Papua .....	40
Gambar 2.10	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Aceh.....	41
Gambar 2.11	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.....	43
Gambar 2.12	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.....	45
Gambar 2.13	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Riau.....	46
Gambar 2.14	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Jambi.....	48
Gambar 2.15	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan .....	49
Gambar 2.16	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Bengkulu .....	50
Gambar 2.17	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Lampung .....	52
Gambar 2.18	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	53
Gambar 2.19	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau .....	54
Gambar 2.20	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.....	56
Gambar 2.21	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.....	58
Gambar 2.22	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	60
Gambar 2.23	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Jawa Timur .....	61
Gambar 2.24	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Banten .....	63

Gambar 2.25	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Bali.....	64
Gambar 2.26	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	65
Gambar 2.27	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	67
Gambar 2.28	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.....	69
Gambar 2.29	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.....	70
Gambar 2.30	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.....	71
Gambar 2.31	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur .....	72
Gambar 2.32	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara.....	73
Gambar 2.33	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara .....	74
Gambar 2.34	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah .....	76
Gambar 2.35	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan .....	77
Gambar 2.36	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara .....	79
Gambar 2.37	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Gorontalo .....	80
Gambar 2.38	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat .....	81
Gambar 2.39	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Maluku .....	82
Gambar 2.40	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Maluku Utara.....	83
Gambar 2.41	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Papua Barat.....	85
Gambar 2.42	Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Papua .....	87









# **BAB I**

## **Kontekstualisasi**

### **Indeks Pembangunan Desa (IPD)**



# BAB I

## Kontekstualisasi

### Indeks Pembangunan Desa (IPD)

---

Bab ini ditujukan untuk meletakkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dalam konteks nasional pembangunan desa dan pengukuran tingkat perkembangan desa, serta menjelaskan konsep dan metodologi yang digunakan untuk menyusun IPD. Secara khusus, bab ini akan menggambarkan sekilas mengenai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, pembangunan desa dan kawasan perdesaan di Indonesia terkini, urgensi IPD—mengapa ia diperlukan, serta konsep dan metodologi penyusunan IPD.

#### 1.1 Sekilas Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

RPJMN Tahun 2015–2019 merupakan dokumen strategis yang memuat rencana pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk lima tahun kedepan yang menjadi acuan resmi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. RPJMN 2015–2019 bidang wilayah dan tata ruang subbidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan memuat sasaran pembangunan desa yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai

5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa di tahun 2019. Untuk itu, segala daya dan upaya pembangunan desa baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya perlu didorong untuk memenuhi pencapaian sasaran pembangunan tersebut.

#### 1.2 Sekilas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan (*rural*) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan. Masyarakat perdesaan pada umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan perdesaan yang sangat terkait dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Masyarakat perdesaan pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan, serta masih kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar.

Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat ketimpangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi sebelumnya yang cenderung bias perkotaan (*urban bias*). Pembangunan perdesaan diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa,

dan menjadikan desa sebagai basis perubahan. Sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke perdesaan dengan maksud agar desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur di desa, seperti sarana pendidikan dan kesehatan, sarana dan prasarana energi, transportasi, dan komunikasi, serta sarana lain yang dibutuhkan, harus dapat disediakan sehingga memungkinkan desa menjadi berkembang dan maju. Prioritas pembangunan berbasis perdesaan (*rural-based development*) meliputi: (1) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan, (2) pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya (3) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, (4) pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa (5) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan (6) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota, serta (7) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa menjadi prioritas pembangunan yang diawali dengan Nawacita ke-tiga Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Definisi Desa (dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan pembangunan desa selain UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 yang juga menjadi acuan bagi pemangku kepentingan terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Terdapat dua hal menarik terkait dengan pembangunan desa. *Pertama*, program pembangunan di desa yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan terkait ternyata jumlahnya sangat banyak dan beragam, namun beberapa program dianggap belum menjawab atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, serta belum mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Tidak dapat dipungkiri bahwa desa-desa di Indonesiapun masih banyak yang belum memiliki RPJM Desa dan RKP Desa. Salah satu penyebab ketidaksinkronan pembangunan desa tersebut adalah karena Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait pembangunan desa tidak memiliki informasi yang memadai terkait kondisi dan kebutuhan desa-desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 74.093 desa. Pengumpulan bukti-bukti empiris mengenai kondisi nyata desa-desa di Indonesia menjadi suatu hal yang belum dapat dilakukan, mengingat adanya kendala terkait sumber daya manusia, waktu, dan anggaran yang dibutuhkan untuk itu yang jumlahnya akan sangat besar. Kendala tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemerintah pusat yang jangkauannya jauh

terhadap seluruh desa, namun juga dirasakan oleh pemerintah daerah yang secara lokus lebih dekat ke desa dan masyarakat desa.

*Kedua*, saat ini pembangunan desa yang dilaksanakan pada seluruh desa di Indonesia belum didasarkan pada suatu acuan baku berupa standar pelayanan minimal desa. Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) merupakan hak masyarakat desa terhadap pelayanan-pelayanan sebagai warga yang harus disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa di Desa. Sampai dengan saat ini SPM Desa dengan lingkup nasional masih belum tersedia. Meskipun demikian, tidak ada salahnya apabila pemerintah daerah maupun pemerintah desa dapat menetapkan standar pelayanan minimal desa terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desanya.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM Desa antara lain: (1) kondisi dan kebutuhan antara satu desa dengan desa lainnya yang berbeda-beda sehingga standar pelayanan minimalnya tidak dapat diseragamkan baik aspek maupun volumenya; (2) sumber daya yang masih terbatas baik sumberdaya manusia maupun penganggarnya; dan (3) belum terbaginya kewenangan/urusan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam pemenuhan standar pelayanan minimal desa dengan mengacu pada UU Desa dan peraturan pelaksanaannya. Adapun rujukan mengenai aspek pemenuhan SPM Desa adalah UU Desa dan peraturan pelaksanaannya dimana disebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui

penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. IPD disusun sebagai upaya untuk mengakomodasi beberapa aspek pemenuhan SPM Desa sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut walaupun tidak dapat mencakup seluruhnya karena adanya keterbatasan data.

Dalam rangka menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa, maka Desa dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Berdasarkan IPD tahun 2014, desa mandiri berjumlah 2.898 desa; desa berkembang berjumlah 50.763 desa; dan desa tertinggal berjumlah 20.432 desa. Desa Mandiri adalah Desa yang telah terpenuhi SPM Desa mencakup beberapa aspek yaitu: kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kelembagaan desa yang keberlanjutan. Desa Berkembang adalah Desa yang sudah terpenuhi SPM Desa pada semua aspek tetapi pengelolaannya belum menunjukkan keberlanjutan. Sedangkan, Desa Tertinggal adalah Desa yang belum terpenuhi SPM Desa pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, 5 (lima) aspek/dimensi yang tertuang dalam IPD semaksimal mungkin dapat sejalan dengan semua aspek/dimensi yang harus tersedia dalam pemenuhan SPM Desa untuk pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



*Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun untuk melihat tingkat perkembangan desa di Indonesia. Selain itu, IPD dimaksudkan sebagai instrumen: (a) perencanaan pembangunan desa di Indonesia; (b) monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan desa; dan (c) pengukuran pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2015–2019 di Indonesia. Berdasarkan 3 tujuan tersebut maka IPD memiliki berbagai pertimbangan khusus.*

### 1.3 Urgensi Indeks Pembangunan Desa (IPD)

IPD merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan unit analisisnya “Desa”. Pengukuran IPD bersifat *village specific*, yang dibangun dari 2 (dua) sumber data yaitu: (1) data hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan April 2014 dan digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks; serta (2) data Wilayah Administrasi Pemerintahan menurut Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 yang digunakan sebagai rujukan standar terkait jumlah Desa teregistrasi di Indonesia. Dalam perkembangannya, jumlah desa menurut Permendagri melebihi jumlah desa hasil Potensi Desa 2014 sebagai akibat terjadinya pemekaran desa setelah April 2014. Terhadap desa-desa hasil pemekaran wilayah tersebut maka IPD-nya diestimasi berdasarkan nilai IPD desa induknya atau berdasarkan rata-rata IPD desa-desa lain yang secara spasial letaknya berdekatan dengan desa hasil pemekaran. Dalam merumuskan konsep dan metodologi pengukurannya, maka pengukuran IPD telah mempertimbangkan berbagai unsur kekhasan persoalan desa–desa di Indonesia.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, **mandiri**, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Atas dasar amanat tersebut maka Desa diklasifikasikan berdasarkan IPD menjadi Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. *Output* dari penyusunan IPD ini adalah terpetakannya Desa–Desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal di seluruh provinsi di Indonesia disertai dengan informasi untuk masing–masing dimensi, variabel, dan indikator penyusunnya.

Pengklasifikasian desa pernah dilakukan dengan klasifikasi: Desa Swasembada, Desa Swakarya, dan Desa Swadaya. Hampir seluruh desa menyambut baik pengklasifikasian tersebut sebagai suatu upaya untuk mengetahui tingkat perkembangannya masing–masing desa.

Klasifikasi desa dimunculkan kembali dalam RPJMN 2015–2019 terutama dikaitkan dengan sasaran pembangunan desa yang bertujuan untuk: (1) memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya; (2) menetapkan target/sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan yang harus dicapai secara bersama–sama oleh para pelaku pembangunan desa; dan (3) memotret kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa.

Penyusunan IPD ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjadikan IPD sebagai: (1) suatu alat/instrumen yang memberikan informasi bagi pelaku pembangunan desa baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa agar dapat melakukan intervensi kebijakan yang tepat sebagai upaya pengungkit perkembangan desanya; (2) suatu alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pembangunan desa dalam rangka pencapaian sasaran/target RPJMN 2015–2019.

IPD disusun dengan “Desa” sebagai unit analisis, dan ditambah dengan berbagai informasi berupa rata-rata indeks per pulau, rata-rata indeks per provinsi, dan rata-rata indeks per kabupaten/kota untuk memberikan potret terkait kondisi atau status perkembangan desa-desa per pulau, provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia. Dengan kata lain, IPD merupakan suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana pemenuhan atau pencapaian dimensi/aspek, variabel, dan indikator sebagai penjabaran dari dimensi/aspek perkembangan desa tersebut.

IPD diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat. *Pertama*, IPD memuat data dan informasi penting yang dapat dijadikan sebagai acuan/referensi untuk melihat kondisi dan tingkat perkembangan desa di Indonesia pada posisi terkini. Data ini sangat membantu para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah, pengamat, peneliti, mahasiswa, bahkan masyarakat desa itu sendiri untuk memahami kondisi terkini kemajuan pembangunan desa di Indonesia. *Kedua*, IPD berguna sebagai bahan bagi perencanaan pembangunan desa di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), tingkat provinsi (Bappeda dan SKPD terkait pembangunan desa), tingkat kabupaten/kota (Bappeda dan SKPD terkait pembangunan desa), serta tingkat desa (pemerintah desa dan masyarakat desa).

IPD memuat data yang dapat menunjukkan dimensi, variabel, dan indikator mana saja yang perlu didukung untuk lebih ditingkatkan dan yang tidak perlu didukung karena dianggap sudah optimal/memadai di tingkat desa. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan desa dapat menjadikan IPD sebagai rujukan dalam proses perumusan kebijakan, penyiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan desa. *Ketiga*, IPD berguna untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program dalam pembangunan desa, kesesuaian antara program yang telah dilaksanakan dengan kebutuhan desa, serta tercapai peningkatan status kemajuan desa tersebut.

## 1.4 Konsep dan Metodologi IPD

Pembangunan desa merupakan konsep multidimensional yang kompleks. Pengukuran tingkat kemajuan pembangunan desa diharapkan tetap mengacu pada kompleksitas konsep tersebut meskipun perlu diupayakan adanya penyederhanaan dalam hal instrumen dan teknis pengukurannya. Dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur konsep pembangunan desa perlu disusun secara teliti sehingga secara komposit akan mampu menggambarkan tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan desa. Indikator yang digunakan diupayakan mampu semaksimal mungkin untuk menggambarkan kondisi nyata tingkat pembangunan desa yang dipotret pada suatu waktu. Bagian ini akan menyajikan uraian terkait konseptualisasi dan kontekstualisasi pembangunan desa dalam kaitannya dengan upaya penyusunan IPD.

### 1.4.1 Kerangka Konseptual IPD

Tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan desa perlu diukur menggunakan beberapa ukuran yang secara fungsional saling

terkait untuk menggambarkan konsep tersebut secara komprehensif. Beberapa dimensi disusun untuk mencakup sekaligus beberapa variabel dan indikator. Antar dimensi diharapkan bersifat saling melengkapi untuk menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan di setiap desa.

Dalam penyusunan dimensi, variabel, dan indikator penyusunan IPD, ada beberapa prinsip dasar yakni:

- (1) Data dasar yang digunakan dalam penyusunan variabel dan indikator penyusunan IPD adalah data Potensi Desa 2014 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- (2) Data kondisi desa yang menjadi indikator IPD adalah data Potensi Desa 2014 yang dapat diperbandingkan antar desa satu dengan yang lainnya. Beberapa data dasar yang ada di Potensi Desa 2014 merupakan data yang tidak dapat diperbandingkan.
- (3) Beberapa dimensi merupakan bagian dari dimensi yang lainnya, namun karena kekhususannya, maka disebutkan dalam dimensi tersendiri.
- (4) Aspek ketimpangan indikator antara daerah yang dinilai sangat maju, dan sangat tertinggal semaksimal mungkin diminimalisir dengan menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA).
- (5) Basis teori dalam penentuan dimensi dalam IPD bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

#### 1.4.2 Dimensi dan Variabel IPD

Dimensi dan variabel IPD didasarkan atas sintesa terhadap:

- (1) Data Potensi Desa 2014
- (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada pasal 74 tentang kebutuhan pembangunan desa

dan pasal 78 tentang tujuan pembangunan desa.

Dalam pasal 74 disebutkan bahwa paling tidak ada 4 aspek yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa yakni: (1) kebutuhan dasar; (2) pelayanan dasar; (3) lingkungan; dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam bagian penjelasan dalam UU tersebut, kebutuhan dasar didefinisikan sebagai upaya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sementara, pelayanan dasar antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sedangkan dalam pasal 78 tujuan pembangunan desa meliputi: (1) Kesejahteraan Masyarakat; (2) Kualitas Hidup; dan (3) Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini diwujudkan melalui (1) Kebutuhan Dasar; (2) Sarana; (3) Prasarana; (4) Pengembangan Ekonomi Lokal; dan (5) Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan.

Hasil sintesis tersebut membagi dimensi IPD menjadi 5 dimensi dengan disesuaikan dengan ketersediaan data/variabel dalam data Potensi Desa 2014 yaitu sebagai berikut.

1. **Pelayanan Dasar** mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel yang termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA; serta ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, dan apotek.
2. **Kondisi Infrastruktur** mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek

aksesibilitas/transportasi. Variabel-variabel penyusunnya mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan, minimarket, maupun toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank; ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak; ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.

3. **Aksesibilitas/Transportasi** dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel-variabel penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum; dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota, dan biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota.

Indikator jarak antara desa dengan pusat pemerintahan ini merujuk dari variabel yang tercantum dalam Potensi Desa 2014, dengan asumsi bahwa pada umumnya pusat kegiatan sosial-ekonomi suatu

kawasan berada di sekitar/dekat pusat-pusat pemerintahan.

4. **Pelayanan Umum** merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena kekhususannya, variabel pelayanan administratif dinyatakan sebagai dimensi tersendiri (Penyelenggaraan Pemerintahan). Begitupun dengan variabel pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya menjadi dimensi tersendiri yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada ketersediaan data Potensi Desa 2014. Aspek lingkungan dalam hal ini terkait dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat diwakili dengan keberadaan kelompok kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, variabel-variabel penyusun dimensi ini mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti: penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan penanganan gizi buruk; serta ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.
5. **Penyelenggaraan Pemerintahan** mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Oleh karena itu variabel ini perlu diukur dan berdiri sendiri sebagai sebuah indikator pembangunan desa, karena sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan pembangunan desa tersebut. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti: kelengkapan

pemerintahan desa, otonomi desa, dan asset/kekayaan desa; serta kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.

Pembahasan setiap dimensi, variabel, dan skor indikator secara rinci dituangkan dalam pembahasan berikut ini.

### 1.4.3 Metodologi Pengukuran IPD

Dimensi Pelayanan Dasar mencakup ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terdapat 2 variabel dan 12 indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pelayanan dasar, yaitu:

#### 1. Variabel 1 (V1): Pelayanan Pendidikan

##### ▪ Indikator 1 (I1) : Ketersediaan dan Akses Ke TK/RA/BA

Tabel 1.1. Ketersediaan dan Akses Ke TK/RA/BA

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	6.614	8,9%
1	3.714	5,0%
2	18.753	25,3%
3	12.509	16,9%
4	18.064	24,4%
5	14.439	19,5%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

##### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat TK/RA/BA. Jarak menuju TK/RA/BA terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 20 km.

**Kode 1 (satu)** merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat TK/RA/BA. Jarak menuju TK/RA/BA terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 10 km dan kurang dari 20 km.

**Kode 2 (dua)** merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat TK/RA/BA. Jarak menuju TK/RA/BA kurang dari 10 km.

**Kode 3 (tiga)** merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat TK/RA/BA dengan rasio

ketersediaan TK/RA/BA terhadap penduduk desa kurang dari 0.00047665382434 (5 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 4 (empat)** merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat TK/RA/BA dengan rasio ketersediaan TK/RA/BA terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0.00047665382434 (5 fasilitas per 10.000 penduduk) dan kurang dari 0.00095330764868 (10 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 5 (lima)** merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat TK/RA/BA dengan rasio ketersediaan TK/RA/BA terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0.00095330764868 (10 fasilitas per 10.000 penduduk).

##### ▪ Indikator 2 (I2): Ketersediaan dan Akses Ke SD Sederajat

Tabel 1.2. Ketersediaan dan Akses Ke SD Sederajat

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	1.493	2,0%
1	855	1,2%
2	7.926	10,7%
3	17.964	24,2%
4	27.621	37,3%
5	18.234	24,6%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

##### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SD sederajat. Jarak menuju SD sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 8 km.

**Kode 1 (satu)** merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SD sederajat. Jarak menuju SD sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 4 km dan kurang dari 8 km.

**Kode 2 (dua)** merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SD sederajat. Jarak menuju SD sederajat kurang dari 4 km.

**Kode 3 (tiga)** merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SD sederajat dengan

rasio ketersediaan SD sederajat terhadap penduduk desa kurang dari 0,00069840871109 (7 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 4 (empat)** merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SD sederajat dengan rasio ketersediaan SD sederajat terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00069840871109 (7 fasilitas per 10.000 penduduk) dan kurang dari 0,00139681742219 (14 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 5 (lima)** merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SD sederajat dengan rasio ketersediaan SD sederajat terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00139681742219 (14 fasilitas per 10.000 penduduk).

#### ▪ Indikator 3 (I3): Ketersediaan dan Akses Ke SMP Sederajat

Tabel 1.3. Ketersediaan dan Akses Ke SMP Sederajat

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	6.196	8,4%
1	4.145	5,6%
2	14.105	19,0%
3	20.420	27,6%
4	16.451	22,2%
5	12.776	17,2%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMP sederajat. Jarak menuju SMP sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 9 km.

**Kode 1 (satu)** merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMP sederajat. Jarak menuju SMP sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 6 km dan kurang dari 9 km.

**Kode 2 (dua)** merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMP sederajat. Jarak menuju SMP sederajat terdekat lebih dari atau sama dengan 3 km dan kurang dari 6 km.

**Kode 3 (tiga)** merupakan kondisi dimana di desa tersebut tidak terdapat SMP sederajat. Jarak menuju SMP sederajat terdekat kurang dari 3 km.

**Kode 4 (empat)** merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SMP sederajat dengan rasio ketersediaan SMP sederajat terhadap penduduk desa kurang dari 0,00053531809209 (5 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 5 (lima)** merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SMP sederajat dengan rasio ketersediaan SMP sederajat terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00053531809209 (5 fasilitas per 10.000 penduduk).

#### ▪ Indikator 4 (I4): Ketersediaan dan Akses Ke SMA Sederajat

Tabel 1.4. Ketersediaan dan Akses Ke SMA Sederajat

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	10.520	14,2%
1	6.658	9,0%
2	13.924	18,8%
3	28.849	38,9%
4	7.905	10,7%
5	6.237	8,4%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMA sederajat. Jarak menuju SMA sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 14 km.

**Kode 1 (satu)** merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMA sederajat. Jarak menuju SMA sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 9 km dan kurang dari 14 km.

**Kode 2 (dua)** merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMA sederajat. Jarak menuju SMA sederajat terdekat lebih dari atau sama dengan 5 km dan kurang dari 9 km.



**Kode 3 (tiga)** merupakan kondisi dimana di desa tersebut tidak terdapat SMA sederajat. Jarak menuju SMA sederajat terdekat kurang dari 5 km.

**Kode 4 (empat)** merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SMA sederajat dengan rasio ketersediaan SMA sederajat terhadap penduduk desa kurang dari 0,00044061849597 (4 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 5 (lima)** merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SMA sederajat dengan rasio ketersediaan SMA sederajat terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00044061849597 (4 fasilitas per 10.000 penduduk).

## 2. Variabel 2 (V2): Pelayanan Kesehatan

### ▪ Indikator 5 (I5): Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Rumah Sakit

Tabel 1.5. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Rumah Sakit

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	20.713	28,0%
1	16.947	22,9%
2	3.618	4,9%
3	32.059	43,3%
4	365	0,5%
5	391	0,5%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 23 km dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 1 (satu)** merupakan kondisi desa yang tidak terdapat rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 23 km dan untuk mencapai fasilitas tersebut dianggap mudah atau sangat mudah.

**Kode 2 (dua)** merupakan kondisi desa yang tidak terdapat rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit terdekat kurang dari 23 km dan untuk mencapai dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 3 (tiga)** merupakan kondisi desa yang tidak terdapat rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit terdekat kurang dari 23 km dan untuk mencapai fasilitas tersebut dianggap mudah atau sangat mudah.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang terdapat rumah sakit dengan rasio ketersediaan rumah sakit terhadap penduduk desa kurang dari 0,00018983029742 (2 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat rumah sakit dengan rasio ketersediaan rumah sakit terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00018983029742 (2 fasilitas per 10.000 penduduk).

### ▪ Indikator 6 (I6): Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke RS Bersalin

Tabel 1.6. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke RS Bersalin

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	22.076	29,8%
1	9.186	12,4%
2	6.419	8,7%
3	34.913	47,1%
4	425	0,6%
5	10.74	1,4%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat rumah sakit bersalin maupun rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit bersalin terdekat lebih dari atau sama dengan 44 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang tidak terdapat rumah sakit bersalin maupun rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit bersalin



terdekat lebih dari atau sama dengan 44 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak terdapat rumah sakit bersalin maupun rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit bersalin terdekat kurang dari 44 km, dan untuk mencapai dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang tidak terdapat rumah sakit bersalin maupun rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit bersalin terdekat kurang dari 44 km, dan untuk mencapai dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang terdapat rumah sakit bersalin dengan rasio ketersediaan rumah sakit bersalin terhadap penduduk desa kurang dari 0,00017982346108 (2 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat rumah sakit bersalin dengan rasio ketersediaan rumah sakit bersalin terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00017982346108 (2 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat rumah sakit.

#### ▪ Indikator 7 (I7): Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Puskesmas

Tabel 1.7. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Puskesmas

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	5.657	7,6%
1	10.626	14,3%
2	1.206	1,6%
3	27.634	37,3%
4	16.357	22,1%
5	12.613	17,0%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat puskesmas/pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju puskesmas/pustu terdekat lebih dari atau sama

dengan 4 km dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang tidak terdapat puskesmas/pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju puskesmas/pustu terdekat lebih dari sama dengan 4 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak terdapat puskesmas/pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju puskesmas/pustu terdekat kurang dari 4 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang tidak terdapat puskesmas/pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju puskesmas/pustu terdekat kurang dari 4 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang terdapat puskesmas/pustu dengan rasio ketersediaan puskesmas/pustu terhadap penduduk desa kurang dari 0,00062957239928 (6 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat rumah sakit bersalin, tetapi tidak ada rumah sakit.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat puskesmas/pustu dengan rasio ketersediaan puskesmas/pustu terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00062957239928 (6 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat rumah sakit tanpa memperhatikan ketersediaan rumah sakit bersalin.

#### ▪ Indikator 8 (I8): Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Poliklinik/Balai Pengobatan

Tabel 1.8. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Poliklinik/Balai Pengobatan

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	11.862	16,0%
1	7.024	9,5%
2	3.071	4,1%
3	21.246	28,7%
4	28.321	38,2%
5	2.569	3,5%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poliklinik/balai pengobatan terdekat lebih dari atau sama dengan 19 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang tidak terdapat poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poliklinik/balai pengobatan terdekat lebih dari atau sama dengan 19 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak terdapat poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poliklinik/balai pengobatan terdekat kurang dari 19 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang tidak terdapat poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poliklinik/balai pengobatan terdekat kurang dari 19 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang terdapat poliklinik/balai pengobatan dengan rasio ketersediaan poliklinik/balai pengobatan terhadap penduduk desa kurang dari 0,00028457719787 (3 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat puskesmas/pustu, tetapi tidak ada rumah sakit bersalin maupun rumah sakit.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat poliklinik/balai pengobatan dengan rasio ketersediaan poliklinik/balai pengobatan terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00028457719787 (3 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat rumah sakit bersalin atau rumah sakit, tanpa mempertimbangkan ketersediaan puskesmas/pustu.

#### Indikator 9 (I9): Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Tempat Praktek Dokter

Tabel 1.9. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Tempat Praktek Dokter

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	10.070	13,6%
1	5.233	7,1%
2	2.162	2,9%
3	23.328	31,5%
4	3.276	4,4%
5	30.024	40,5%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek dokter terdekat lebih dari atau sama dengan 14 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek dokter terdekat lebih dari atau sama dengan 14 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek dokter terdekat kurang dari 14 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek dokter terdekat kurang dari 14 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang terdapat tempat praktek dokter dengan rasio ketersediaan tempat praktek dokter terhadap penduduk desa kurang dari 0,0003571413567

(4 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat poliklinik/balai pengobatan, tetapi tidak ada puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat tempat praktek dokter dengan rasio ketersediaan tempat praktek dokter terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,0003571413567 (4 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, atau rumah sakit, tanpa mempertimbangkan ketersediaan poliklinik/balai pengobatan.

▪ **Indikator 10 (I10): Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Tempat Praktek Bidan**

Tabel 1.10. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Tempat Praktek Bidan

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	8.528	11,5%
1	2.625	3,5%
2	2.188	3,0%
3	12.769	17,2%
4	9.568	12,9%
5	38.415	51,8%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek bidan terdekat lebih dari atau sama dengan 16 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek bidan terdekat lebih dari atau sama dengan 16 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek bidan terdekat kurang dari 16 km, dan untuk

mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek bidan terdekat kurang dari 16 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang terdapat tempat praktek bidan dengan rasio ketersediaan tempat praktek bidan terhadap penduduk desa kurang dari 0,00050732962398 (5 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat tempat praktek dokter, tetapi tidak tersedia poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat tempat praktek bidan dengan rasio ketersediaan tempat praktek bidan terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00050732962398 (5 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, atau rumah sakit, tanpa mempertimbangkan ketersediaan tempat praktek dokter.

▪ **Indikator 11 (I11): Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Poskesdes Atau Polindes**

Tabel 1.11. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Poskesdes Atau Polindes

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	5.082	6,9%
1	1.327	1,8%
2	1.125	1,5%
3	6.421	8,7%
4	17.986	24,3%
5	42.152	56,9%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat poskesdes, polindes, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju

poskesdes atau polindes terdekat lebih dari atau sama dengan 8 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang tidak terdapat poskesdes, polindes, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poskesdes atau polindes terdekat lebih dari atau sama dengan 8 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak terdapat poskesdes, polindes, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poskesdes atau polindes terdekat kurang dari 8 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang tidak terdapat poskesdes, polindes, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poskesdes atau polindes terdekat kurang dari 8 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang terdapat poskesdes atau polindes dengan rasio ketersediaan poskesdes atau polindes terhadap penduduk desa kurang dari 0,00070719038224 (7 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat tempat praktek bidan, tetapi tidak tersedia tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat poskesdes atau polindes dengan rasio ketersediaan poskesdes atau polindes terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00070719038224 (7 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, atau rumah sakit, tanpa mempertimbangkan ketersediaan tempat praktek bidan.

## Indikator 12 (I12): Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Apotek

Tabel 1.12. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Apotek

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	18.835	25,4%
1	12.329	16,6%
2	3.013	4,1%
3	35.256	47,6%
4	2.834	3,8%
5	1.826	2,5%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat apotek. Jarak menuju apotek terdekat lebih dari atau sama dengan 17 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang tidak terdapat apotek. Jarak menuju apotek terdekat lebih dari atau sama dengan 17 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak terdapat apotek. Jarak menuju apotek terdekat kurang dari 17 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang tidak terdapat apotek. Jarak menuju apotek terdekat kurang dari 17 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang terdapat apotek dengan rasio ketersediaan apotek terhadap penduduk desa kurang dari 0,00032420638537 (3 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat apotek dengan rasio ketersediaan apotek terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00032420638537 (3 fasilitas per 10.000 penduduk).

### 3. Variabel: Infrastruktur Ekonomi

#### ▪ Indikator 13 (I13): Ketersediaan Pertokoan, Minimarket Atau Toko/Warung Kelontong

Tabel 1.13. Ketersediaan Pertokoan, Minimarket Atau Toko/Warung Kelontong

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	8.669	11,7%
1	31.011	41,9%
2	23.803	32,1%
3	2.212	3,0%
4	1.108	1,5%
5	7.290	9,8%
	<b>74.093</b>	<b>100%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat kelompok pertokoan, minimarket, maupun toko/warung kelontong.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang tidak terdapat kelompok pertokoan maupun minimarket, tetapi tersedia toko/warung kelontong dengan rasio ketersediaan toko/warung kelontong terhadap penduduk desa kurang dari 0,01004450094485 (100 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak terdapat kelompok pertokoan maupun minimarket, tetapi tersedia toko/warung kelontong dengan rasio ketersediaan toko/warung kelontong terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,01004450094485 (100 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang tidak terdapat kelompok pertokoan tetapi tersedia minimarket dengan rasio ketersediaan minimarket terhadap penduduk desa kurang dari 0,00043681590218 (4 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan toko/warung kelontong.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang tidak terdapat kelompok pertokoan tetapi tersedia minimarket dengan rasio ketersediaan minimarket terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00043681590218 (4 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan toko/warung kelontong.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat terdapat kelompok pertokoan tanpa

mempertimbangkan ketersediaan minimarket maupun toko/warung kelontong.

#### ▪ Indikator 14 (I14): Ketersediaan Pasar

Tabel 1.14. Ketersediaan Pasar

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	56.181	75,8%
1	5.475	7,4%
2	4.276	5,8%
3	3.163	4,3%
4	3.580	4,8%
5	1.418	1,9%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat pasar dengan bangunan permanen, pasar dengan bangunan semi permanen, maupun pasar tanpa bangunan.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang tidak terdapat pasar dengan bangunan permanen maupun pasar dengan bangunan semi permanen, tetapi masih ada pasar tanpa bangunan.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak terdapat pasar dengan bangunan permanen, tetapi masih ada pasar dengan bangunan semi permanen dengan rasio ketersediaan pasar dengan bangunan semi permanen terhadap penduduk desa kurang dari 0,00053925247833 (5 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan pasar tanpa bangunan.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang tidak terdapat pasar dengan bangunan permanen, tetapi masih ada pasar dengan bangunan semi permanen dengan rasio ketersediaan pasar dengan bangunan semi permanen terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00053925247833 (5 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan pasar tanpa bangunan.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang terdapat pasar dengan bangunan permanen dengan rasio ketersediaan pasar dengan bangunan permanen terhadap penduduk desa kurang dari 0,00039399640901 (4 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan pasar dengan bangunan semi permanen maupun pasar tanpa bangunan.



**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat pasar dengan bangunan permanen dengan rasio ketersediaan pasar dengan bangunan permanen terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00039399640901 (4 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan pasar dengan bangunan semi permanen maupun pasar tanpa bangunan.

▪ **Indikator 15 (I15): Ketersediaan Restoran, Rumah Makan Atau Warung/Kedai Makanan Minuman**

Tabel 1.15. Ketersediaan Restoran, Rumah Makan Atau Warung/Kedai Makanan Minuman

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	28.284	38,2%
1	25.828	34,9%
2	9.603	13,0%
3	6.296	8,5%
4	2.457	3,3%
5	1.625	2,2%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat restoran/rumah makan maupun warung/kedai makanan minuman.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang tidak terdapat restoran/rumah makan, tetapi ada warung/kedai makanan minuman dengan rasio ketersediaan warung/kedai makanan minuman terhadap penduduk desa kurang dari 0,00408160850626 (40 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak terdapat restoran/rumah makan, tetapi ada warung/kedai makanan minuman dengan rasio ketersediaan warung/kedai makanan minuman terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00408160850626 (40 fasilitas per 10.000 penduduk) dan kurang dari 0,00816321701253 (82 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang tidak terdapat restoran/rumah makan, tetapi ada warung/kedai makanan minuman dengan rasio ketersediaan warung/kedai makanan minuman terhadap penduduk desa lebih dari atau sama

dengan 0,00816321701253 (82 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang terdapat restoran/rumah makan dengan rasio ketersediaan restoran/rumah makan terhadap penduduk desa kurang dari 0,0007165878916 (72 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan warung/kedai makanan minuman.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat restoran/rumah makan dengan rasio ketersediaan restoran/rumah makan terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,0007165878916 (72 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan warung/kedai makanan minuman.

▪ **Indikator 16 (I16): Ketersediaan Akomodasi Hotel Atau Penginapan**

Tabel 1.16. Ketersediaan Akomodasi Hotel Atau Penginapan

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	71.142	96,0%
1	1.116	1,5%
2	294	0,4%
3	249	0,3%
4	813	1,1%
5	479	0,6%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat hotel maupun penginapan.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang tidak terdapat hotel tetapi ada penginapan dengan rasio ketersediaan penginapan terhadap penduduk desa kurang dari 0,00096503248013 (10 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak terdapat hotel tetapi ada penginapan dengan rasio ketersediaan penginapan terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00096503248013 (10 fasilitas per 10.000 penduduk) dan kurang dari 0,00193006496027 (19 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang tidak terdapat hotel tetapi ada penginapan dengan rasio ketersediaan penginapan terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00193006496027 (19 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang terdapat hotel dengan rasio ketersediaan hotel terhadap penduduk desa kurang dari 0,00044619619601 (4 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan penginapan.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat hotel dengan rasio ketersediaan hotel terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00044619619601 (4 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan penginapan.

▪ **Indikator 17 (I17): Ketersediaan Bank**

Tabel 1.17. Ketersediaan Bank

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	68.604	92,6%
1	1.696	2,3%
2	1.728	2,3%
3	864	1,2%
4	429	0,6%
5	772	1,0%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak terdapat bank.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang terdapat bank dengan rasio ketersediaan bank terhadap penduduk desa kurang dari 0,00022567912721 (2 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang terdapat bank dengan rasio ketersediaan bank terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00022567912721 (2 fasilitas per 10.000 penduduk) dan kurang dari 0,00045135825442 (5 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang terdapat bank dengan rasio ketersediaan bank terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00045135825442 (5 fasilitas per 10.000 penduduk) dan kurang dari 0,00067703738163 (7 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang terdapat bank dengan rasio ketersediaan bank terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00067703738163 (7 fasilitas per 10.000 penduduk) dan kurang dari 0,00090271650884 (9 fasilitas per 10.000 penduduk).

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang terdapat bank dengan rasio ketersediaan bank terhadap

penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00090271650884 (9 fasilitas per 10.000 penduduk).

**4. Variabel: Infrastruktur Energi**

▪ **Indikator 18 (I18): Elektrifikasi**

Tabel 1.18. Elektrifikasi

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	5.017	6,8%
1	1.976	2,7%
2	2.290	3,1%
3	2.398	3,2%
4	4.848	6,5%
5	57.564	77,7%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang persentase keluarga pengguna listrik kurang dari atau sama dengan 17 persen.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang persentase keluarga pengguna listrik lebih dari 17 persen dan kurang dari atau sama dengan 33 persen.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang persentase keluarga pengguna listrik lebih dari 33 persen dan kurang dari atau sama dengan 50 persen.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang persentase keluarga pengguna listrik lebih dari 50 persen dan kurang dari atau sama dengan 67 persen.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang persentase keluarga pengguna listrik lebih dari 67 persen dan kurang dari atau sama dengan 83 persen.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang persentase keluarga pengguna listrik lebih dari 83 persen.

▪ **Indikator 19 (I19): Kondisi Penerangan di Jalan Utama Desa**

Tabel 1.19. Kondisi Penerangan di Jalan Utama Desa

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	31.048	41,9
2	194	0,3
3	13.522	18,3
5	29.329	39,6
	<b>74.093</b>	<b>100,0</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak ada penerangan di jalan utama desa.



**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang ada penerangan di jalan utama desa dengan jenis penerangannya berupa non listrik.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang ada penerangan di jalan utama desa dengan jenis penerangannya berupa listrik yang diusahakan oleh non pemerintah.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang ada penerangan di jalan utama desa dengan jenis penerangannya berupa listrik yang diusahakan oleh pemerintah.

▪ **Indikator 20 (I20): Bahan Bakar Untuk Memasak**

Tabel 1.20. Bahan Bakar Untuk Memasak

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	233	0,3%
1	35.484	47,9%
2	1.627	2,2%
3	1.557	2,1%
4	3.793	5,1%
5	31.399	42,4%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang sebagian besar keluarganya menggunakan batubara, arang, dan lain-lain untuk memasak.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang sebagian besar keluarganya menggunakan kayu bakar untuk memasak.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang sebagian besar keluarganya menggunakan minyak tanah untuk memasak, tetapi tidak ada agen/penjual minyak tanah.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang sebagian besar keluarganya menggunakan minyak tanah untuk memasak, dan ada agen/penjual minyak tanah.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang sebagian besar keluarganya menggunakan LPG atau gas kota untuk memasak, tetapi tidak ada pangkalan/agen/penjual LPG.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang sebagian besar keluarganya menggunakan LPG atau gas kota, dan ada pangkalan/agen/penjual LPG.

5. **Variabel: Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi**

▪ **Indikator 21 (I21): Sumber Air Untuk Minum**

Tabel 1.21. Sumber Air Untuk Minum

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	3.610	4,9%
1	4.712	6,4%
2	18.037	24,3%
3	26.617	35,9%
4	11.542	15,6%
5	9.575	12,9%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari air hujan atau lainnya.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari sungai/danau/kolam.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari mata air.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari sumur.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari ledeng tanpa meteran, sumur bor, atau pompa.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari air kemasan, atau ledeng dengan meteran.

▪ **Indikator 22 (I22): Sumber Air Untuk Mandi/Cuci**

Tabel 1.22. Sumber Air Untuk Mandi/Cuci

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	1.238	1,7%
1	11.763	15,9%
2	15.562	21,0%
3	28.391	38,3%
4	12.476	16,8%
5	4.663	6,3%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari air hujan atau lainnya.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari sungai/danau/kolam.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari mata air.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari sumur.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari ledeng tanpa meteran, sumur bor, atau pompa.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari ledeng dengan meteran.

▪ **Indikator 23 (I23): Fasilitas Buang Air Besar**

Tabel 1.23. Fasilitas Buang Air Besar

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	16.281	22,0
2	4.621	6,2
3	4.066	5,5
5	49.125	66,3
	74.093	100,0

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga adalah bukan jamban.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga adalah jamban umum.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga adalah jamban bersama.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga adalah jamban sendiri.

6. **Variabel: Infrastruktur Komunikasi dan Informasi**

▪ **Indikator 24 (I24): Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler**

Tabel 1.24. Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	7.337	9,9%
1	819	1,1%
2	15.891	21,4%
3	2.220	3,0%
4	28.516	38,5%
5	19.310	26,1%
	74.093	100,0%

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak ada *Base Transceiver Station* (BTS) dan tidak ada sinyal telepon seluler/*handphone*.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang ada *Base Transceiver Station* (BTS), tetapi tidak ada sinyal telepon seluler/*handphone*.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak ada *Base Transceiver Station* (BTS), tetapi ada sinyal telepon seluler/*handphone* yang lemah.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang ada *Base Transceiver Station* (BTS), tetapi ada sinyal telepon seluler/*handphone* yang lemah.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang tidak ada *Base Transceiver Station* (BTS), tetapi ada sinyal telepon seluler/*handphone* yang kuat.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang ada *Base Transceiver Station* (BTS), tetapi ada sinyal telepon seluler/*handphone* yang kuat.

▪ **Indikator 25 (I25): Ketersediaan Fasilitas Internet dan Pengiriman Pos Atau Barang**

Tabel 1.25. Ketersediaan Fasilitas Internet dan Pengiriman Pos Atau Barang

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	53.542	72,3%
1	13.773	18,6%
2	4.905	6,6%
3	1.467	2,0%
4	362	0,5%
5	44	0,1%
	74.093	100,0%

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak ada kelima jenis fasilitas yaitu: internet di kantor kepala desa, warnet, kantor pos/pos

pembantu/rumah pos, pos keliling, serta jasa ekspedisi.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang ada satu jenis dari kelima fasilitas yaitu: internet di kantor kepala desa, warnet, kantor pos/pos pembantu/rumah pos, pos keliling, serta jasa ekspedisi.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang ada dua jenis diantara kelima fasilitas yaitu: internet di kantor kepala desa, warnet, kantor pos/pos pembantu/rumah pos, pos keliling, serta jasa ekspedisi.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang ada tiga jenis diantara kelima fasilitas yaitu: internet di kantor kepala desa, warnet, kantor pos/pos pembantu/rumah pos, pos keliling, serta jasa ekspedisi.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang ada empat jenis diantara kelima fasilitas yaitu: internet di kantor kepala desa, warnet, kantor pos/pos pembantu/rumah pos, pos keliling, serta jasa ekspedisi.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang ada kelima jenis fasilitas yaitu: internet di kantor kepala desa, warnet, kantor pos/pos pembantu/rumah pos, pos keliling, serta jasa ekspedisi.

## 7. Variabel: Sarana Transportasi

### ▪ Indikator 26 (I26): Lalu Lintas Dan Kualitas Jalan

Tabel 1.26. Lalu Lintas Dan Kualitas Jalan

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
1	1.753	2,4%
2	1.436	1,9%
3	9.038	12,2%
4	15.991	21,6%
5	45.875	61,9%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang lalu lintas dari dan ke desa hanya melalui air.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, serta jenis permukaan jalan terluasnya selain aspal/beton, diperkeras, maupun tanah.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, serta jenis permukaan jalan terluasnya adalah tanah.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, serta jenis permukaan jalan terluasnya adalah diperkeras (batu, kerikil, dan lain-lain).

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang lalu lintas dari dan ke desa/kelurahan melalui darat, serta jenis permukaan jalan terluasnya adalah aspal/beton.

### ▪ Indikator 27 (I27): Aksesibilitas Jalan

Tabel 1.27. Aksesibilitas Jalan

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
1	1.753	2,4%
2	5.346	7,2%
3	2.750	3,7%
4	4.918	6,6%
5	59.326	80,1%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang lalu lintas dari dan ke desa hanya melalui air.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, atau darat dan air, tetapi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, atau darat dan air, serta jalannya dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, atau darat dan air, serta jalannya dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dan lain-lain).

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang lalu lintas dari d20an ke desa melalui darat, atau darat dan air, dan jalannya dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.

▪ **Indikator 28 (I28): Ketersediaan Angkutan Umum**

Tabel 1.28. Ketersediaan Angkutan Umum

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	1.753	2,4%
1	23.549	31,8%
2	6.788	9,2%
3	13.014	17,6%
4	1.770	2,4%
5	27.219	36,7%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang lalu lintas dari dan ke desa hanya melalui air.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang jalannya tidak dilintasi oleh angkutan umum.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang jalannya dilintasi oleh angkutan umum tanpa trayek tetap yang operasional angkutannya tidak setiap hari.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang jalannya dilintasi oleh angkutan umum tanpa trayek tetap yang operasional angkutannya setiap hari.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang jalannya dilintasi oleh angkutan umum dengan trayek tetap yang operasional angkutannya tidak setiap hari.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang jalannya dilintasi oleh angkutan umum dengan trayek tetap yang operasional angkutannya setiap hari.

▪ **Indikator 29 (I29): Operasional Angkutan Umum**

Tabel 1.29. Operasional Angkutan Umum

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	1.753	2,4%
1	23.871	32,2%
2	15.242	20,6%
3	4.270	5,8%
4	21.052	28,4%
5	7.905	10,7%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang lalu lintas dari dan ke desa hanya melalui air.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang jalannya tidak dilewati oleh angkutan umum.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang jalannya dilewati oleh angkutan umum dengan trayek yang tidak tetap yang jam operasionalnya hanya siang hari.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang jalannya dilewati oleh angkutan umum dengan trayek yang tidak tetap yang jam operasionalnya siang dan malam hari.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang jalannya dilewati oleh angkutan umum dengan trayek tetap yang jam operasionalnya hanya siang hari.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang jalannya dilewati oleh angkutan umum dengan trayek tetap yang jam operasionalnya siang dan malam hari.

**8. Variabel: Aksesibilitas Transportasi**

▪ **Indikator 30 (I30): Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Camat**

Tabel 1.30. Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Camat

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	12.130	16,4%
1	211	0,3%
2	7.492	10,1%
3	9.731	13,1%
4	17.822	24,1%
5	26.707	36,0%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang waktu tempuh per kilometer ke kantor camatnya lebih besar atau sama dengan 0,76948044373697 jam/km (46 menit/km).

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang waktu tempuh per kilometer ke kantor camatnya lebih dari atau sama dengan 0,61558435498957 jam/km (36 menit/km) dan kurang dari 0,76948044373697 jam/km (46 menit/km).

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang waktu tempuh per kilometer ke kantor camatnya lebih dari atau sama dengan 0,46168826624218 jam/km (27 menit/km) dan kurang dari 0,61558435498957 jam/km (36 menit/km).

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang waktu tempuh per kilometer ke kantor camatnya lebih dari atau sama dengan 0,30779217749479 jam/km (18 menit/km) dan kurang dari 0,46168826624218 jam/km (27 menit/km).

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang waktu tempuh per kilometer ke kantor camatnya lebih dari atau sama dengan 0,15389608874739

jam/km (9 menit/km) dan kurang dari 0,30779217749479 jam/km (18 menit/km).

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang waktu tempuh per kilometer ke kantor camatnya kurang dari 0,15389608874739 jam/km (9 menit/km).

▪ **Indikator 31 (I31): Biaya Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Camat**

Tabel 1.31. Biaya Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Camat

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	3.468	4,7%
1	309	0,4%
2	906	1,2%
3	1.989	2,7%
4	3.811	5,1%
5	63.610	85,9%
	74.093	100,0%

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang biaya per kilometer ke kantor camatnya lebih dari atau sama dengan Rp. 35.000,00.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang biaya per kilometer ke kantor camatnya lebih dari atau sama dengan Rp. 28.000,00 dan kurang dari Rp. 35.000,00.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang biaya per kilometer ke kantor camatnya lebih dari atau sama dengan Rp. 21.000,00 dan kurang dari Rp. 28.000,00.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang biaya per kilometer ke kantor camatnya lebih dari atau sama dengan Rp. 14.000,00 dan kurang dari Rp. 21.000,00.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang biaya per kilometer ke kantor camatnya lebih dari atau sama dengan Rp. 7.000,00 dan kurang dari Rp. 14.000,00.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang biaya per kilometer ke kantor camatnya kurang dari Rp. 7.000,00.

▪ **Indikator 32 (I32): Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Bupati/Walikota**

Tabel 1.32. Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Bupati/Walikota

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	5.895	8,0%
1	1.469	2,0%
2	3.729	5,0%
3	9.102	12,3%
4	28.574	38,6%
5	25.324	34,2%
	74.093	100,0%

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang waktu tempuh per kilometer ke kantor bupati/walikotanya lebih dari atau sama dengan 0,19149877356422 (11 menit/km).

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang waktu tempuh per kilometer ke kantor bupati/walikotanya lebih dari atau sama dengan 0,15319901885137 (9 menit/km) dan kurang dari 0,19149877356422 (11 menit/km).

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang waktu tempuh per kilometer ke kantor bupati/walikotanya lebih dari atau sama dengan 0,11489926413853 (7 menit/km) dan kurang dari 0,15319901885137 (9 menit/km).

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang waktu tempuh per kilometer ke kantor bupati/walikotanya lebih dari atau sama dengan 0,07659950942569 (5 menit/km) dan kurang dari 0,11489926413853 (7 menit/km).

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang waktu tempuh per kilometer ke kantor bupati/walikotanya lebih dari atau sama dengan 0,03829975471284 (2 menit/km) dan kurang dari 0,07659950942569 (5 menit/km).

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang waktu tempuh per kilometer ke kantor bupati/walikotanya kurang dari 0,03829975471284 (2 menit/km).

▪ **Indikator 33 (I33): Biaya Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Bupati/Walikota**

Tabel 1.33. Biaya Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Bupati/Walikota

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	2.673	3,6%
1	286	0,4%
2	646	0,9%
3	1.763	2,4%
4	4.132	5,6%
5	64.593	87,2%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang biaya per kilometer ke kantor bupati/walikotanya lebih dari atau sama dengan Rp. 16.000,00.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang biaya per kilometer ke kantor bupati/walikotanya lebih dari atau sama dengan Rp. 13.000,00 dan kurang dari Rp. 16.000,00.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang biaya per kilometer ke kantor bupati/walikotanya lebih dari atau sama dengan Rp. 10.000,00 dan kurang dari Rp. 13.000,00.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang biaya per kilometer ke kantor bupati/walikotanya lebih dari atau sama dengan Rp. 6.000,00 dan kurang dari Rp. 10.000,00.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang biaya per kilometer ke kantor bupati/walikotanya lebih dari atau sama dengan Rp. 3.000,00 dan kurang dari Rp. 6.000,00.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang biaya per kilometer ke kantor bupati/walikotanya kurang dari Rp. 3.000,00.

**9. Variabel: Kesehatan Masyarakat**

▪ **Indikator 34 (I34): Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)**

Tabel 1.34. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	359	0,5
1	222	0,3
2	528	0,7
3	5.615	7,6
5	67.369	90,9
	<b>74.093</b>	<b>100,0</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa ada kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit. Rasio penderita yang meninggal terhadap penderita lebih dari atau sama dengan 0,31400410439919 (32 orang meninggal per 100 penderita).

**Kode 1 (satu)** merupakan desa ada kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit. Rasio penderita yang meninggal terhadap penderita lebih dari atau sama dengan 0,15700205219959 (16 orang meninggal per 100 penderita) dan kurang dari 0,31400410439919 (32 orang meninggal per 100 penderita).

**Kode 2 (dua)** merupakan desa ada kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit. Rasio penderita yang meninggal terhadap penderita kurang dari 0,15700205219959 (16 orang meninggal per 100 penderita).

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang ada kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit, tetapi tidak ada penderita yang meninggal

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang tidak ada kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit.

▪ **Indikator 35 (I35): Penanganan Gizi Buruk**

Tabel 1.35. Penanganan Gizi Buruk

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	1.776	2,4
1	857	1,2
2	2.268	3,1
3	9.733	13,1
5	59.459	80,2
	<b>74.093</b>	<b>100,0</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa terdapat penderita gizi buruk dengan rasio penderita gizi buruk terhadap penduduk desa lebih dari 0,00510244452603 (5 penderita per 1000 penduduk).

**Kode 1 (satu)** merupakan desa terdapat penderita gizi buruk dengan rasio penderita gizi buruk terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00340162968402 (3 penderita per 1000 penduduk) dan kurang dari 0,00510244452603 (5 penderita per 1000 penduduk).



**Kode 2 (dua)** merupakan desa terdapat penderita gizi buruk dengan rasio penderita gizi buruk terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00170081484201 (2 penderita per 1000 penduduk) dan kurang dari 0,00340162968402 (3 penderita per 1000 penduduk).

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa terdapat penderita gizi buruk dengan rasio penderita gizi buruk terhadap penduduk desa kurang dari 0,00170081484201 (2 penderita per 1000 penduduk).

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang tidak terdapat penderita gizi buruk.

#### 10. Variabel: Olahraga

##### ▪ Indikator 36 (I36): Ketersediaan Fasilitas Olah Raga

Tabel 1.36. Ketersediaan Fasilitas Olah Raga

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	12.646	17,1%
1	30.134	40,7%
2	22.759	30,7%
3	7.300	9,9%
4	1.119	1,5%
5	135	0,2%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

##### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak tersedia fasilitas/lapangan olah raga apapun (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard).

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang tersedia 1 atau 2 jenis fasilitas/lapangan olah raga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard).

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tersedia 3 atau 4 jenis fasilitas/lapangan olah raga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard).

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang tersedia 5 atau 6 jenis fasilitas/lapangan olah raga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard).

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang tersedia 7 atau 8 jenis fasilitas/lapangan olah raga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket,

tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard).

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang tersedia 9 atau 10 jenis fasilitas/lapangan olah raga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard).

##### ▪ Indikator 37 (I37): Keberadaan Kelompok Kegiatan Olah Raga

Tabel 1.37. Keberadaan Kelompok Kegiatan Olah Raga

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	18.790	25,4%
1	27.670	37,3%
2	19.250	26,0%
3	6.960	9,4%
4	1.197	1,6%
5	226	0,3%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

##### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak ada kelompok kegiatan olah raga apapun (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard).

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang ada 1 atau 2 jenis kelompok kegiatan olah raga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard).

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang ada 3 atau 4 jenis kelompok kegiatan olah raga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard).

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang ada 5 atau 6 jenis kelompok kegiatan olah raga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard).

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang ada 7 atau 8 jenis kelompok kegiatan olah raga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard).

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang ada 9 atau 10 jenis kelompok kegiatan olah raga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard).



## 11. Variabel: Kemandirian

### Indikator 38 (I38): Kelengkapan Pemerintahan Desa

Tabel 1.38. Kelengkapan Pemerintahan Desa

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	796	1,1%
1	12.356	16,7%
2	100	0,1%
3	622	0,8%
4	1.466	2,0%
5	58.753	79,3%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak ada BPD dan tidak ada kantor kepala desa. Tanpa mempertimbangkan ketersediaan batas wilayah desa dalam bentuk peta yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang ada BPD tetapi tidak ada kantor kepala desa. Tanpa mempertimbangkan ketersediaan batas wilayah desa dalam bentuk peta yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang tidak ada BPD tetapi ada kantor kepala desa di luar wilayah desa. Tanpa mempertimbangkan ketersediaan batas wilayah desa dalam bentuk peta yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang ada BPD dan ada kantor kepala desa di luar wilayah desa. Tanpa mempertimbangkan ketersediaan batas wilayah desa dalam bentuk peta yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang tidak ada BPD tetapi ada kantor kepala desa di dalam wilayah desa. Tanpa mempertimbangkan ketersediaan batas wilayah desa dalam bentuk peta yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang ada BPD dan ada kantor kepala desa di dalam wilayah desa. Tanpa mempertimbangkan ketersediaan batas wilayah desa dalam bentuk peta yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

### Indikator 39 (I39): Otonomi Desa

Tabel 1.39. Otonomi Desa

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	30.235	40,8%
1	19.604	26,5%
2	6.695	9,0%
3	4.176	5,6%
4	3.023	4,1%
5	10.360	14,0%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak mempunyai sumber penerimaan desa (Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil/bantuan/hibah)

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang mempunyai rasio Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap total penerimaan desa kurang dari 0,06812184397134 (7 persen).

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang mempunyai rasio Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap total penerimaan desa lebih dari atau sama dengan 0,06812184397134 (7 persen) dan kurang dari 0,13624368794269 (14 persen).

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang mempunyai rasio Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap total penerimaan desa lebih dari atau sama dengan 0,13624368794269 (14 persen) dan kurang dari 0,20436553191403 (20 persen).

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang mempunyai rasio Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap total penerimaan desa lebih dari atau sama dengan 0,20436553191403 (20 persen) dan kurang dari 0,27248737588537 (27 persen).

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang mempunyai rasio Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap total penerimaan desa lebih dari atau sama dengan 0,27248737588537 (27 persen).

#### Indikator 40 (I40): Aset/Kekayaan Desa

Tabel 1.40. Aset/Kekayaan Desa

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	2.427	3,3%
1	11.641	15,7%
2	17.060	23,0%
3	22.881	30,9%
4	16.098	21,7%
5	3.986	5,4%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang sama sekali tidak mempunyai kelima jenis aset/pendapatan desa yaitu: Pendapatan Asli Desa (PAD), tanah kas desa/ulayat, bangunan desa (kantor kepala desa, balai desa, dan lain-lain), pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dan lain-lain), maupun aset desa lainnya.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang mempunyai 1 (satu) dari kelima jenis aset/pendapatan desa yaitu: Pendapatan Asli Desa (PAD), tanah kas desa/ulayat, bangunan desa (kantor kepala desa, balai desa, dan lain-lain), pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dan lain-lain), maupun aset desa lainnya.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang mempunyai 2 (dua) dari kelima jenis aset/pendapatan desa yaitu: Pendapatan Asli Desa (PAD), tanah kas desa/ulayat, bangunan desa (kantor kepala desa, balai desa, dan lain-lain), pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dan lain-lain), maupun aset desa lainnya.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang mempunyai 3 (tiga) dari kelima jenis aset/pendapatan desa yaitu: Pendapatan Asli Desa (PAD), tanah kas desa/ulayat, bangunan desa (kantor kepala desa, balai desa, dan lain-lain), pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dan lain-lain), maupun aset desa lainnya.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang mempunyai 4 (empat) dari kelima jenis aset/pendapatan desa yaitu: Pendapatan Asli Desa (PAD), tanah kas desa/ulayat, bangunan desa (kantor kepala desa, balai desa, dan lain-lain), pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan,

pelelangan hasil pertanian, dan lain-lain), maupun aset desa lainnya.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang mempunyai 5 (lima) jenis aset/pendapatan desa yaitu: Pendapatan Asli Desa (PAD), tanah kas desa/ulayat, bangunan desa (kantor kepala desa, balai desa, dan lain-lain), pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dan lain-lain), maupun aset desa lainnya.

#### 12. Variabel: Kualitas Sumber Daya Manusia

##### Indikator 41 (I41): Kualitas SDM Kepala Desa

Tabel 1.41. Kualitas SDM Kepala Desa

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	3.184	4,3%
1	1.729	2,3%
2	2.056	2,8%
3	11.911	16,1%
4	43.343	58,5%
5	11.870	16,0%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

#### Keterangan:

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak mempunyai kepala desa.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang mempunyai kepala desa dengan pendidikan tertinggi tidak tamat SD sederajat atau tidak pernah sekolah.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang mempunyai kepala desa dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah SD sederajat.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang mempunyai kepala desa dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah SMP sederajat.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang mempunyai kepala desa dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah SMU sederajat.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang mempunyai kepala desa dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah akademi/DIII hingga S3.

▪ **Indikator 42 (I42): Kualitas SDM Sekretaris Desa**

Tabel 1.42. Kualitas SDM Sekretaris Desa

Skor Indikator	Banyaknya Desa	Persentase Desa
0	10.184	13,7%
1	851	1,1%
2	7.788	10,5%
3	42.435	57,3%
4	1.990	2,7%
5	10.845	14,6%
	<b>74.093</b>	<b>100,0%</b>

**Keterangan:**

**Kode 0 (nol)** merupakan desa yang tidak mempunyai sekretaris desa.

**Kode 1 (satu)** merupakan desa yang mempunyai sekretaris desa dengan pendidikan tertinggi tidak tamat SD sederajat atau tidak pernah sekolah.

**Kode 2 (dua)** merupakan desa yang mempunyai sekretaris desa dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah SD sederajat atau SMP sederajat.

**Kode 3 (tiga)** merupakan desa yang mempunyai sekretaris desa dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah SMA sederajat.

**Kode 4 (empat)** merupakan desa yang mempunyai sekretaris desa dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah Akademi/DIII.

**Kode 5 (lima)** merupakan desa yang mempunyai sekretaris desa dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah Diploma IV/S1 hingga S3.

#### 1.4.4 Penentuan Bobot Dimensi, Variabel, dan Indikator

IPD merupakan indeks komposit tertimbang dari 42 indikator yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat pembangunan di desa. Setiap indikator harus memiliki kontribusi terhadap IPD. Besarnya kontribusi setiap indikator menggambarkan besarnya pengaruh indikator tersebut terhadap dimensi dan IPD. Besarnya kontribusi setiap indikator tidak ditetapkan dengan nilai yang sama atau berdasarkan penilaian subyektif, tetapi dihitung berdasarkan sebaran data menggunakan teknik statistik. Kontribusi setiap indikator merupakan statistik

yang besarnya cenderung tidak sama antar indikator.

Sebelum dilakukan pengolahan data dengan metode *Principal Component Analysis* (PCA), dimana dihasilkan model yang optimum sebanyak 42 indikator (12 variabel, dan 5 dimensi), kandidat indikator pada awalnya adalah sebanyak 60 buah. Dalam proses menghasilkan model PCA yang optimum dilakukan sebanyak 15 tahap proses kalkulasi statistik secara berurutan.

Dari 5 dimensi (Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Aksesibilitas/Transportasi, Pelayanan Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan), 3 diantaranya merupakan komponen penyusun Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yaitu Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Aksesibilitas/Transportasi. Hasil pengujian antara IPD dan IKG menunjukkan korelasi yang sangat kuat (lebih dari 0,9). IKG sendiri adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kesulitan akses terkait kondisi geografis dan ketersediaan sarana prasarana di desa<sup>1</sup>.

Metode PCA digunakan dengan pertimbangan bahwa metode statistik tersebut dapat digunakan untuk mereduksi jumlah indikator dan mendeteksi struktur semua faktor (konsep) yang terbentuk dalam model. Setiap faktor menggambarkan dimensi-dimensi penyusun IPD. Penimbang setiap indikator penyusun IPD dihitung berdasarkan *loading factor* yang dihasilkan dari model PCA yang paling optimum. Pertimbangan pemilihan metode PCA ini dalam menyusun IPD yaitu: (1) Data yang digunakan dalam penyusunan indeks adalah data sekunder (Potensi Desa 2014), yang sifatnya generik dan dibuat tidak dalam kerangka penyusunan IPD, sehingga justifikasi yang sifatnya subjektif mengenai urgensi satu variabel terhadap variabel lainnya bisa dikurangi; (2) Penggunaan PCA ini juga dimaksudkan agar diperoleh suatu angka sederhana untuk keperluan analisis pembangunan desa lanjutan, dengan menjaga

<sup>1</sup> Indeks ini digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN (distribusi dana desa dari kabupaten ke desa-desa di seluruh Indonesia).

tingkat keragaman dalam komponen penyusunnya, sehingga bias indeks yang dibentuk bisa dikurangi.

Untuk mendapatkan kontribusi setiap indikator, digunakan metode Analisis Komponen Utama (*Principal Component Analysis*). Tahapan pengukuran kontribusi bagi setiap indikator adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap 1, Identifikasi Faktor.

Untuk menghasilkan susunan faktor (model) yang merepresentasikan IPD yang valid secara statistik maka dilakukan beberapa tahapan penghitungan faktor secara berulang (iteratif) dan berurutan (sekuensial). Kriteria yang diperhatikan untuk menilai bahwa susunan faktor yang dihasilkan merupakan susunan yang paling optimal adalah:

- nilai *eigen value* lebih dari 1 (satu),
- nilai persentase kumulatif varian (*cumulative % of variance*) minimal 60 persen,
- nilai *loading factors* pada setiap indikator lebih besar dari 0,4.

Jika pada suatu tahapan penghitungan faktor ternyata 3 (tiga) kriteria di atas tidak dipenuhi semuanya, maka tahapan pengolahan secara iteratif dan sekuensial selanjutnya harus dilaksanakan. Indikator yang nilai *eigen value* lebih dari 1 atau nilai *loading factors* kurang dari 0,4 harus dikeluarkan dari dataset dan dilanjutkan dengan eksekusi program terhadap indikator-indikator tersisa di *dataset* tersebut. Tahapan ini dilakukan secara iteratif dan sekuensial sampai dihasilkan susunan faktor yang paling optimal dan memenuhi ketiga kriteria di atas.

### 2. Tahap 2, Pengukuran Kontribusi Indikator.

Bobot setiap indikator pada suatu faktor dihitung berdasarkan hasil susunan faktor

optimal pembentuk IPD di atas. Bobot setiap indikator dihitung berdasarkan nilai *loading factors's* yang dimiliki oleh indikator tersebut serta nilai *rotation sums of squared loading (% of variance)* melalui 2 tahap:

- Penghitungan bobot tiap indikator dalam faktor dengan formula:

$$B = \frac{LF}{RLF} \times RSSL$$

Keterangan:

$B$  = nilai bobot,

$LF$  = nilai *loading factor*,

$RLF$  = rata-rata *loading factor* dalam satu faktor,

$RSSL$  = nilai *rotation sums of squared loading (% of variance)*.

- Penghitungan kontribusi tiap indikator dengan formula:

$$b = \frac{B}{JB}$$

Keterangan:

$b$  = nilai kontribusi,

$B$  = nilai bobot,

$JB$  = jumlah semua bobot.

Selanjutnya nilai kontribusi setiap indikator digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing indikator untuk menghasilkan IPD. Besarnya penimbang setiap indikator yang digunakan untuk menyusun IPD ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.43. Besarnya kontribusi setiap indikator penyusun IPD

Dimensi	Variabel	Indikator	
		Deskripsi Indikator	Penimbang
Pelayanan Dasar (0,326)	Pelayanan Pendidikan (0,098)	Ketersediaan dan Akses Ke TK/RA/BA	0.0227852
		Ketersediaan dan Akses Ke SD Sederajat	0.0115521
		Ketersediaan dan Akses Ke SMP Sederajat	0.0320783
		Ketersediaan dan Akses Ke SMA Sederajat	0.0317407
	Pelayanan Kesehatan (0,228)	Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Rumah Sakit	0.0271630
		Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Rumah Sakit Bersalin	0.0258106
		Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Puskesmas	0.0310473
		Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Poliklinik/Balai Pengobatan	0.0308963
		Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Tempat Praktek Dokter	0.0325841
		Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Tempat Praktek Bidan	0.0299338
		Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Poskesdes Atau Polindes	0.0252111
		Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Apotek	0.0253566
Kondisi Infrastruktur (0,252)	Infrastruktur Ekonomi (0,094)	Ketersediaan Pertokoan, Minimarket Atau Toko Kelontong	0.0196165
		Ketersediaan Pasar	0.0179773
		Ketersediaan Restoran, Rumah Makan Atau Warung/Kedai Makan	0.0152138
		Ketersediaan Akomodasi Hotel Atau Penginapan	0.0186228
		Ketersediaan Bank	0.0229853
	Infrastruktur Energi (0,051)	Elektrifikasi	0.0140417
		Kondisi Penerangan di Jalan Utama	0.0188277
		Bahan Bakar Untuk Memasak	0.0177782
	Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi (0,074)	Sumber Air Untuk Minum	0.0299481
		Sumber Air Untuk Mandi/Cuci	0.0301380
		Fasilitas Buang Air Besar	0.0137127
	Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (0,033)	Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler	0.0160403
		Ketersediaan Fasilitas Internet dan Pengiriman Pos Atau Barang	0.0172964
Aksesibilitas/Transportasi (0,204)	Sarana Transportasi (0,117)	Lalu Lintas Dan Kualitas Jalan	0.0174274
		Aksesibilitas Jalan	0.0149853
		Ketersediaan Angkutan Umum	0.0426582
		Operasional Angkutan Umum	0.0422595
	Aksesibilitas Transportasi (0,086)	Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Camat	0.0177129
		Biaya Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Camat	0.0280166
		Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Bupati/Walikota	0.0142172
		Biaya Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Bupati/Walikota	0.0264609
Pelayanan Umum (0,109)	Kesehatan Masyarakat (0,040)	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)	0.0195116
		Penanganan Gizi Buruk	0.0209339
	Olah Raga (0,069)	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	0.0334978
		Keberadaan Kelompok Kegiatan Olah Raga	0.0351981
Penyelenggaraan Pemerintahan (0,109)	Kemandirian (0,062)	Kelengkapan Pemerintahan Desa	0.0260184
		Otonomi Desa	0.0163094
		Aset/Kekayaan Desa	0.0198562
	Kualitas Sumber Daya Manusia (0,047)	Kualitas SDM Kepala Desa	0.0186415
		Kualitas SDM Sekretaris Desa	0.0279371

### 1.4.5 Penghitungan Indeks Pembangunan Desa

Nilai IPD diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap Indikator penyusun IPD. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan dengan penimbang masing-masing indikator. Penghitungan IPD setiap desa diformulasikan sebagai berikut:

$$IPD (b_1*V_1 + b_2*V_2 + b_3*V_3 + \dots + b_{42}*V_{42}) * 20$$

Keterangan:

IPD = Nilai IPD setiap desa (bernilai 0 - 100)

$V_1$  = Skor indikator ke - 1

$V_2$  = Skor indikator ke - 2

$V_3$  = Skor indikator ke - 3

.

.

.

$V_{42}$  = Skor indikator ke - 42

$b_1$  = Penimbang/pembobot indikator ke - 1

$b_2$  = Penimbang/pembobot indikator ke - 2

$b_3$  = Penimbang/pembobot indikator ke - 3

.

.

.

$b_{42}$  = Penimbang/pembobot indikator ke - 42

Gambar 1.1. Formula Penghitungan IPD

### 1.4.6 Klasifikasi Desa menurut Tingkat Kemajuannya

IPD disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan pembangunan di suatu desa. Nilai indeks mempunyai rentang 0 s/d 100. Untuk memudahkan interpretasi, maka dilakukan pengelompokan desa menjadi 3 kategori yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis, desa mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75.

Desa Berkembang yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi,

pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai. Secara teknis, desa berkembang merupakan desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 50 namun kurang dari atau sama dengan 75.

Desa Tertinggal yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Secara teknis, desa tertinggal merupakan desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.





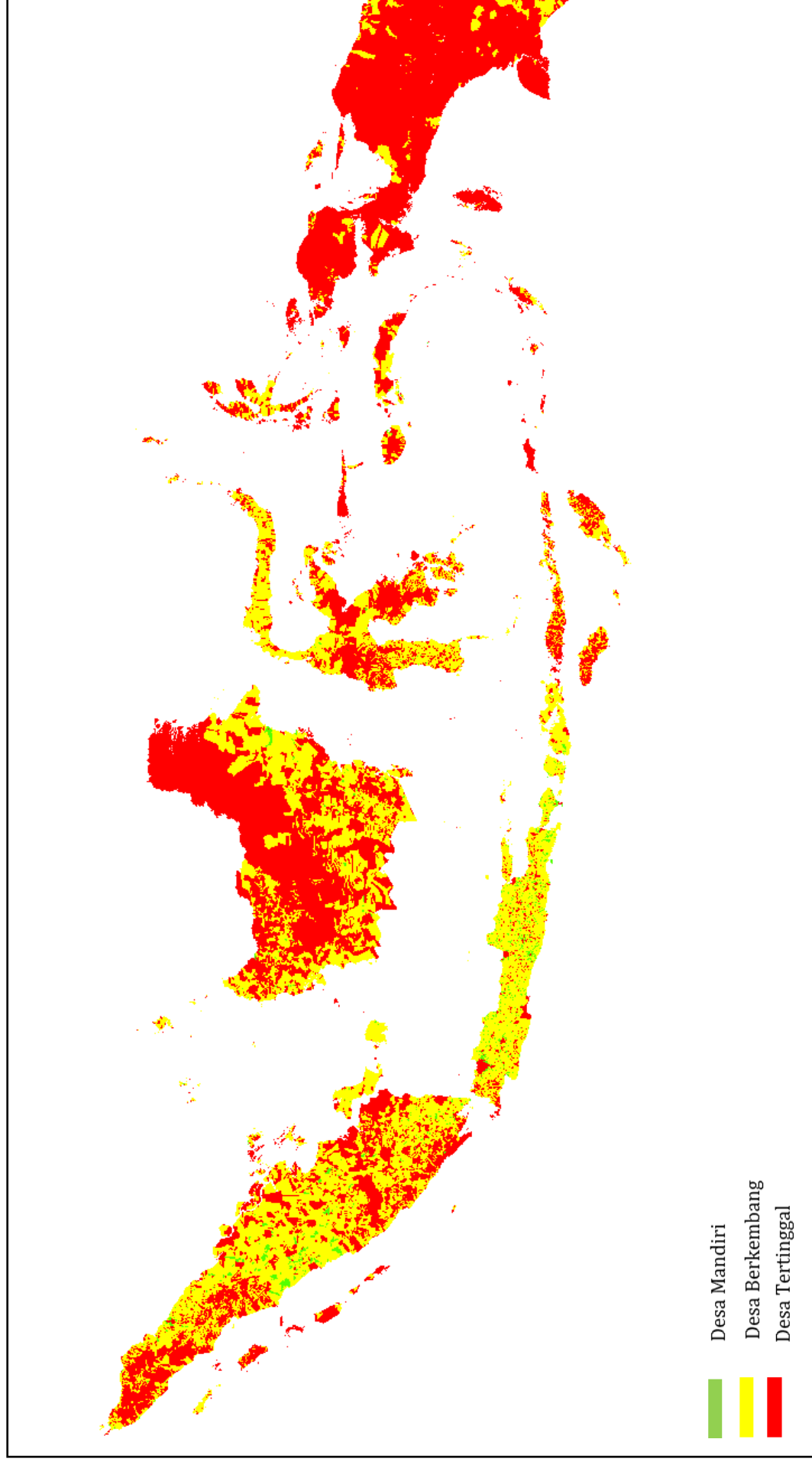




## **BAB II**

# **Indeks Pembangunan Desa 2014**

# PETA PERKEMBANGAN DESA NASIONAL 2014

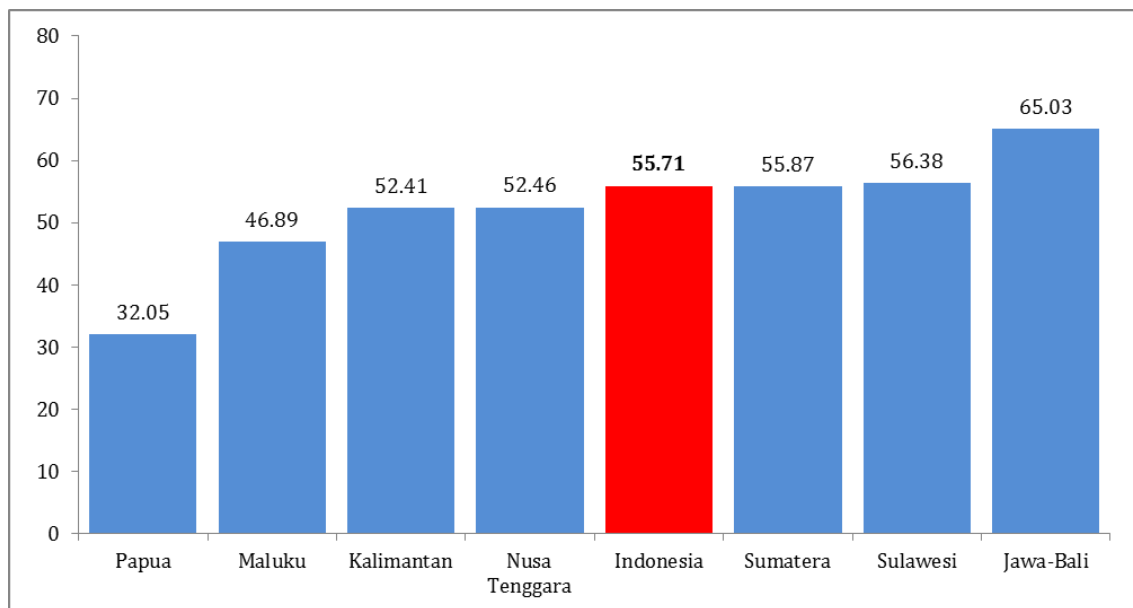


## BAB II

# Indeks Pembangunan Desa 2014

### 2.1 Kondisi Perkembangan Desa di Indonesia

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode yang telah dijelaskan dalam Subbab 1.4, maka diperoleh Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014 sebagai berikut:



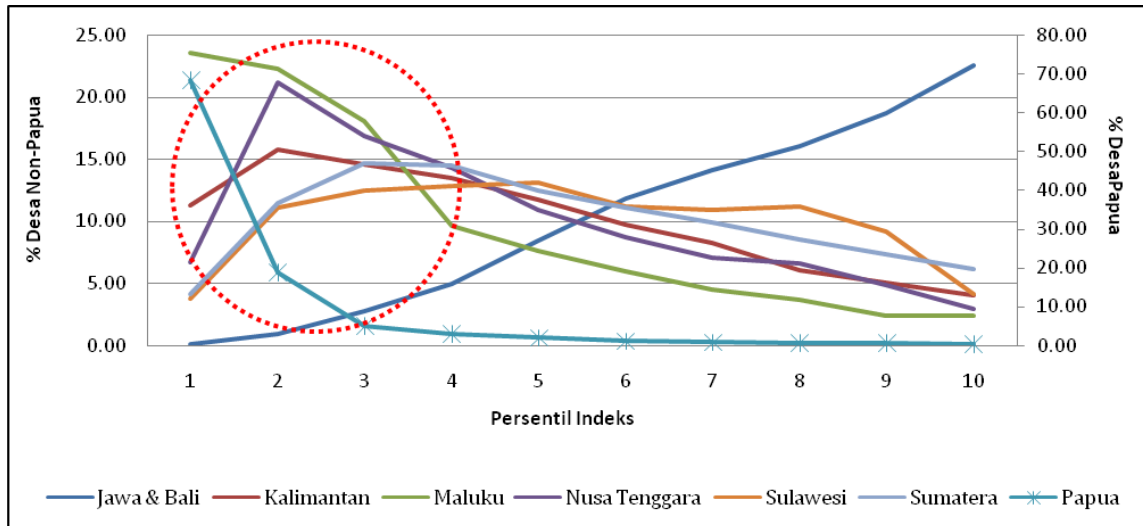
Gambar 2.1. Indeks Pembangunan Desa 2014 Menurut Pulau

Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan jika terdapat tiga pulau yang memiliki nilai indeks diatas rata-rata indeks pembangunan desa nasional (55,71). Ketiga pulau tersebut adalah Pulau Jawa-Bali, Sulawesi, dan Sumatera. Sementara empat pulau lain di Indonesia masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

Indeks Pembangunan Desa paling besar terdapat di Pulau Jawa-Bali (65,03). Sementara indeks paling rendah terdapat di Pulau Papua (32,05). Dilihat dari tingkat perkembangannya, desa-desa di Indonesia pada umumnya dalam

kategori desa berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian pulau yang rata-rata indeksnya masih dalam kategori desa berkembang. Pulau-pulau tersebut antara lain: Pulau Jawa-Bali, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Sementara dua pulau lainnya (Pulau Maluku dan Papua), rata-rata perkembangan desanya masih dalam kategori desa tertinggal.

**Secara nasional, tahap perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 55,71.**



Gambar 2.2. Sebaran Persentil Indeks Pembangunan Desa 2014 Menurut Pulau

Tingkat pembangunan desa yang tergolong tertinggal terdapat di Pulau Papua (dengan nilai indeks 32,05) dan Pulau Maluku (46,89). Sebaran desa tertinggal di Indonesia paling banyak terdapat di Pulau Papua dengan jumlah 6.139 desa (8,29%). Sementara sebaran desa berkembang dan mandiri paling banyak terdapat di Pulau Jawa-Bali dengan 20.827 desa berkembang (28,11%) dan 2.253 desa mandiri (3,04).

Sebaran desa tertinggal terbanyak di Pulau Papua (6.139 desa). Sementara desa berkembang dan mandiri paling banyak di Pulau Jawa-Bali dengan 20.827 desa berkembang dan 2.253 desa mandiri.

Tabel 2.1. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Menurut Sebaran Pulau

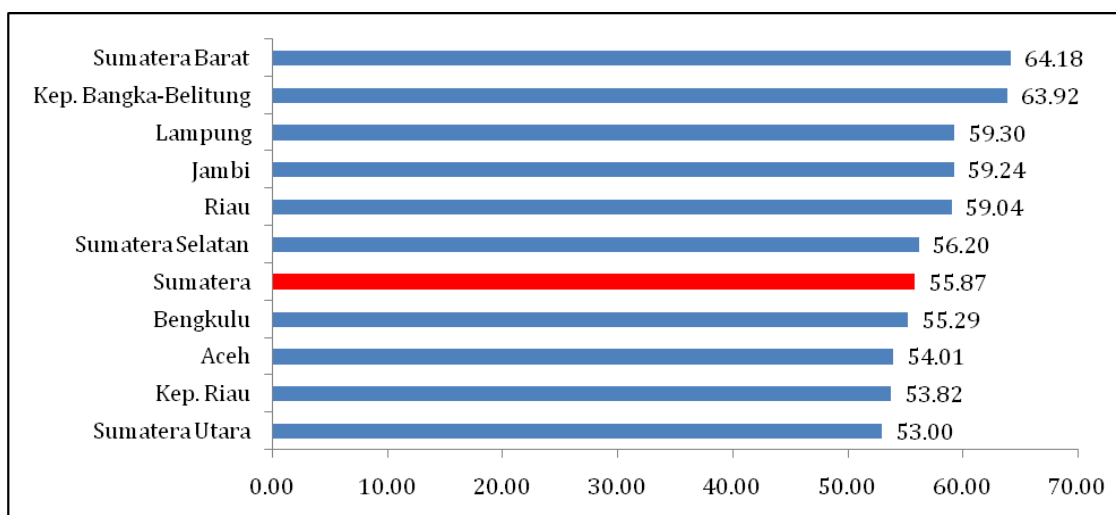
Nama Wilayah Pulau	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Desa Menurut Tipologi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Sumatera	55,87	57,70	41,03	73,77	52,00	55,11	8,07	22,24	0,61	22.910
Jawa-Bali	65,03	68,24	50,79	78,10	55,52	73,49	0,94	28,11	3,04	23.117
Nusa Tenggara	52,46	51,95	31,01	79,44	41,55	64,11	2,14	3,13	0,06	3.945
Kalimantan	52,41	53,44	34,56	68,95	53,16	58,95	3,31	5,34	0,10	6.486
Sulawesi	56,38	55,27	38,24	79,92	49,01	65,08	2,65	8,05	0,08	8.635
Maluku	46,89	46,99	29,81	67,78	42,39	51,60	1,83	1,18	0,02	2.254
Papua	32,05	27,50	17,68	47,75	40,19	41,44	8,29	0,81	0,01	6.746
<b>Indonesia</b>	<b>55,71</b>	<b>56,73</b>	<b>39,21</b>	<b>73,50</b>	<b>51,72</b>	<b>61,59</b>	<b>27,22</b>	<b>68,86</b>	<b>3,92</b>	<b>74.093</b>

## 2.2 Kondisi Perkembangan Desa Indonesia berdasarkan Pulau

### A. Pulau Sumatera

Provinsi Sumatera Barat memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Pulau Sumatera dengan nilai indeks 64,18; diikuti oleh Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung (63,92) serta Provinsi Lampung (59,30).

Sebaliknya nilai Indeks Pembangunan Desa terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai indeks 53,00; diikuti Provinsi Kepulauan Riau (53,82) dan Provinsi Aceh (54,01). Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa Pulau Sumatera berada ada di atas rata-rata nasional 55,71.



Gambar 2.3. Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Sumatera

Saat ini, desa-desa di Pulau Sumatera didominasi oleh desa-desa berkembang. Ada sekitar 71,92% dari total 22.910 unit desa. Sementara prosentase desa mandiri sebanyak 1,97% dan desa tertinggal 26,11%. Dilihat dari

dimensinya, aksesibilitas/transportasi memiliki nilai indeks yang paling besar. Sementara kondisi infrastruktur memiliki nilai indeks paling kecil.

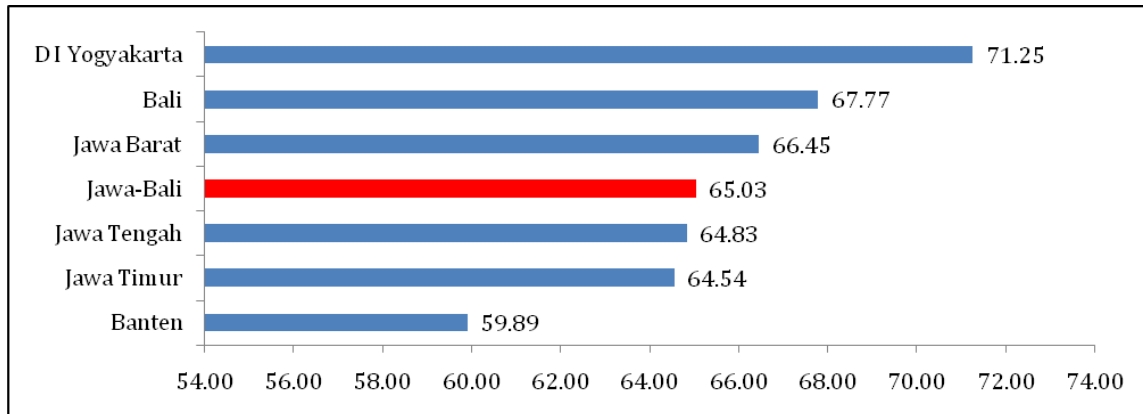
Tabel 2.2. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Sumatera

Nama Provinsi	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Desa Menurut Tipologi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Aceh	54,01	57,12	42,18	70,42	46,73	48,66	30,85	67,82	1,33	6.474
Sumatera Utara	53,00	54,34	38,15	74,58	46,01	49,97	37,15	61,22	1,63	5.389
Sumatera Barat	64,18	69,36	46,51	77,70	58,41	70,11	6,36	83,98	9,66	880
Riau	59,04	61,36	42,53	71,92	61,52	63,78	17,65	79,84	2,51	1.592
Jambi	59,24	61,12	40,39	76,70	60,10	63,67	13,66	84,12	2,22	1.398
Sumatera Selatan	56,20	53,89	40,34	77,54	57,20	58,92	23,29	75,75	0,96	2.817
Bengkulu	55,29	57,87	38,52	74,44	50,80	55,07	25,65	73,97	0,38	1.341
Lampung	59,30	62,22	42,92	73,58	59,14	61,94	14,29	82,55	3,16	2.435
Kepulauan Bangka Belitung	63,92	60,96	50,09	85,06	63,39	65,76	3,88	93,20	2,92	309
Kepulauan Riau	53,82	56,10	40,01	67,01	53,70	54,41	34,55	64,00	1,45	275
<b>Sumatera</b>	<b>55,87</b>	<b>57,70</b>	<b>41,03</b>	<b>73,77</b>	<b>52,00</b>	<b>55,11</b>	<b>26,11</b>	<b>71,92</b>	<b>1,97</b>	<b>22.910</b>

## B. Pulau Jawa-Bali

Provinsi D.I.Yogyakarta memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Pulau Jawa-Bali dengan nilai indeks 71,25 diikuti oleh Provinsi Bali (67,77) dan Provinsi Jawa Barat (66,45). Sebaliknya nilai Indeks Pembangunan Desa terendah terdapat di Provinsi Banten

dengan nilai indeks 59,89; diikuti Provinsi Jawa Timur (64,54) dan Provinsi Jawa Tengah (64,83). Dilihat dari rata-rata nilai indeksnya, kondisi pembangunan desa di Pulau Jawa-Bali lebih tinggi daripada rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa nasional.



Gambar 2.4. Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Jawa-Bali

Jumlah desa tertinggal paling banyak di Pulau Jawa-Bali terdapat di Provinsi Jawa Timur (208 unit desa), dan Provinsi Banten (158 unit desa). Sementara provinsi dengan jumlah prosentase desa mandiri paling banyak

di Pulau Jawa-Bali adalah Provinsi D.I.Yogyakarta. Dilihat dari dimensinya, kondisi infrastruktur merupakan dimensi dengan nilai terkecil dan aksesibilitas/transportasi memiliki nilai indeks paling besar.

Tabel 2.3. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Jawa-Bali

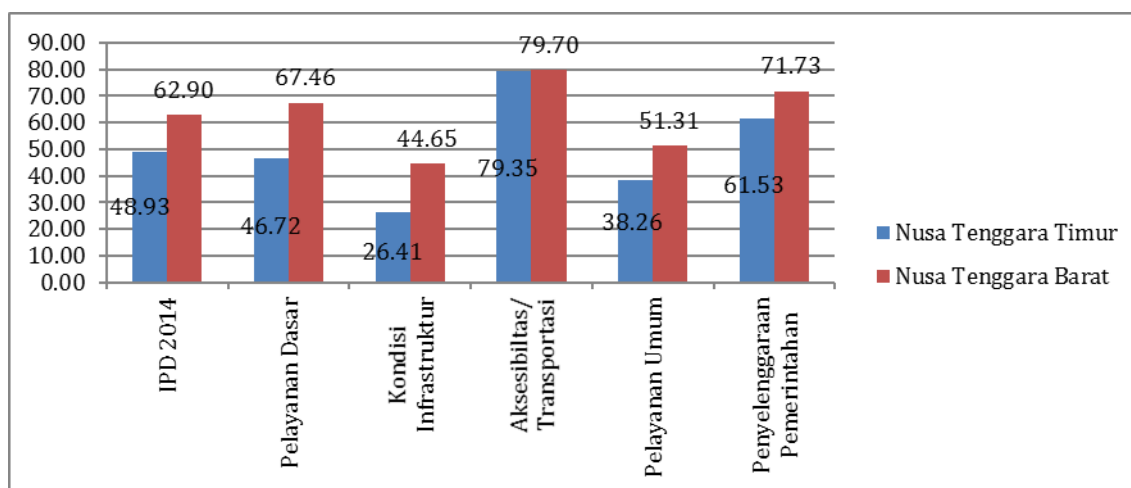
Nama Provinsi	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Desa Menurut Tipologi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Jawa Barat	66,45	68,40	51,87	80,90	59,88	73,92	1,82	86,88	11,30	5.319
Jawa Tengah	64,83	67,86	49,75	78,55	54,95	74,92	1,58	89,91	8,51	7.809
Daerah Istimewa Yogyakarta	71,25	78,63	55,18	78,87	62,76	80,64	0,00	67,86	32,14	392
Jawa Timur	64,54	68,55	51,45	75,92	53,36	72,80	2,68	88,35	8,97	7.723
Banten	59,89	63,01	44,67	75,56	50,97	65,47	12,76	82,47	4,77	1.238
Bali	67,77	71,83	55,78	79,92	56,46	72,02	0,94	83,33	15,73	636
Jawa-Bali	65,03	68,24	50,79	78,10	55,52	73,49	2,56	87,74	9,70	23.117

### C. Pulau Nusa Tenggara

Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa di Pulau Nusa Tenggara adalah 52,46 dengan kategori desa berkembang. Pulau Nusa Tenggara terdiri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai IPD 62,90 dan Provinsi Nusa

Tenggara Timur dengan nilai 48,93. Sebagian besar desa di Pulau Nusa Tenggara merupakan desa berkembang dengan prosentase 58,78%. Sementara prosentase desa tertinggal di Pulau Nusa Tenggara adalah 40,10%.





Gambar 2.5. Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Nusa Tenggara

Dilihat dari dimensinya, dimensi dengan nilai terendah adalah dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai sebesar 31,01. Dimensi lain memiliki nilai berturut-turut sebagai berikut: pelayanan dasar sebesar 51,95; pelayanan umum sebesar 41,55; dan penyelenggaraan pemerintahan 64,11.

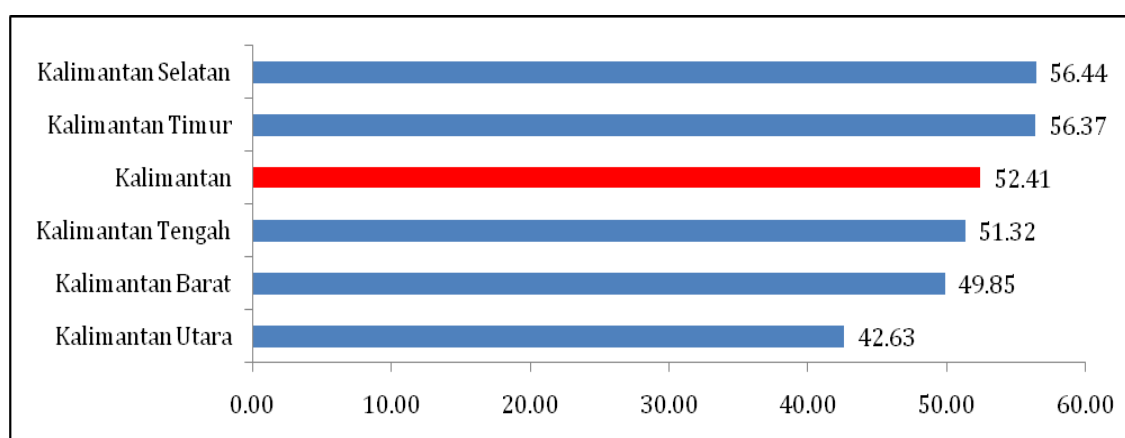
Tabel 2.4. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Nusa Tenggara

Nama Provinsi	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Desa Menurut Tipologi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Nusa Tenggara Barat	62,90	67,46	44,65	79,70	51,31	71,73	3,62	92,16	4,22	995
Nusa Tenggara Timur	48,93	46,72	26,41	79,35	38,26	61,53	52,41	47,52	0,07	2.950
Nusa Tenggara	52,46	51,95	31,01	79,44	41,55	64,11	40,10	58,78	1,12	3.945

#### D. Pulau Kalimantan

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Pulau Kalimantan berada dalam kategori berkembang sebesar 52,41. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai Indeks

Pembangunan Desa tertinggi di Pulau Kalimantan dengan nilai indeks sebesar 56,44. Sementara itu provinsi dengan IPD terendah ada di Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2.6. Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Kalimantan

Dilihat dari dimensinya, dimensi dengan nilai paling rendah di Pulau Kalimantan adalah kondisi infrastruktur dengan indeks rata-rata sebesar 34,56 dan tertinggi dalam dimensi aksesibilitas/transportasi sebesar 68,95. Provinsi Kalimantan Selatan, provinsi dengan nilai Indeks Pembangunan Desa tertinggi, memiliki nilai indeks terbesar pada dimensi aksesibilitas/transportasi (73,84), dan terendah dalam dimensi kondisi infrastruktur.

Sementara di Provinsi Kalimantan Utara, provinsi dengan nilai Indeks Pembangunan Desa terendah, nilai indeks tertinggi dalam dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai sebesar 59,54; sementara nilai pada dimensi lain sebagai berikut: pelayanan dasar (41,36); kondisi infrastruktur (25,42); pelayanan umum (48,24); dan penyelenggaraan pemerintahan (49,07).

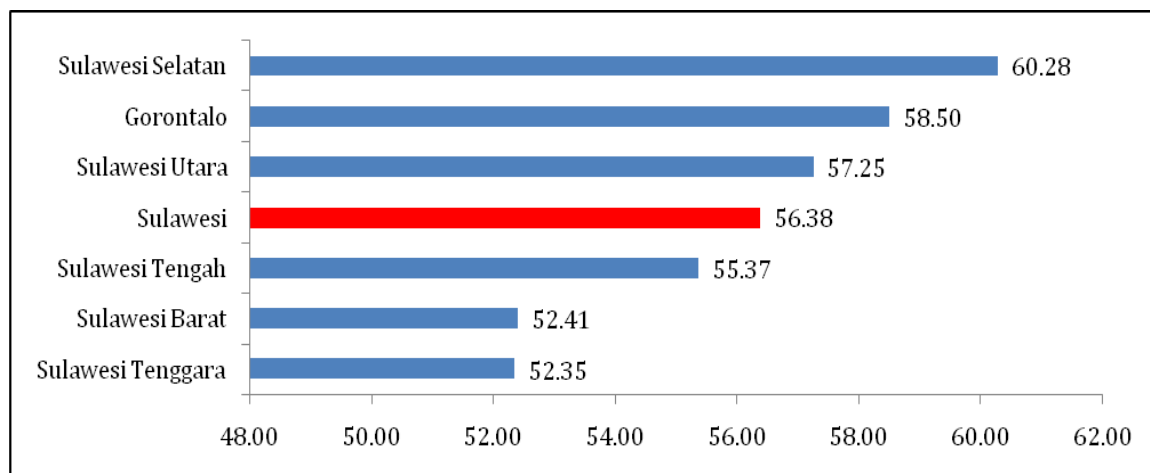
Tabel 2.5. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Kalimantan

Nama Provinsi	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Desa Menurut Tipologi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Kalimantan Barat	49,85	47,79	31,25	69,07	54,50	58,49	50,58	48,22	1,20	1.908
Kalimantan Tengah	51,32	55,09	29,00	66,06	54,51	60,93	40,86	58,44	0,70	1.434
Kalimantan Selatan	56,44	58,17	41,92	73,84	50,55	58,24	20,92	78,17	0,91	1.864
Kalimantan Timur	56,37	59,46	40,17	67,76	56,23	63,46	23,17	74,31	2,52	833
Kalimantan Utara	42,63	41,36	25,42	59,54	48,24	49,07	71,14	28,19	0,67	447
<b>Kalimantan</b>	<b>52,41</b>	<b>53,44</b>	<b>34,56</b>	<b>68,95</b>	<b>53,16</b>	<b>58,95</b>	<b>37,80</b>	<b>61,05</b>	<b>1,15</b>	<b>6.486</b>

#### E. Pulau Sulawesi

Indeks Pembangunan Desa Pulau Sulawesi memiliki nilai rata-rata sebesar 56,38. Indeks tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 60,28; dan terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara 52,35. Dengan demikian

provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi dalam kategori berkembang. Dilihat dari dimensinya, aksesibilitas/transportasi memiliki nilai indeks rata-rata sebesar 79,92. Sementara nilai dimensi kondisi infrastruktur (38,24); dan dimensi pelayanan umum (49,01).



Gambar 2.7. Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Sulawesi

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi. Dilihat dari dimensinya, aksesibilitas/transportasi memiliki nilai indeks terbesar sebesar 81,10; dan terendah dalam

dimensi kondisi infrastruktur sebesar 42,79. Sebaran klasifikasi desa di provinsi ini juga didominasi oleh desa berkembang (82,95%). Sementara jumlah desa mandiri hanya 1,42% dari total 2.253 desa.

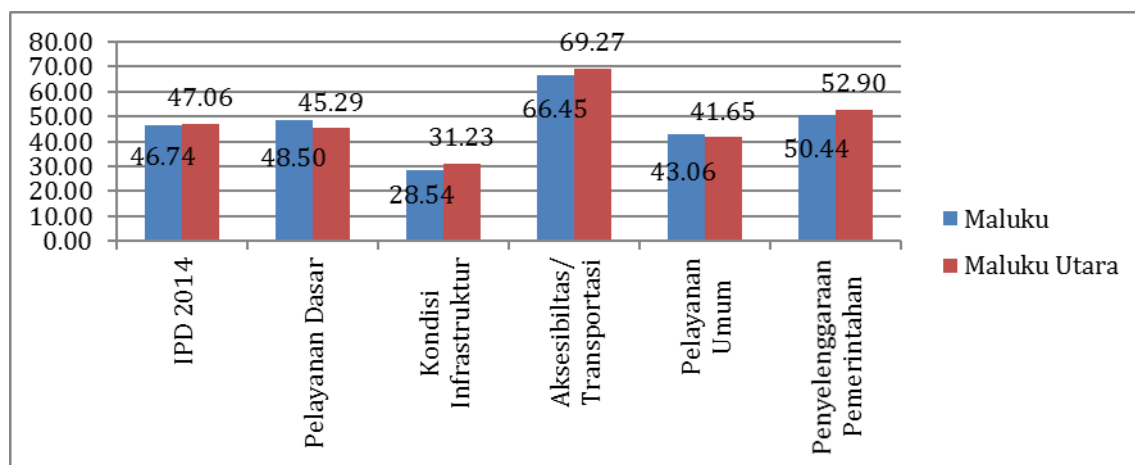
Tabel 2.6. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Sulawesi

Nama Provinsi	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Desa Menurut Tipologi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Sulawesi Utara	57,25	57,04	40,56	80,99	45,59	63,85	18,46	80,74	0,80	1.490
Sulawesi Tengah	55,37	52,96	35,89	81,33	51,94	62,54	27,19	72,32	0,49	1.839
Sulawesi Selatan	60,28	61,01	42,79	81,10	50,85	69,13	12,65	85,93	1,42	2.253
Sulawesi Tenggara	52,35	48,48	33,83	78,07	47,09	64,03	37,64	62,25	0,11	1.820
Gorontalo	58,50	59,70	42,40	79,69	45,85	65,25	15,68	82,95	1,37	657
Sulawesi Barat	52,41	52,06	31,07	74,18	50,93	63,62	37,33	62,33	0,34	576
<b>Sulawesi</b>	<b>56,38</b>	<b>55,27</b>	<b>38,24</b>	<b>79,92</b>	<b>49,01</b>	<b>65,08</b>	<b>23,89</b>	<b>75,34</b>	<b>0,77</b>	<b>8.635</b>

## F. Pulau Maluku

Pulau Maluku memiliki Indeks Pembangunan Desa yang lebih rendah daripada rata-rata nasional dengan nilai sebesar 46,89. Berdasarkan sebarannya klasifikasinya, desa tertinggal mencapai 60,25% dan desa mandiri

hanya sebesar 0,80% dari total 2.254 unit desa. Dilihat dari dimensinya, Pulau Maluku dimensi aksesibilitas/ transportasi memiliki nilai tertinggi sebesar 67,78. Sementara nilai terendah adalah dimensi kondisi infrastruktur sebesar 29,81.



Gambar 2.8. Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Maluku

Berdasarkan dimensinya, Provinsi Maluku Utara dan Maluku memiliki indeks tertinggi dalam dimensi aksesibilitas/transportasi, dengan nilai masing-masing 69,27 dan 66,45.

Sementara dimensi dengan nilai terendah dalam dimensi kondisi infrastruktur, dengan indeks masing-masing provinsi sebesar 31,23 dan 28,54.

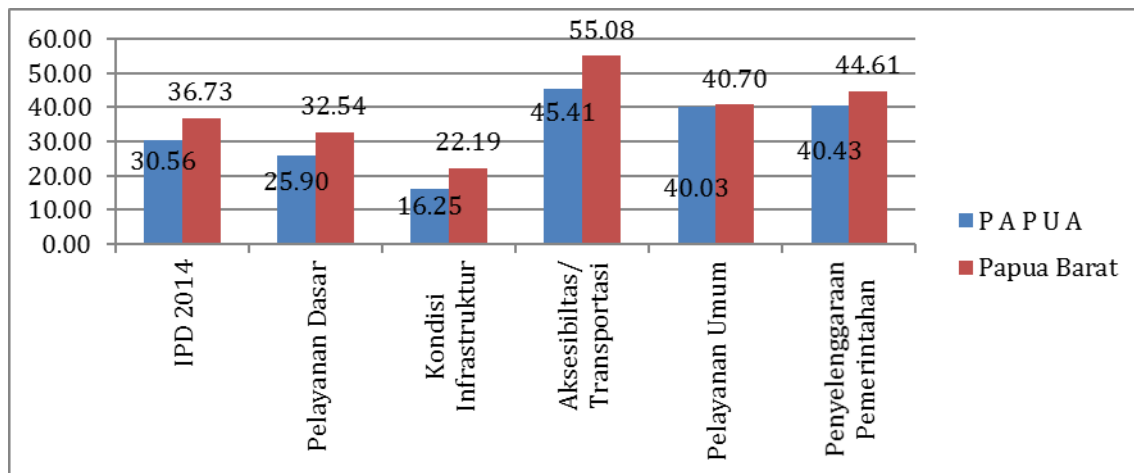
Tabel 2.7. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Maluku

Nama Provinsi	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Desa Menurut Tipologi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Maluku	46,74	48,50	28,54	66,45	43,06	50,44	61,80	37,02	1,18	1.191
Maluku Utara	47,06	45,29	31,23	69,27	41,65	52,90	59,27	40,36	0,37	1.063
<b>Maluku</b>	<b>46,89</b>	<b>46,99</b>	<b>29,81</b>	<b>67,78</b>	<b>42,39</b>	<b>51,60</b>	<b>60,60</b>	<b>38,60</b>	<b>0,80</b>	<b>2.254</b>

## G. Pulau Papua

Pulau Papua secara umum memiliki Indeks Pembangunan Desa yang rendah. Indeks Pulau Papua memiliki nilai sebesar 32,05 yang merupakan terendah nasional. Dari indeks ini, klasifikasi desa dalam kategori tertinggal

mencapai 91%, dan hanya ada 0,09% desa mandiri dari total desa 6.746 unit desa. Dari keseluruhan dimensi, nilai indeks terendah adalah pelayanan dasar (27,50); dan kondisi infrastruktur (17,68).



Gambar 2.9. Indeks Pembangunan Desa 2014 Pulau Papua

Dengan Indeks rata-rata total sebesar 30,56; Provinsi Papua memiliki dimensi pelayanan dasar sebesar 25,90. Sementara dimensi kondisi infrastruktur sebesar 17,68. Sementara dimensi aksesibilitas/transportasi di Provinsi Papua Barat memiliki sebesar 55,08. Dimensi terendah di provinsi tersebut adalah kondisi infrastuktur sebesar 22,19.

Prosentase desa tertinggal di Provinsi Papua mencapai 91,79% dari 5.118 desa. Sementara di Provinsi Papua Barat prosentase desa tertinggal sebesar 88,51% dari 1.628. Prosentase desa mandiri di kedua provinsi tersebut sama-sama rendah dengan nilai 0,1% di Provinsi Papua dan 0,06% di Provinsi Papua Barat.

Tabel 2.8. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Pulau Papua

Nama Provinsi	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Desa Menurut Tipologi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Papua Barat	36,73	32,54	22,19	55,08	40,70	44,61	88,51	11,43	0,06	1.628
P A P U A	30,56	25,90	16,25	45,41	40,03	40,43	91,79	8,11	0,10	5.118
Papua	32,05	27,50	17,68	47,75	40,19	41,44	91,00	8,91	0,09	6.746

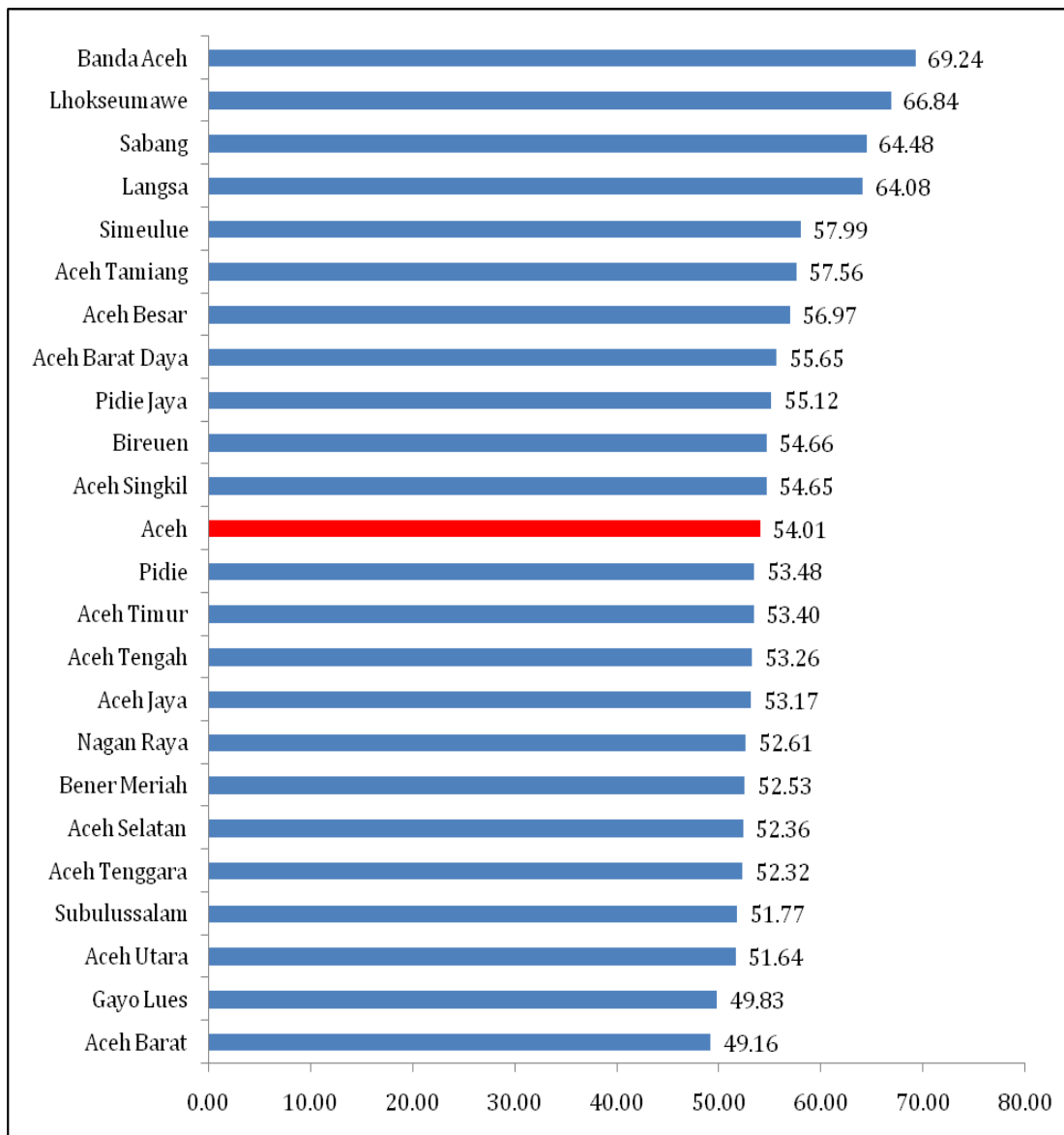
## 2.3 Kondisi Perkembangan Desa Indonesia berdasarkan Provinsi

### 1. Provinsi Aceh

Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Aceh sebesar 54,01, lebih rendah dari angka rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Dengan jumlah desa di Provinsi Aceh sebesar 4.198 desa, 1.605 desa (38,23%) diantaranya dalam kategori desa tertinggal. Sebanyak 2.565 desa (61,10%) dalam kategori

desa berkembang, dan sisanya sebanyak 28 desa (0,67%) dalam kategori desa mandiri.

Nilai Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata yang paling tinggi terdapat di Kota Banda Aceh dengan nilai rata-rata indeks sebesar 69,24. Dari 90 desa yang ada di Kota Banda Aceh, 70 desa (77,78%) dalam kategori desa berkembang dan 20 desa (22,22%) dalam kategori desa mandiri. Tidak ada desa di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe dalam kategori desa tertinggal.



Gambar 2.10. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Aceh

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Aceh memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 70,42, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 42,18. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 57,12, dimensi pelayanan umum sebesar 46,73, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 48,66.

Untuk nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang paling rendah ada di Kabupaten Aceh Barat. Di kabupaten ini, nilai rata-rata

indeksnya adalah sebesar 49,16. Dari sejumlah 322 desa, 185 desa (57,45%) dalam kategori desa tertinggal, 133 desa (41,30%) dalam kategori desa berkembang, dan 4 desa (1,24%) dalam kategori desa mandiri. Kabupaten yang memiliki jumlah desa tertinggal yang paling banyak adalah di Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah desa tertinggal sebanyak 372 desa, sedangkan jumlah desa mandiri yang paling banyak terdapat di Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah desa mandiri sebanyak 10 desa.

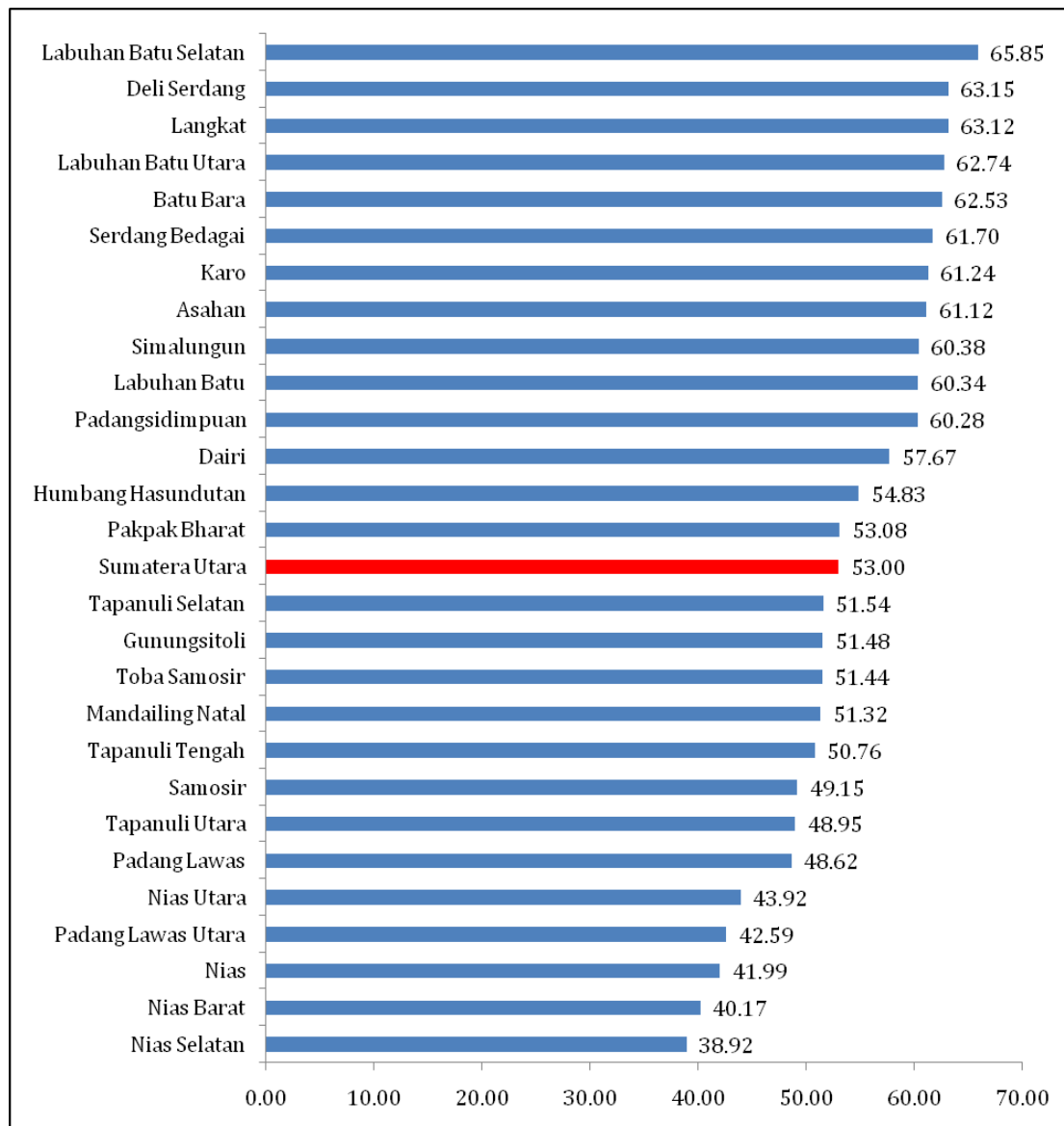
Tabel 2.9. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Aceh

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Simeulue	57,99	68,18	34,43	73,26	50,40	61,12	11,59	88,41	0,00	138
Aceh Singkil	54,65	59,94	39,18	71,17	47,97	50,37	30,17	67,24	2,59	116
Aceh Selatan	52,36	53,71	37,75	73,82	48,38	46,04	43,85	54,62	1,54	260
Aceh Tenggara	52,32	54,36	36,52	76,56	41,78	48,01	33,51	66,49	0,00	384
Aceh Timur	53,40	56,26	41,68	69,54	48,66	46,51	35,48	64,13	0,39	513
Aceh Tengah	53,26	52,95	41,02	70,89	47,85	55,01	33,22	66,44	0,34	295
Aceh Barat	49,16	47,46	37,55	69,34	47,14	45,38	57,45	41,30	1,24	322
Aceh Besar	56,97	59,90	47,65	71,86	42,88	56,01	15,73	82,62	1,66	604
Pidie	53,48	59,21	40,85	69,00	46,40	43,59	25,72	73,59	0,69	727
Bireuen	54,66	58,20	44,43	68,68	45,87	50,36	24,79	74,55	0,66	609
Aceh Utara	51,64	54,59	41,54	67,44	46,53	41,79	43,66	56,22	0,12	852
Aceh Barat Daya	55,65	61,43	40,72	74,44	48,01	45,37	19,70	79,55	0,76	132
Gayo Lues	49,83	52,48	33,19	73,88	43,72	41,53	49,26	50,00	0,74	136
Aceh Tamiang	57,56	59,73	49,48	68,28	51,22	56,04	16,90	81,22	1,88	213
Nagan Raya	52,61	53,73	38,52	69,32	47,38	55,84	41,44	57,21	1,35	222
Aceh Jaya	53,17	52,00	43,51	72,37	48,50	47,84	37,79	60,47	1,74	172
Bener Meriah	52,53	58,77	37,79	68,32	46,77	44,21	35,34	63,36	1,29	231
Pidie Jaya	55,12	60,61	44,54	70,06	46,31	44,01	14,86	84,23	0,90	222
Banda Aceh	69,24	74,34	69,17	71,22	51,14	68,52	0,00	77,78	22,22	90
Sabang	64,48	69,04	61,66	66,62	56,41	61,38	5,56	88,89	5,56	18
Langsa	64,08	68,75	57,93	74,58	56,56	52,25	3,03	90,91	6,06	66
Lhokseumawe	66,84	73,39	57,40	76,90	50,60	66,51	0,00	86,76	13,24	68
Subulussalam	51,77	51,46	39,50	69,46	47,28	52,54	39,02	59,76	1,22	82
<b>Aceh</b>	<b>54,01</b>	<b>57,12</b>	<b>42,18</b>	<b>70,42</b>	<b>46,73</b>	<b>48,66</b>	<b>30,89</b>	<b>67,78</b>	<b>1,33</b>	<b>6.472</b>

## 2. Provinsi Sumatera Utara

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Utara sebesar 53,00. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 55,69. Dari 5.389 desa, terdapat 3.299 desa dalam kategori berkembang (61,22%), sebanyak 88 desa mandiri (1,63%), dan sisanya sebanyak 2.002 desa (37,15%) dalam kategori desa tertinggal.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 38,15. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 54,34, dimensi pelayanan umum sebesar 46,01, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 49,97.



Gambar 2.11. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan angka 65,85. Di kabupaten ini, dari 52 desa yang ada, tidak ada yang berstatus desa tertinggal, namun desa mandiri baru ada 2 desa, 50 desa lainnya masih berstatus berkembang. Sedangkan untuk rata-rata nilai indeks terendah di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Nias

Selatan dengan rata-rata IPD sebesar 38,92. Di kabupaten ini jumlah desa tertinggal terbanyak diantara kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 390 desa dan tidak ada desa mandiri di kabupaten ini. Secara jumlah, desa mandiri tertinggi berada di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah desa sebanyak 53 unit.

Tabel 2.10. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Nias	41,99	39,14	25,56	66,05	44,72	40,82	80,59	19,41	0,00	170
Mandailing Natal	51,32	50,26	33,15	78,96	48,18	48,01	40,32	59,68	0,00	377

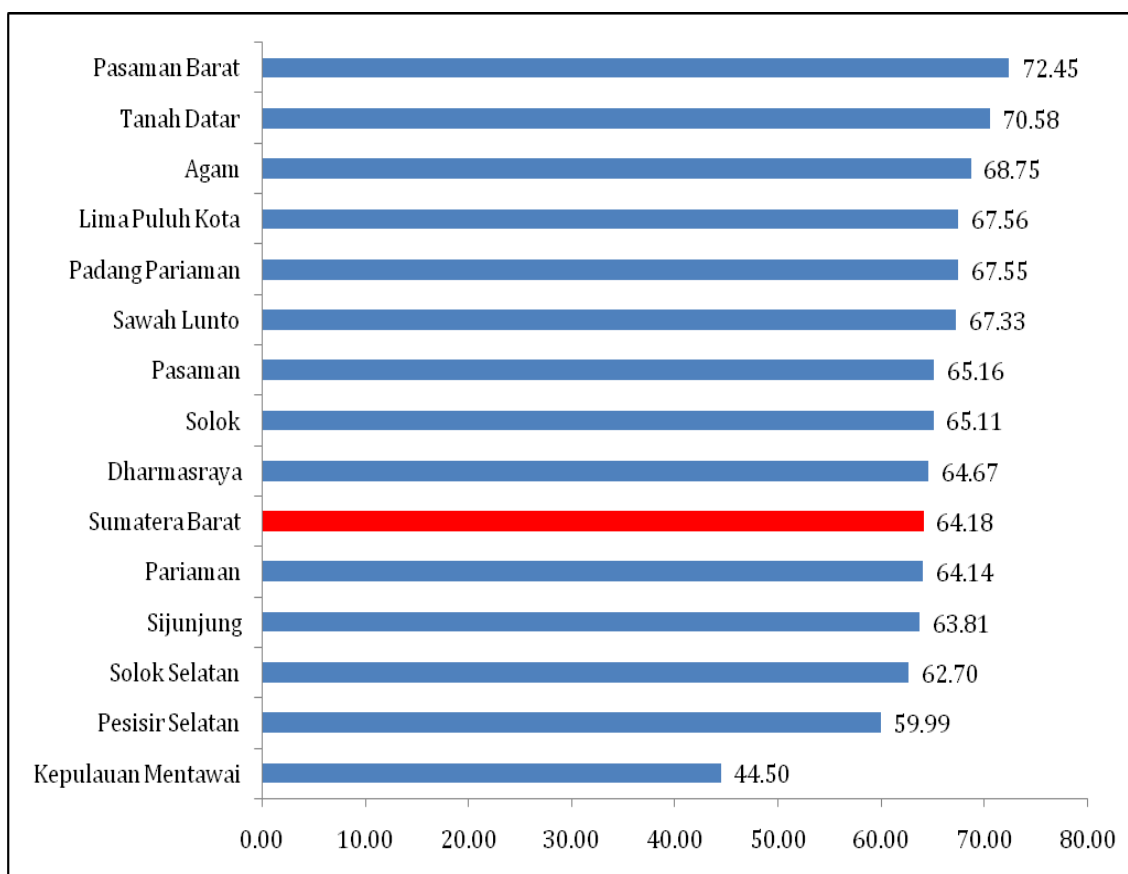


Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkem-bang	Mandiri	
Tapanuli Selatan	51,54	51,35	33,35	82,85	45,51	41,71	32,56	67,44	0,00	215
Tapanuli Tengah	50,76	54,53	32,79	74,49	45,66	41,80	44,03	55,97	0,00	159
Tapanuli Utara	48,95	49,89	36,56	77,75	39,31	30,57	48,96	51,04	0,00	241
Toba Samosir	51,44	50,87	41,53	72,27	39,49	49,14	36,96	62,61	0,43	230
Labuhan Batu	60,34	64,08	44,46	76,86	57,26	58,13	12,00	85,33	2,67	75
Asahan	61,12	64,80	52,04	69,73	56,92	59,19	3,95	94,92	1,13	177
Simalungun	60,38	61,14	49,67	80,46	48,04	57,65	10,36	87,56	2,07	386
Dairi	57,67	65,18	38,57	82,12	41,74	49,61	11,94	88,06	0,00	134
Karo	61,24	62,56	45,11	87,90	42,89	63,20	10,98	86,67	2,35	255
Deli Serdang	63,15	66,10	51,85	78,33	51,04	64,18	10,53	75,53	13,95	380
Langkat	63,12	67,96	50,17	74,30	53,59	67,21	4,17	93,75	2,08	240
Nias Selatan	38,92	39,51	20,53	58,27	39,84	42,61	84,97	15,03	0,00	459
Humbang Hasundutan	54,83	51,73	38,96	84,95	40,36	59,02	29,41	69,93	0,65	153
Pakpak Bharat	53,08	61,69	33,53	73,28	39,16	48,70	32,69	67,31	0,00	52
Samosir	49,15	49,70	33,78	73,55	38,62	48,02	58,59	41,41	0,00	128
Serdang Bedagai	61,70	66,41	51,99	72,73	52,13	59,03	7,17	90,72	2,11	237
Batu Bara	62,53	69,01	51,55	78,67	48,66	52,22	2,13	97,87	0,00	141
Padang Lawas Utara	42,59	36,90	27,98	72,02	43,30	37,68	69,95	30,05	0,00	386
Padang Lawas	48,62	49,69	31,46	75,78	44,49	38,45	58,75	40,92	0,33	303
Labuhan Batu Selatan	65,85	69,30	50,07	82,54	65,08	61,57	0,00	96,15	3,85	52
Labuhan Batu Utara	62,74	68,54	46,62	76,12	57,90	62,53	4,88	92,68	2,44	82
Nias Utara	43,92	45,94	23,79	64,19	47,36	43,13	73,21	26,79	0,00	112
Nias Barat	40,17	39,75	21,41	58,30	45,81	45,33	87,62	12,38	0,00	105
Padang Sidempuan	60,28	69,25	39,80	81,37	44,99	56,69	4,76	95,24	0,00	42
Gunungsitoli	51,48	61,07	35,31	65,47	39,70	45,87	45,92	54,08	0,00	98
<b>Sumatera Utara</b>	<b>53,00</b>	<b>54,34</b>	<b>38,15</b>	<b>74,58</b>	<b>46,01</b>	<b>49,97</b>	<b>37,15</b>	<b>61,22</b>	<b>1,63</b>	<b>5.389</b>

### 3. Provinsi Sumatera Barat

Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Barat secara rata-rata adalah 64,18, berada di atas rata-rata nasional. Dengan jumlah desa sebanyak 880 desa, sebanyak 56 desa dalam kategori desa tertinggal, 739 desa dalam kategori desa berkembang, dan sisanya sebanyak 85 desa dalam kategori desa mandiri.

Dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, 7 kabupaten/kota sudah tidak lagi memiliki desa yang ada di kategori desa tertinggal. Tujuh kabupaten/kota yang masih perlu mengentaskan desa tertinggalnya adalah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Lima Puluh Kota.



Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Sumatera Barat memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 77,70, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah adalah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 46,51. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 69,36, dimensi pelayanan umum sebesar 58,41, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 70,11.

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat terdapat di Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai indeks

sebesar 72,45. Di kabupaten ini, dari 19 desa yang ada, sebanyak 14 desa dalam kategori desa berkembang, dan 5 desa dalam kategori desa mandiri. Tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan untuk rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang terendah di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai indeks sebesar 44,50. Dari 43 desa yang terdapat di kabupaten ini, sebanyak 29 desa (67,44%) masih dalam kategori desa tertinggal, 13 desa (30,23%) dalam kategori desa berkembang, dan sebanyak 1 desa (2,33%) sudah berada dalam kategori desa mandiri.

Tabel 2.11. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sumatera Barat

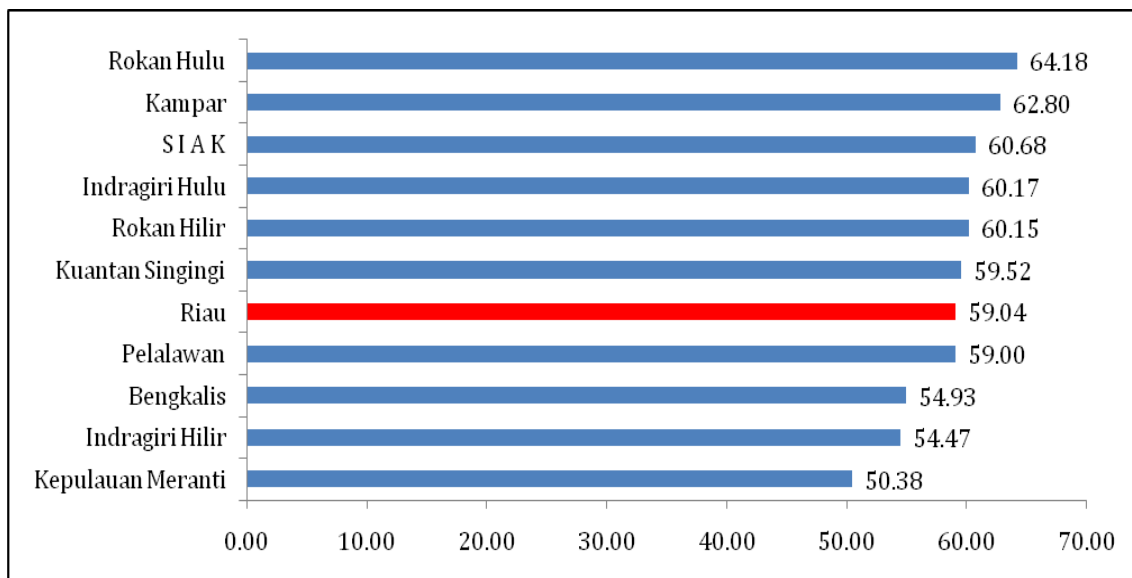
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Kepulauan Mentawai	44,50	48,97	25,19	49,48	51,48	59,52	67,44	30,23	2,33	43
Pesisir Selatan	59,99	62,60	43,69	78,61	52,86	62,21	7,69	89,56	2,75	182
Solok	65,11	72,21	43,45	77,92	59,49	75,71	5,41	83,78	10,81	74
Sijunjung	63,81	66,92	45,83	78,11	59,76	73,47	3,28	83,61	13,11	61

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Tanah Datar	70,58	77,27	49,61	86,98	64,34	74,66	0,00	81,33	18,67	75
Padang Pariaman	67,55	76,30	49,36	77,82	60,87	70,97	0,00	88,33	11,67	60
Agam	68,75	74,81	50,78	84,36	59,54	72,25	0,00	89,02	10,98	82
Lima Puluh Kota	67,56	72,45	48,41	80,96	62,37	77,36	1,27	83,54	15,19	79
Pasaman	65,16	70,67	47,05	76,98	62,97	70,74	0,00	90,63	9,38	32
Solok Selatan	62,70	73,76	45,36	68,44	55,19	66,51	5,13	87,18	7,69	39
Dharmasraya	64,67	67,24	50,16	74,78	64,81	71,54	7,69	78,85	13,46	52
Pasaman Barat	72,45	75,64	54,30	85,43	74,68	78,43	0,00	73,68	26,32	19
Sawah Lunto	67,33	73,31	54,97	80,43	52,84	68,12	0,00	88,89	11,11	27
Pariaman	64,14	69,57	51,11	74,27	51,73	71,52	0,00	100,00	0,00	55
<b>Sumatera Barat</b>	<b>64,18</b>	<b>69,36</b>	<b>46,51</b>	<b>77,70</b>	<b>58,41</b>	<b>70,11</b>	<b>6,36</b>	<b>83,98</b>	<b>9,66</b>	<b>880</b>

#### 4. Provinsi Riau

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Riau adalah 59,04, berada di atas rata-rata nasional. Angka ini dibentuk dari Indeks Pembangunan Desa di 1.592 desa yang ada. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut, sebanyak 281 desa masih dalam kategori desa tertinggal, 1.271 desa (79,84%) berada dalam kategori desa berkembang, dan sebanyak 40 desa (2,51%) telah berada dalam kategori desa mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Riau memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 71,92, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah adalah kondisi infrastruktur dengan nilai sebesar 42,53. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 61,36, dimensi pelayanan umum (61,52), dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan (63,78).



Gambar 2.13. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Riau

Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata yang paling tinggi adalah di Kabupaten Rokan Hulu dengan nilai indeks sebesar 64,18. Di Kabupaten Rokan Hulu, jumlah desa yang

ada adalah 139 desa. Dari 139 desa tersebut, sebanyak 3 desa (2,16%) berada dalam kategori desa tertinggal, 128 desa (92,09%) berada dalam kategori desa berkembang, dan 8

desa (5,76%) telah berada dalam kategori desa mandiri. Untuk rata-rata Indeks Pembangunan Desa terendah ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai indeks sebesar 50,38. Di kabupaten ini belum ada satupun desa mandiri.

Dari sebanyak 96 desa, 50% desa masih berada dalam kategori desa tertinggal dan 50% desa dalam kategori desa berkembang. Di kabupaten ini pula jumlah desa tertinggal paling banyak diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Riau.

Tabel 2.12. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Riau

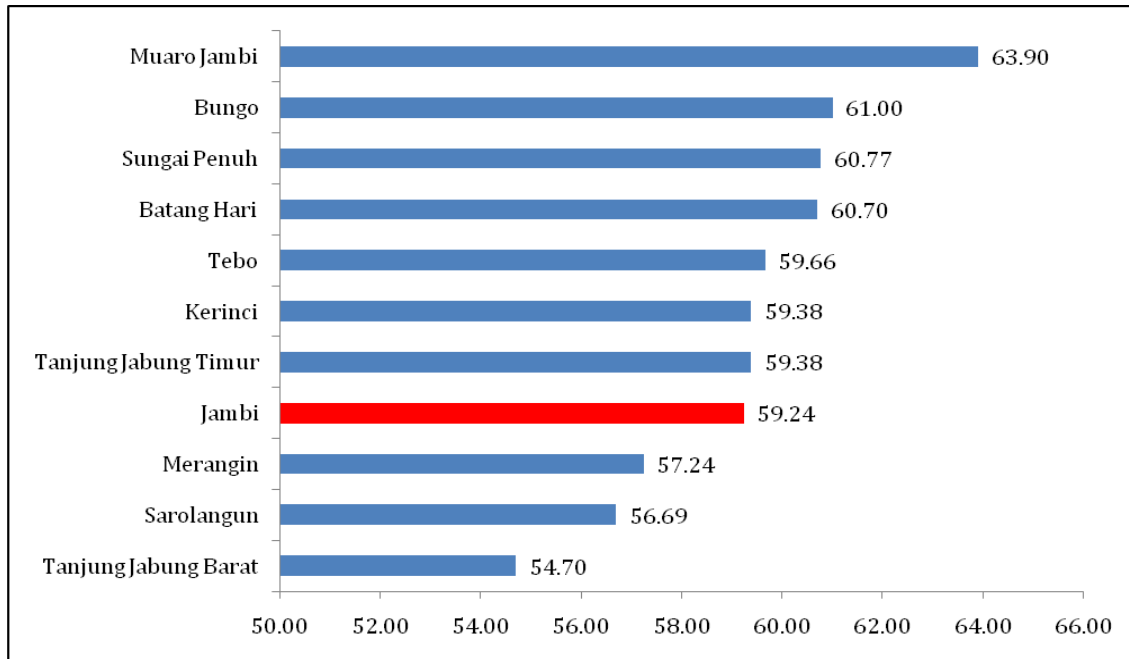
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Kuantan Singingi	59,52	62,38	42,92	71,17	60,69	66,41	9,17	89,45	1,38	218
Indragiri Hulu	60,17	63,51	44,27	70,89	60,84	66,30	13,48	85,39	1,12	178
Indragiri Hilir	54,47	54,67	33,25	70,39	63,73	64,00	31,82	67,17	1,01	198
Pelalawan	59,00	56,34	44,78	72,44	66,59	67,17	16,35	81,73	1,92	104
S I A K	60,68	64,96	46,67	68,57	63,56	62,62	13,11	83,61	3,28	122
Kampar	62,80	66,73	47,58	72,56	61,29	69,49	10,74	83,88	5,37	242
Rokan Hulu	64,18	68,14	43,74	78,03	64,19	73,71	2,16	92,09	5,76	139
Bengkalis	54,93	57,19	41,53	73,07	57,16	43,05	31,62	67,65	0,74	136
Rokan Hilir	60,15	63,24	44,63	74,14	60,48	60,34	13,21	83,65	3,14	159
Kepulauan Meranti	50,38	49,19	33,39	66,56	56,56	56,81	50,00	50,00	0,00	96
Riau	59,04	61,36	42,53	71,92	61,52	63,78	17,65	79,84	2,51	1.592

## 5. Provinsi Jambi

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Jambi adalah sebesar 59,24. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 55,69. Di provinsi ini terdapat 1.398 desa, 191 desa (13,66%) diantaranya dalam kategori desa tertinggal, 1.176 desa (84,12%) dalam kategori desa berkembang, dan sebanyak 31 desa (2,22%) dalam kategori desa mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Jambi memiliki nilai

rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 76,70, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 40,39. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 61,12, dimensi pelayanan umum sebesar 60,10, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 63,67.



Gambar 2.14. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Jambi

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang tertinggi di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Muaro Jambi dengan nilai indeks sebesar 63,90 dengan jumlah desa sebanyak 150 desa, sedangkan rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai indeks sebesar 54,70 dengan jumlah desa sebanyak 114 desa. Jumlah desa

tertinggal yang terbesar berada di Kabupaten Merangin, yaitu sejumlah 46 desa, kemudian diikuti oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejumlah 36 desa, dan Kabupaten Sarolangun sejumlah 35 desa. Untuk desa mandiri, jumlah terbesar ada di Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah desa mandiri sebanyak 8 desa.

Tabel 2.13. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Jambi

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Kerinci	59,38	60,24	42,55	78,82	55,13	63,64	7,37	91,93	0,70	285
Merangin	57,24	60,01	35,76	77,80	59,43	58,07	22,44	75,61	1,95	205
Sarolangun	56,69	56,87	36,57	77,90	59,16	60,58	23,49	75,84	0,67	149
Batang Hari	60,70	63,99	41,68	73,69	60,59	70,70	6,42	91,74	1,83	109
Muaro Jambi	63,90	67,65	48,26	73,71	62,99	71,43	4,00	90,67	5,33	150
Tanjung Jabung Timur	59,38	63,36	34,14	76,29	66,31	67,33	6,85	93,15	0,00	73
Tanjung Jabung Barat	54,70	56,48	35,54	73,21	62,74	51,08	31,58	67,54	0,88	114
Tebo	59,66	59,31	42,14	75,47	66,67	64,70	15,89	76,64	7,48	107
Bungo	61,00	61,98	39,10	83,21	61,27	67,00	12,06	85,11	2,84	141
Sungai Penuh	60,77	65,18	49,44	67,73	53,75	67,85	1,54	96,92	1,54	65
Jambi	59,24	61,12	40,39	76,70	60,10	63,67	13,66	84,12	2,22	1.398

## 6. Provinsi Sumatera Selatan

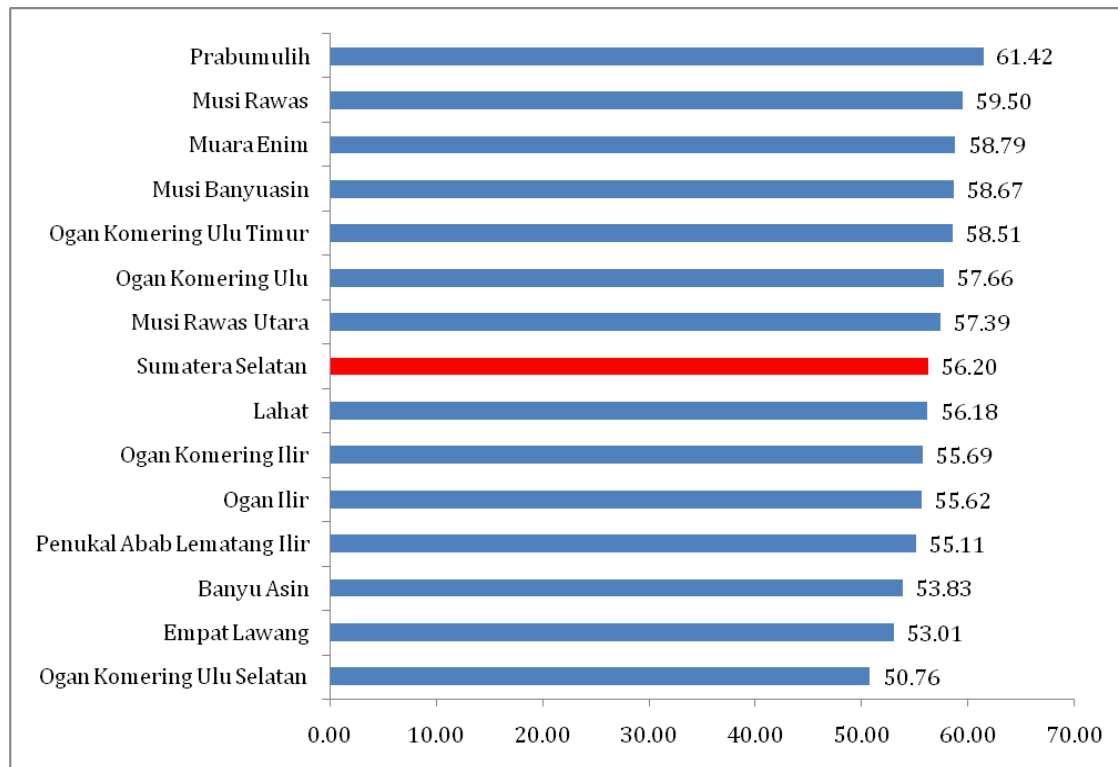
Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Selatan secara rata-rata adalah

sebesar 56,20, berada di atas rata-rata nasional. Angka ini dibentuk dari rata-rata Indeks Pembangunan Desa pada 2.817 desa yang ada di provinsi ini. Dari keseluruhan jumlah desa

tersebut, sebanyak 656 desa (23,29%) masih berada dalam kategori desa tertinggal, 2.134 desa (75,75%) berada dalam kategori desa berkembang, dan 27 desa (0,96%) berada dalam kategori desa mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai

rata-rata indeks 77,54, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah adalah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 40,34. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 53,89, dimensi pelayanan umum sebesar 57,20, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 58,92.



Gambar 2.15. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota yang memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi adalah Kota Prabumulih dengan nilai rata-rata indeks sebesar 61,42. Di kota ini hanya terdapat 15 desa yang kesemuanya berada dalam kategori desa berkembang. Kabupaten yang memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Desa terendah di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan nilai rata-

rata indeks sebesar 50,76. Di kabupaten ini jumlah desa tertinggal paling banyak dengan jumlah sebesar 107 desa dari 252 desa yang ada. Di Provinsi Sumatera Selatan, beberapa kabupaten/kota tidak memiliki desa mandiri, yaitu Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara, dan Prabumulih.

Tabel 2.14. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan

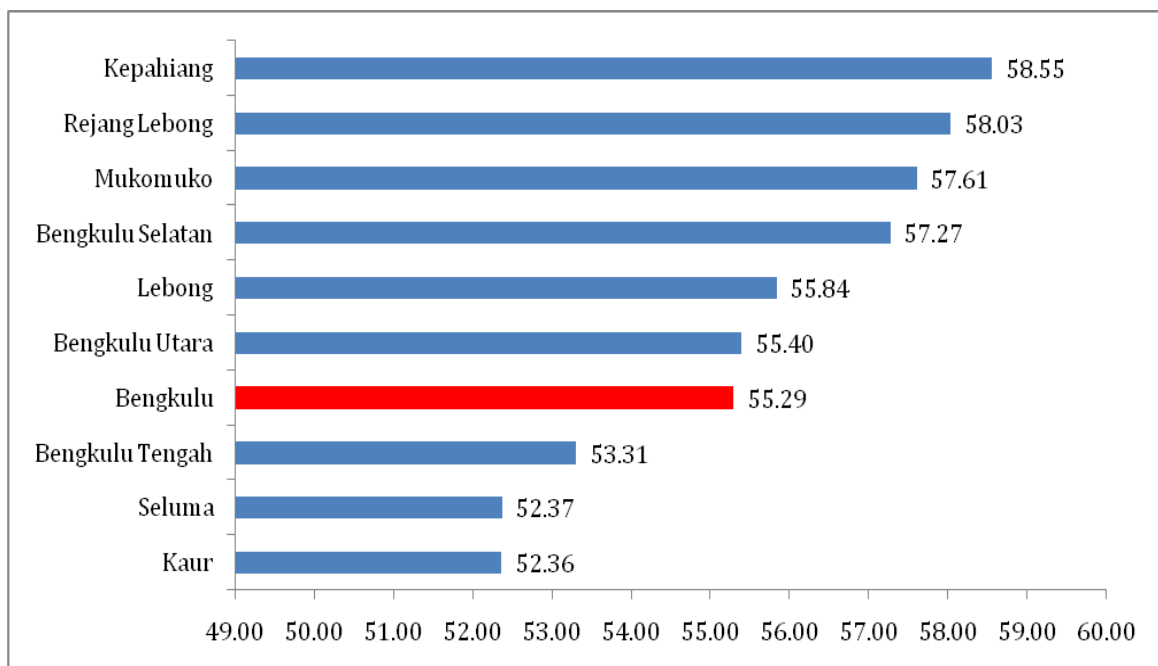
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Ogan Komering Ulu	57,66	55,64	40,32	80,62	57,69	60,90	24,48	72,73	2,80	143
Ogan Komering Ilir	55,69	52,88	41,99	73,76	60,85	56,85	28,42	70,18	1,40	285
Muara Enim	58,79	53,59	43,68	82,19	60,63	63,73	15,10	83,27	1,63	245
Lahat	56,18	53,73	41,13	82,16	51,36	54,55	19,44	80,28	0,28	360

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Musi Rawas	59,50	60,85	41,69	80,40	58,70	58,38	8,60	90,86	0,54	186
Musi Banyuasin	58,67	55,27	45,33	76,62	63,90	60,89	15,70	82,51	1,79	223
Banyu Asin	53,83	50,31	34,83	72,95	59,39	67,11	33,33	65,97	0,69	288
Ogan Komering Ulu Selatan	50,76	46,67	29,59	78,89	55,42	54,75	42,46	57,54	0,00	252
Ogan Komering Ulu Timur	58,51	58,54	45,15	70,51	55,09	70,33	14,10	83,61	2,30	305
Ogan Ilir	55,62	55,29	40,48	76,90	53,34	54,17	26,34	73,66	0,00	224
Empat Lawang	53,01	52,25	38,15	81,50	52,65	36,69	31,37	68,63	0,00	153
Penukal Abab Lematang Ilir	55,11	48,43	43,85	73,35	61,84	60,27	28,57	71,43	0,00	56
Musi Rawas Utara	57,39	55,60	38,86	82,23	58,08	58,52	15,85	84,15	0,00	82
Prabumulih	61,42	61,17	48,90	78,73	61,74	58,50	0,00	100,00	0,00	15
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>56,20</b>	<b>53,89</b>	<b>40,34</b>	<b>77,54</b>	<b>57,20</b>	<b>58,92</b>	<b>23,29</b>	<b>75,75</b>	<b>0,96</b>	<b>2.817</b>

## 7. Provinsi Bengkulu

Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Bengkulu secara rata-rata adalah sebesar 55,29. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Jumlah desa di Provinsi

Bengkulu adalah 1.341 desa, sebanyak 344 desa (25,65%) berada dalam kategori desa tertinggal, 992 desa (73,97%) berada dalam kategori desa berkembang, dan sebanyak 5 desa (0,37%) dalam kategori desa mandiri.



Gambar 2.16. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Bengkulu memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 74,44, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah adalah pada dimensi kondisi

infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 38,52. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 57,87, dimensi pelayanan umum sebesar 50,80 dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 55,07.



Rata-rata Indeks Pembangunan Desa paling tinggi adalah di Kabupaten Kepahiang dengan nilai indeks rata-rata 58,55 dengan jumlah desa sebanyak 105 desa, sedangkan rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang paling rendah adalah di Kabupaten Kaur dengan nilai indeks rata-rata 52,36 dengan

jumlah desa sebanyak 192 desa. Di Kabupaten Kaur ini pula jumlah desa tertinggal paling banyak ditemukan, yaitu sejumlah 73 desa. Di Provinsi Bengkulu, terdapat 4 kabupaten yang tidak memiliki desa mandiri, yaitu Kaur, Lebong, Bengkulu Selatan, dan Rejang Lebong.

Tabel 2.15. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Bengkulu

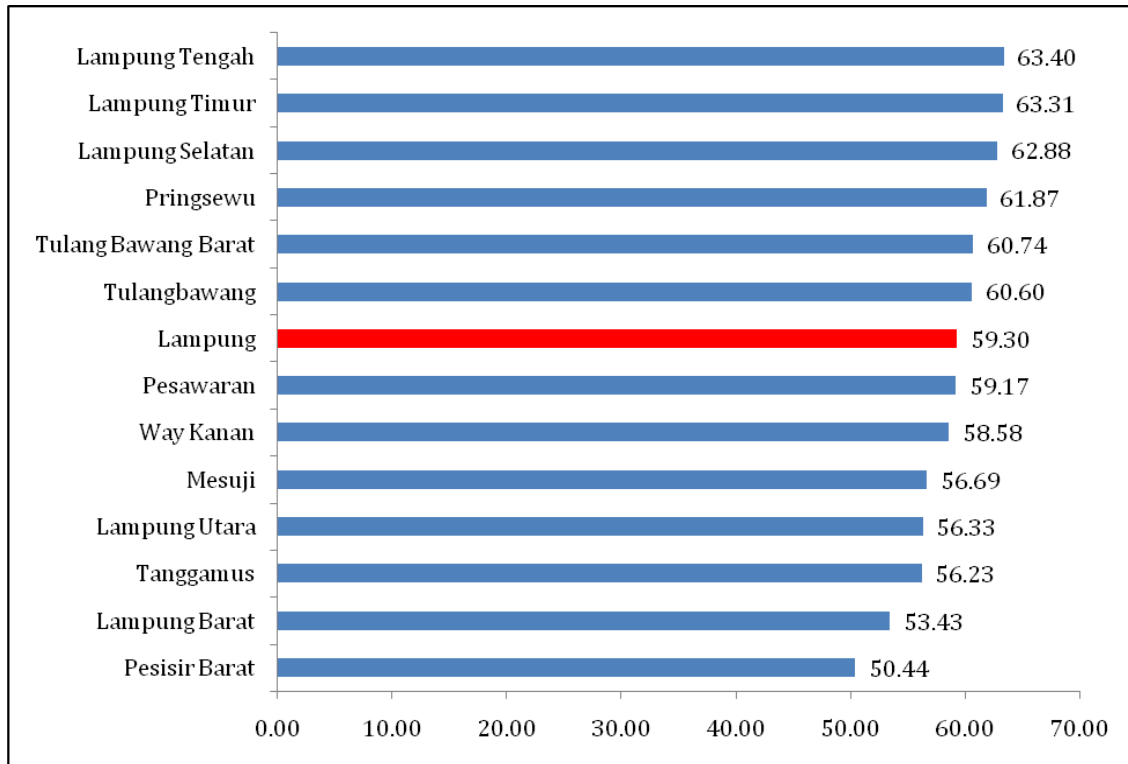
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Bengkulu Selatan	57,27	61,43	38,41	84,05	48,32	47,34	8,45	91,55	0,00	142
Rejang Lebong	58,03	62,35	40,87	77,29	51,67	55,20	13,11	86,89	0,00	122
Bengkulu Utara	55,40	58,04	39,75	68,37	51,96	62,91	25,58	73,95	0,47	215
Kaur	52,36	52,72	36,38	75,80	46,84	49,99	38,02	61,98	0,00	192
Seluma	52,37	54,15	35,24	72,09	52,09	50,12	36,26	63,19	0,55	182
Mukomuko	57,61	58,52	42,66	70,38	58,23	65,02	20,95	78,38	0,68	148
Lebong	55,84	58,08	40,08	75,78	48,37	55,75	21,51	78,49	0,00	93
Kepahiang	58,55	63,30	41,45	81,53	49,14	50,40	10,48	88,57	0,95	105
Bengkulu Tengah	53,31	57,06	34,39	70,87	49,61	56,71	42,25	57,04	0,70	142
<b>Bengkulu</b>	<b>55,29</b>	<b>57,87</b>	<b>38,52</b>	<b>74,44</b>	<b>50,80</b>	<b>55,07</b>	<b>25,65</b>	<b>73,97</b>	<b>0,37</b>	<b>1.341</b>

## 8. Provinsi Lampung

Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Lampung adalah sebesar 59,30. Nilai ini berada di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Jumlah desa yang ada di Provinsi Lampung adalah 2.435 desa, dengan jumlah desa tertinggal sebanyak 348 desa (14,29%), jumlah desa berkembang sebanyak 2.010 desa (82,55%), dan jumlah desa mandiri sebanyak 77 desa (3,16%).

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Lampung memiliki

nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 73,58, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah adalah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 42,92. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 62,22, dimensi pelayanan umum sebesar 59,14, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 61,94.



Gambar 2.17. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Lampung

Indeks Pembangunan Desa tertinggi secara rata-rata di Provinsi Lampung ada di Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai indeks rata-rata sebesar 63,40 dengan jumlah desa sebanyak 301 desa. Di kabupaten ini pula terdapat jumlah desa mandiri paling banyak, yaitu sebanyak 14 desa. Untuk Indeks Pembangunan Desa rata-rata yang paling rendah ada di Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai indeks rata-rata

sebesar 50,44 dengan desa sejumlah 116 desa. Di Kabupaten Pesisir Barat, dari 116 desa, belum ada satupun desa dalam kategori desa mandiri. Jumlah desa tertinggal paling banyak berada di Kabupaten Tanggamus dengan jumlah desa sebanyak 87 desa, sedangkan jumlah desa tertinggal paling sedikit berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan jumlah desa tertinggal sebanyak 3 desa.

Tabel 2.16. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Lampung

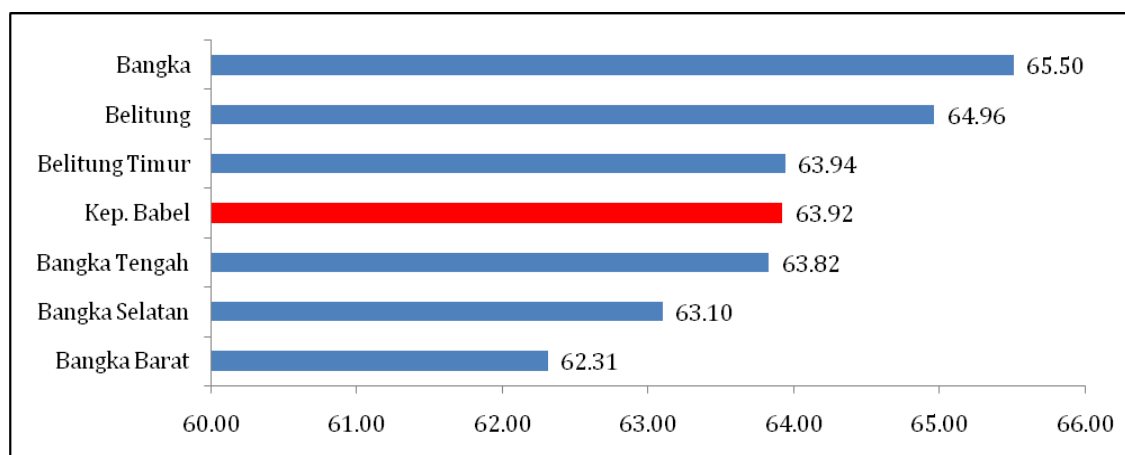
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Lampung Barat	53,43	55,69	37,52	67,63	61,87	48,48	37,40	61,83	0,76	131
Tanggamus	56,23	59,08	37,40	74,74	53,67	59,23	29,10	68,23	2,68	299
Lampung Selatan	62,88	66,39	47,75	75,74	57,59	68,62	2,34	93,36	4,30	256
Lampung Timur	63,31	68,59	48,26	73,39	60,36	66,42	1,89	93,18	4,92	264
Lampung Tengah	63,40	65,61	47,96	76,84	63,02	67,78	2,33	93,02	4,65	301
Lampung Utara	56,33	59,58	39,51	73,65	55,61	53,85	24,14	75,43	0,43	232
Way Kanan	58,58	58,67	41,24	77,15	60,98	61,28	14,48	82,81	2,71	221
Tulangbawang	60,60	62,65	44,83	73,02	61,98	66,33	11,56	84,35	4,08	147
Pesawaran	59,17	64,06	42,88	72,12	57,09	60,11	11,11	84,72	4,17	144
Pringsewu	61,87	68,29	44,83	70,46	56,76	71,18	3,97	92,06	3,97	126
Mesuji	56,69	56,24	39,48	69,80	62,60	67,46	11,43	86,67	1,90	105
Tulang Bawang Barat	60,74	65,12	45,84	68,00	63,24	66,01	3,23	92,47	4,30	93

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Pesisir Barat	50,44	50,89	33,70	71,28	59,43	39,85	45,69	54,31	0,00	116
Lampung	59,30	62,22	42,92	73,58	59,14	61,94	14,29	82,55	3,16	2.435

## 9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa sebesar 63,92, berada di atas nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Dengan jumlah desa sebanyak 309 desa, sebanyak 12 desa (3,88%) desa dalam kategori desa tertinggal, 288 desa (93,20%) dalam kategori desa berkembang, dan sisanya sebanyak 9 desa (2,91%) dalam kategori desa mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 50,09. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 60,96, dimensi pelayanan umum sebesar 63,39, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 65,76.



Gambar 2.18. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Pembangunan Desa paling tinggi secara rata-rata ada di Kabupaten Bangka dengan nilai indeks rata-rata adalah sebesar 65,50 dengan jumlah desa sebanyak 62 desa. Nilai ini dibentuk dari rata-rata indeks pembangunan desa pada 58 desa berkembang dan 4 desa mandiri. Di kabupaten ini tidak ada lagi desa tertinggal. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah desa tertinggal berkisar

antara 1-4 desa pada setiap kabupaten. Namun begitu pula untuk jumlah desa mandirinya juga berkisar pada angka 1-4 desa untuk setiap kabupaten. Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada di Kabupaten Bangka Barat dengan nilai rata-rata indeks sebesar 62,31 dengan jumlah desa sebanyak 60 desa.

Tabel 2.17. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

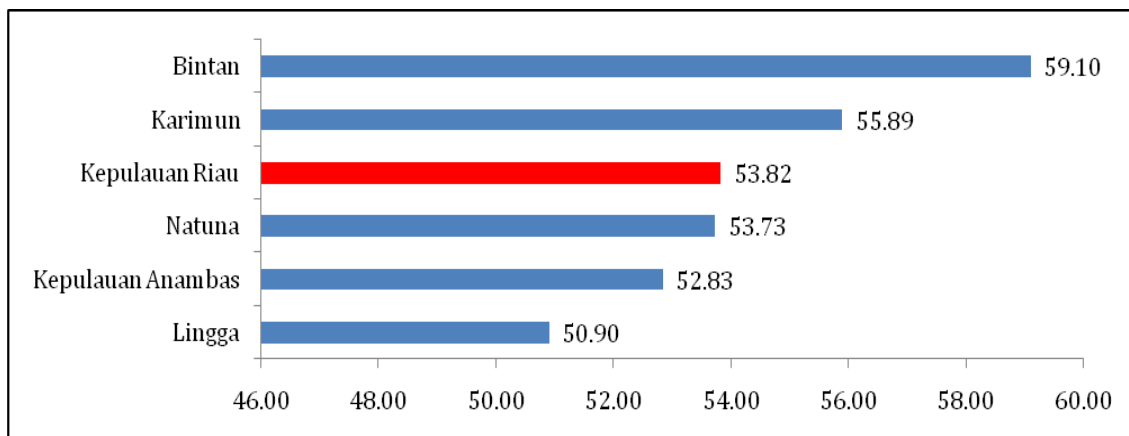
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Bangka	65,50	63,95	48,74	88,39	63,31	68,38	0,00	93,55	6,45	62
Belitung	64,96	65,15	49,95	81,53	62,48	70,63	9,52	90,48	0,00	42
Bangka Barat	62,31	56,44	50,19	84,90	65,44	62,55	5,00	91,67	3,33	60
Bangka Tengah	63,82	60,53	52,16	86,04	61,96	61,02	1,79	96,43	1,79	56

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Bangka Selatan	63,10	61,08	46,64	85,57	66,63	61,63	6,00	94,00	0,00	50
Belitung Timur	63,94	59,15	53,70	81,74	59,22	73,41	2,56	92,31	5,13	39
Kepulauan Bangka Belitung	63,92	60,96	50,09	85,06	63,39	65,76	3,88	93,20	2,91	309

## 10. Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 53,82, masih di bawah nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Nilai tersebut dibentuk dari nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa pada 275 desa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut, 95 desa dalam kategori tertinggal (34,55%), 176 desa dalam kategori desa berkembang (64,00%), dan 4 desa dalam kategori desa mandiri (1,45%).

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 67,01, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 40,01. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 56,10, dimensi pelayanan umum sebesar 53,70, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 54,41.



Gambar 2.19. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau

Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang paling tinggi ada di Kabupaten Bintan, dengan nilai rata-rata indeks sebesar 59,10 dengan jumlah desa sebanyak 36 desa. Kabupaten ini memiliki jumlah desa tertinggal paling sedikit dan desa mandiri. Sedangkan untuk nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa paling rendah ada di Kabupaten Lingga dengan

nilai rata-rata indeks sebesar 50,90 dengan jumlah desa sebanyak 75 desa. Kabupaten Lingga ini juga merupakan kabupaten yang memiliki jumlah desa tertinggal paling besar, yaitu 34 desa. Dari keseluruhan kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 2 kabupaten yang belum memiliki desa mandiri, yaitu Kabupaten Natuna dan Karimun.

Tabel 2.18. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Riau

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Karimun	55,89	59,40	39,42	70,81	53,03	58,48	30,95	69,05	0,00	42
Bintan	59,10	61,37	50,35	67,47	56,57	59,42	16,67	77,78	5,56	36
Natuna	53,73	53,17	37,76	73,97	53,00	55,23	35,71	64,29	0,00	70

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Lingga	50,90	50,17	38,86	67,46	53,78	47,12	45,33	53,33	1,33	75
Kepulauan Anambas	52,83	62,29	38,02	53,62	53,10	57,08	32,69	65,38	1,92	52
Kepulauan Riau	53,82	56,10	40,01	67,01	53,70	54,41	34,55	64,00	1,45	275

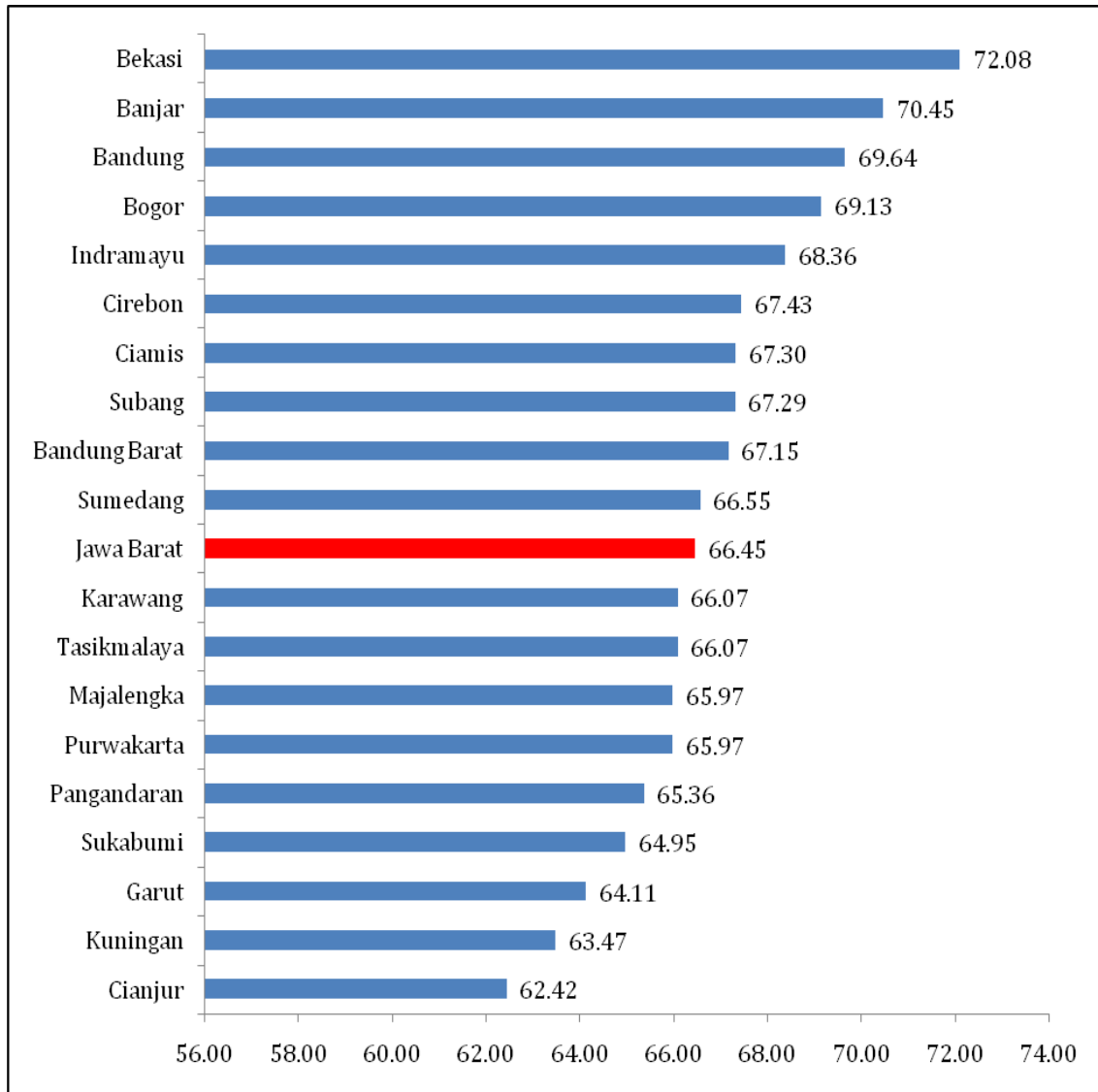
## 11. Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata sebesar 66,45. Nilai ini di atas nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Jumlah desa yang ada di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 5.319 desa. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut, terdapat 97 desa (1,82%) dalam kategori desa tertinggal, 4.622 desa (86,90%) dalam kategori desa berkembang, dan sebanyak 600 desa (11,28%) dalam kategori desa mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Jawa Barat memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 80,90, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 51,87. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata

indeks sebesar 68,40, dimensi pelayanan umum sebesar 59,88, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 73,92.

Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang terendah di Provinsi Jawa Barat terdapat di Kabupaten Cianjur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 62,42 dengan jumlah desa sebanyak 353 desa. Di Kabupaten Cianjur jumlah desa yang tertinggal sebanyak 42 desa yang merupakan jumlah desa tertinggal paling banyak dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat. Untuk nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa paling tinggi, terdapat di Kabupaten Bekasi dengan nilai rata-rata indeks sebesar 72,08. Jumlah desa yang ada di Kabupaten Bekasi sebanyak 182 desa dengan 119 diantaranya merupakan desa berkembang dan 63 desa lainnya adalah desa mandiri,



Gambar 2.20. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

Di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh desa berkembang yaitu di Kabupaten Purwakarta, Ciamis, Indramayu, Bandung, Banjar, Bekasi. Jumlah desa mandiri yang paling besar ada di

Kabupaten Bogor yaitu sejumlah 85 desa yang kemudian diikuti Kabupaten Bekasi dengan jumlah desa mandiri sebesar 63 desa dan Kabupaten Bandung sejumlah 59 desa.

Tabel 2.19. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Bogor	69,13	71,79	55,05	84,42	60,08	74,24	0,24	79,38	20,38	417
Sukabumi	64,95	65,98	48,09	83,41	57,49	73,89	4,20	87,40	8,40	381
Cianjur	62,42	60,05	43,77	82,04	63,11	75,39	11,90	79,04	9,07	353
Bandung	69,64	74,45	54,85	78,98	67,87	73,77	0,00	78,15	21,85	270
Garut	64,11	66,65	44,42	80,97	63,52	71,18	4,28	90,02	5,70	421
Tasikmalaya	66,07	69,34	46,82	86,31	59,48	69,58	0,85	94,87	4,27	351
Ciamis	67,30	69,81	51,05	82,50	61,45	74,88	0,00	88,37	11,63	258

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Kuningan	63,47	64,60	50,83	76,73	57,26	70,80	0,83	94,74	4,43	361
Cirebon	67,43	70,52	55,78	80,72	53,93	73,85	0,24	90,78	8,98	412
Majalengka	65,97	67,53	51,09	81,62	57,86	74,62	0,30	91,52	8,18	330
Sumedang	66,55	67,49	49,66	82,25	61,68	78,42	0,72	89,49	9,78	276
Indramayu	68,36	69,91	60,14	79,48	53,64	76,72	0,00	88,35	11,65	309
Subang	67,29	68,40	56,83	75,23	62,40	78,28	0,41	88,11	11,48	244
Purwakarta	65,97	67,84	53,59	80,24	59,29	69,02	0,00	90,71	9,29	183
Karawang	66,07	69,39	58,22	73,32	54,47	72,39	0,34	89,23	10,44	297
Bekasi	72,08	75,79	59,51	84,12	63,66	76,00	0,00	65,38	34,62	182
Bandung Barat	67,15	70,37	49,00	79,46	68,66	75,01	1,82	78,79	19,39	165
Pangandaran	65,36	62,73	52,31	81,56	60,90	77,60	5,38	84,95	9,68	93
Banjar	70,45	74,21	51,02	87,76	66,13	76,17	0,00	100,00	0,00	16
<b>Jawa Barat</b>	<b>66,45</b>	<b>68,40</b>	<b>51,87</b>	<b>80,90</b>	<b>59,88</b>	<b>73,92</b>	<b>1,82</b>	<b>86,90</b>	<b>11,28</b>	<b>5.319</b>

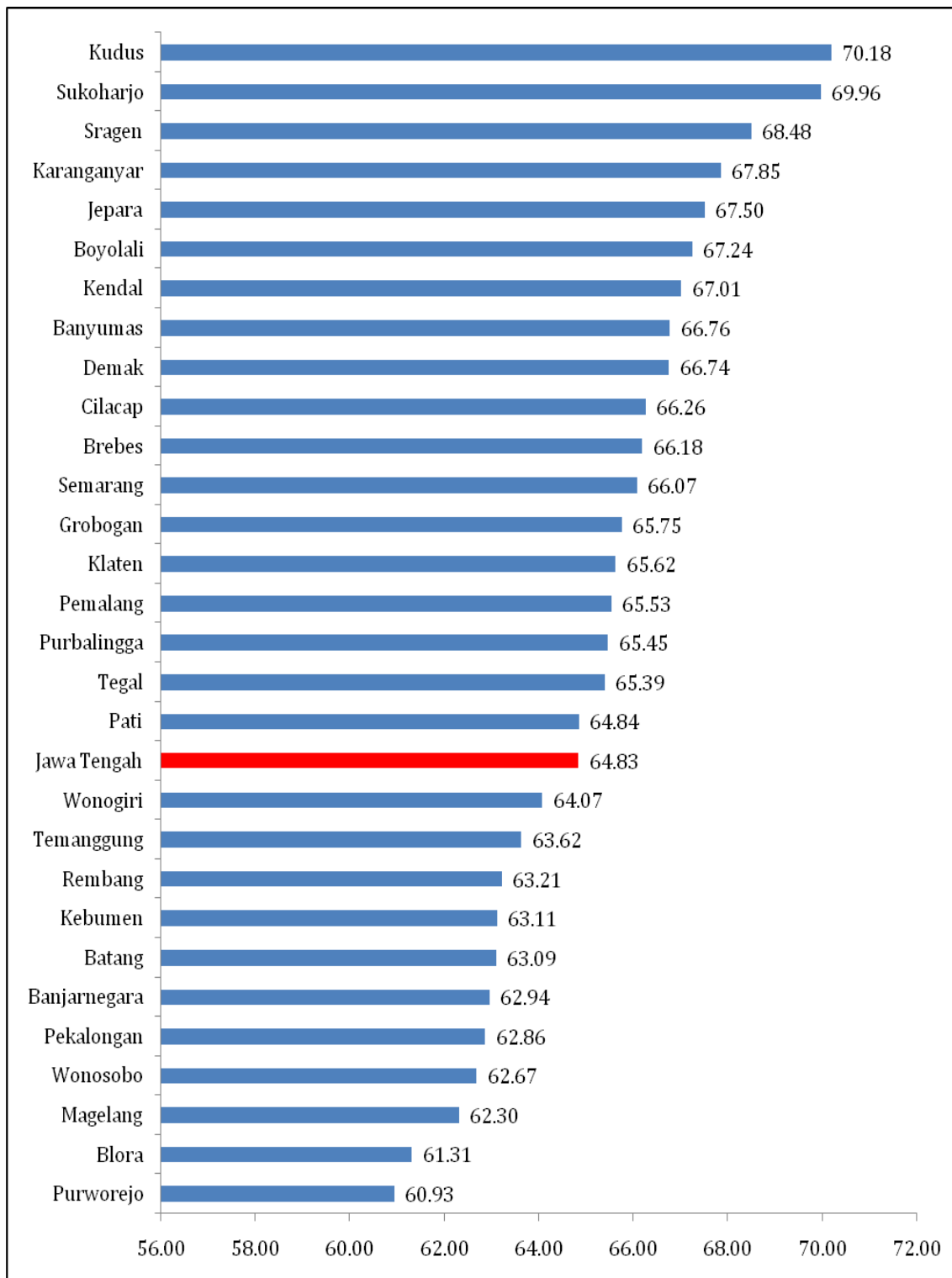
## 12. Provinsi Jawa Tengah

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 64,83, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Jumlah desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 7.809 desa, sebanyak 123 desa masih berada dalam kategori desa tertinggal, 7.021 desa (89,91%) berada dalam kategori desa berkembang, dan 665 desa (8,52%) berada dalam kategori desa mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Jawa Tengah memiliki

nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 78,55, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 49,75. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 67,86, dimensi pelayanan umum sebesar 54,95, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 74,92.





Gambar 2.21. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata yang terendah di Provinsi Jawa Tengah ada di Kabupaten Purworejo dengan nilai indeks rata-rata sebesar 60,93 dengan jumlah desa sebanyak 469 desa. Kabupaten ini memiliki jumlah desa tertinggal paling banyak. Rata-rata

Indeks Pembangunan Desa paling rendah di Provinsi Jawa Tengah ada di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus memiliki nilai rata-rata indeks sebesar 70,18 dengan jumlah desa sebanyak 123 desa. Dari 123 desa tersebut sebanyak 93 desa merupakan desa berkembang

dan 30 desa merupakan desa mandiri, tidak ada lagi desa dalam kategori desa tertinggal di kabupaten ini.

Beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak memiliki desa dalam kategori tertinggal. Beberapa kabupaten

tersebut yaitu: Kabupaten Kudus, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Banyumas, Demak, Semarang, dan Batang. Jumlah desa mandiri yang paling banyak terdapat di Kabupaten Boyolali dengan jumlah desa mandiri sebanyak 45 desa.

Tabel 2.20. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Cilacap	66,26	66,62	52,42	81,70	58,01	76,58	2,60	87,73	9,67	269
Banyumas	66,76	67,70	51,30	83,48	56,64	78,63	0,00	90,37	9,63	301
Purbalingga	65,45	68,40	50,75	81,22	55,29	71,38	0,45	92,41	7,14	224
Banjarnegara	62,94	64,61	42,39	83,09	55,94	74,90	1,88	92,48	5,64	266
Kebumen	63,11	67,35	48,57	76,63	49,74	72,16	1,34	95,77	2,90	449
Purworejo	60,93	63,64	44,22	78,67	49,19	70,17	4,69	92,96	2,35	469
Wonosobo	62,67	64,10	44,07	80,85	53,86	76,30	1,69	94,49	3,81	236
Magelang	62,30	66,75	44,95	79,22	52,52	67,30	4,36	87,47	8,17	367
Boyolali	67,24	69,82	49,16	81,17	60,09	82,55	0,38	82,38	17,24	261
Klaten	65,62	72,30	52,15	70,01	57,99	76,25	0,51	91,56	7,93	391
Sukoharjo	69,96	72,75	57,59	78,19	60,86	84,02	0,00	75,33	24,67	150
Wonogiri	64,07	69,98	45,16	76,55	58,09	72,79	0,40	94,42	5,18	251
Karanganyar	67,85	71,54	53,56	76,81	62,98	78,00	0,00	82,72	17,28	162
Sragen	68,48	71,54	54,63	79,30	57,93	81,76	0,00	84,18	15,82	196
Grobogan	65,75	67,89	52,17	75,04	55,98	83,24	1,10	89,01	9,89	273
Blora	61,31	65,05	48,90	71,09	51,61	70,31	4,43	91,14	4,43	271
Rembang	63,21	65,35	50,77	80,23	48,35	68,71	0,70	94,77	4,53	287
Pati	64,84	67,57	55,27	74,00	55,61	70,94	1,75	87,78	10,47	401
Kudus	70,18	74,09	58,87	79,11	59,35	78,82	0,00	75,61	24,39	123
Jepara	67,50	70,68	54,28	78,97	59,43	75,25	1,09	83,70	15,22	184
Demak	66,74	71,49	53,97	75,81	54,06	77,88	0,00	87,65	12,35	243
Semarang	66,07	70,02	48,53	84,18	52,17	74,94	0,00	92,79	7,21	208
Temanggung	63,62	66,67	44,48	82,27	54,85	72,70	0,75	94,36	4,89	266
Kendal	67,01	68,43	51,84	82,47	55,78	80,21	0,38	86,09	13,53	266
Batang	63,09	66,12	45,73	78,32	56,80	72,05	0,00	95,40	4,60	239
Pekalongan	62,86	65,53	47,33	75,83	53,87	75,59	5,88	89,71	4,41	272
Pemalang	65,53	66,45	49,53	81,94	58,82	75,89	2,37	89,57	8,06	211
Tegal	65,39	68,75	51,67	78,33	52,53	75,75	1,42	92,17	6,41	281
Brebes	66,18	67,86	52,27	82,10	53,74	76,07	1,37	89,38	9,25	292
Jawa Tengah	64,83	67,86	49,75	78,55	54,95	74,92	1,58	89,91	8,52	7.809

### 13. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

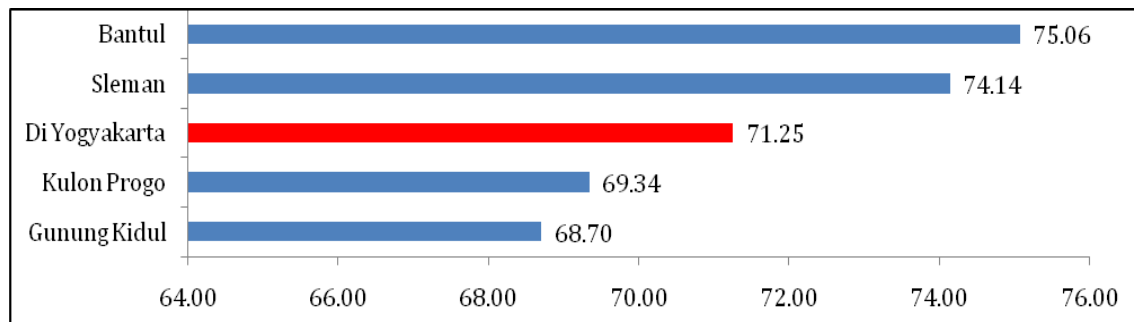
Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 71,25, lebih besar dibandingkan rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara

nasional. Jumlah desa yang ada di Provinsi D.I.Yogyakarta sebanyak 392 desa terdiri dari 266 desa (67,86%) dalam kategori desa berkembang dan 126 desa (32,14%) dalam

kategori desa mandiri. Provinsi D.I.Yogyakarta tidak memiliki desa tertinggal.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi D.I.Yogyakarta memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai rata-rata indeks 80,64, sedangkan

untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 55,18. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 78,63, dimensi pelayanan umum sebesar 62,76, dan dimensi aksesibilitas/transportasi sebesar 78,87.



Gambar 2.22. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata yang tertinggi di Provinsi D.I.Yogyakarta ada di Kabupaten Bantul dengan nilai indeks rata-rata sebesar 75,06. Jumlah desa di Kabupaten Bantul adalah sebanyak 75 desa dengan jumlah desa berkembang sebanyak 34 desa dan desa mandiri sebanyak 41 desa. Jumlah desa mandiri di Provinsi D.I.Yogyakarta

terdapat di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata terendah di Provinsi D.I.Yogyakarta ada di Kabupaten Gunungkidul dengan nilai indeks rata-rata sebesar 68,70. Jumlah desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 144 desa dengan jumlah desa berkembang sebanyak 115 desa dan desa mandiri sebanyak 29 desa.

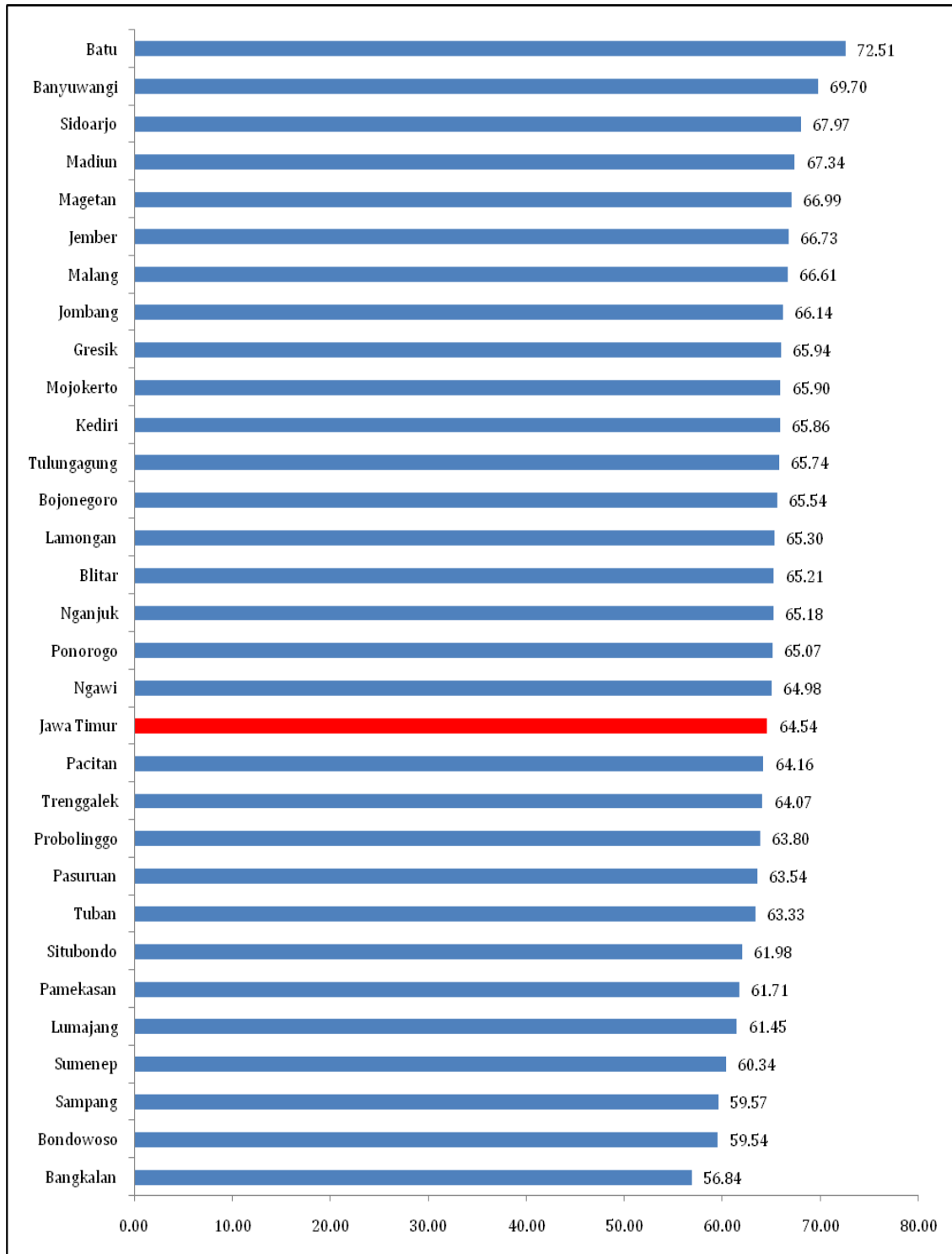
Tabel 2.21. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Kulon Progo	69,34	77,95	51,68	80,29	54,63	78,69	0,00	82,76	17,24	87
Bantul	75,06	80,74	60,19	82,65	68,98	84,43	0,00	45,33	54,67	75
Gunungkidul	68,70	76,69	50,01	79,71	59,74	76,46	0,00	79,86	20,14	144
Sleman	74,14	80,74	63,01	72,75	70,62	86,32	0,00	52,33	47,67	86
Daerah Istimewa Yogyakarta	71,25	78,63	55,18	78,87	62,76	80,64	0,00	67,86	32,14	392

#### 14. Provinsi Jawa Timur

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 64,54 dari keseluruhan jumlah desa sebanyak 7.723 desa. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut, 208

desa diantaranya dalam kategori desa tertinggal (2,69%), 6.822 desa dalam kategori desa berkembang (88,33%), dan 693 desa lainnya dalam kategori desa mandiri (8,97%).



Gambar 2.23. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Jawa Timur memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 75,92, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 51,45.

Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 68,55, dimensi pelayanan umum sebesar 53,36, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 72,80.

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Jawa Timur yang tertinggi ada di Kota Batu dengan nilai indeks rata-rata sebesar

72,51. Hal ini juga dipengaruhi dengan jumlah desa di Kota Batu yang relatif sedikit, yaitu sejumlah 19 desa. 13 desa diantaranya dalam kategori desa berkembang, sedangkan 6 desa lainnya dalam kategori desa mandiri. Selain Kota Batu, beberapa kabupaten juga sudah tidak memiliki desa dalam kategori desa tertinggal. Beberapa kabupaten tersebut yaitu Kabupaten/Kota Pacitan, Gresik, Magetan, dan

Banyuwangi. Untuk rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Jawa Timur paling rendah ada di Kabupaten Bangkalan dengan nilai rata-rata indeks sebesar 56,84. Di Kabupaten Bangkalan ini pula jumlah desa tertinggal paling banyak diantara semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.22. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur

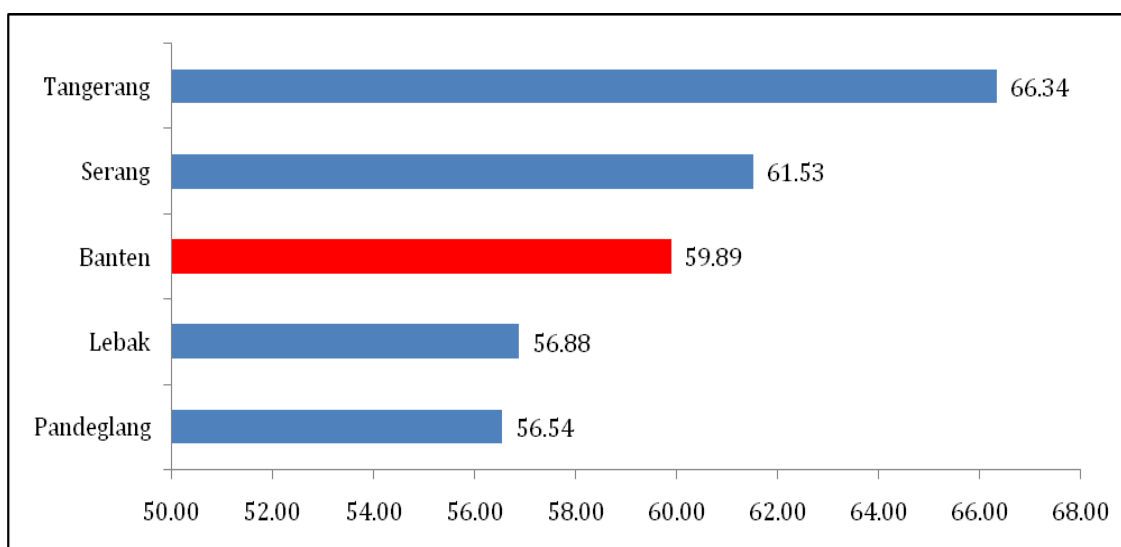
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Pacitan	64,16	66,41	44,88	82,86	57,82	73,50	0,00	95,78	4,22	166
Ponorogo	65,07	68,11	50,13	76,53	53,86	80,40	1,42	89,68	8,90	281
Trenggalek	64,07	67,83	45,43	78,04	55,22	78,72	3,95	84,21	11,84	152
Tulungagung	65,74	69,47	53,38	71,67	58,48	79,36	1,56	86,77	11,67	257
Blitar	65,21	68,69	51,00	73,72	60,27	76,72	0,45	92,73	6,82	220
Kediri	65,86	70,13	55,35	73,13	55,05	74,60	0,58	88,63	10,79	343
Malang	66,61	69,15	52,18	81,69	56,37	74,52	1,86	81,96	16,18	377
Lumajang	61,45	66,37	46,89	72,53	52,64	68,53	5,05	91,92	3,03	198
Jember	66,73	73,74	50,11	74,90	58,86	76,87	0,44	88,05	11,50	226
Banyuwangi	69,70	73,50	56,44	79,39	62,06	78,55	0,00	77,25	22,75	189
Bondowoso	59,54	68,18	40,37	72,78	46,38	66,46	8,13	90,43	1,44	209
Situbondo	61,98	67,79	48,03	74,79	47,12	67,79	9,09	82,58	8,33	132
Probolinggo	63,80	68,82	46,51	79,97	47,82	74,59	2,77	89,85	7,38	325
Pasuruan	63,54	67,43	50,41	80,35	52,32	62,13	3,52	88,27	8,21	341
Sidoarjo	67,97	73,10	57,72	75,09	55,76	75,26	0,31	81,99	17,70	322
Mojokerto	65,90	70,08	55,66	71,94	51,89	79,84	0,67	89,63	9,70	299
Jombang	66,14	71,45	55,52	74,72	51,73	73,28	0,33	89,07	10,60	302
Nganjuk	65,18	68,90	54,34	73,95	49,73	78,20	2,65	90,15	7,20	264
Madiun	67,34	70,49	55,69	75,94	57,94	78,29	1,01	87,88	11,11	198
Magetan	66,99	70,88	54,17	77,91	54,43	77,23	0,00	92,27	7,73	207
Ngawi	64,98	68,97	52,96	69,84	56,87	79,86	0,94	86,85	12,21	213
Bojonegoro	65,54	65,14	54,30	78,49	55,79	78,34	0,95	90,93	8,11	419
Tuban	63,33	63,02	53,91	74,65	54,09	74,19	2,57	90,68	6,75	311
Lamongan	65,30	70,45	53,17	72,04	53,89	76,80	0,43	90,69	8,87	462
Gresik	65,94	69,78	55,86	74,08	55,67	72,83	0,00	87,58	12,42	330
Bangkalan	56,84	61,84	45,71	76,39	43,08	44,87	16,12	83,52	0,37	273
Sampang	59,57	67,14	43,00	80,58	46,01	49,54	7,78	91,11	1,11	180
Pamekasan	61,71	69,07	49,15	77,44	45,35	55,75	3,93	94,38	1,69	178
Sumenep	60,34	63,24	44,00	77,20	48,55	69,77	8,79	88,48	2,73	330
Batu	72,51	74,45	58,02	87,86	60,52	83,56	0,00	68,42	31,58	19
<b>Jawa Timur</b>	<b>64,54</b>	<b>68,55</b>	<b>51,45</b>	<b>75,92</b>	<b>53,36</b>	<b>72,80</b>	<b>2,69</b>	<b>88,33</b>	<b>8,97</b>	<b>7.723</b>

## 15. Provinsi Banten

Provinsi Banten memiliki Indeks Pembangunan Desa rata-rata sebesar 59,89 dengan jumlah desa sebanyak 1.238 desa. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut jumlah desa tertinggal adalah sebanyak 158 desa (12,76%), jumlah desa berkembang sebanyak 1.022 desa (82,55%), dan jumlah desa mandiri sebanyak 58 desa (4,68%).

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Banten memiliki nilai

rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 75,56, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 44,67. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 63,01, dimensi pelayanan umum sebesar 50,97, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 65,47.



Gambar 2.24. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Banten

Kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang paling tinggi adalah Kabupaten Tangerang dengan nilai indeks rata-rata sebesar 66,34. Kabupaten Tangerang juga satu-satunya kabupaten di Provinsi Banten yang sudah tidak lagi memiliki desa tertinggal. Jumlah desa mandiri yang ada di Provinsi Banten paling banyak berada di Kabupaten Tangerang, yaitu

sebanyak 31 desa mandiri. Sedangkan untuk nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang paling rendah adalah di Kabupaten Pandeglang. Kabupaten ini memiliki rata-rata nilai indeks sebesar 56,54 dengan jumlah desa sebanyak 326 desa. Dari 326 desa tersebut, 4 desa dalam kategori desa mandiri, 251 desa dalam kategori desa berkembang, dan 71 desa dalam kategori tertinggal.

Tabel 2.23. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Banten

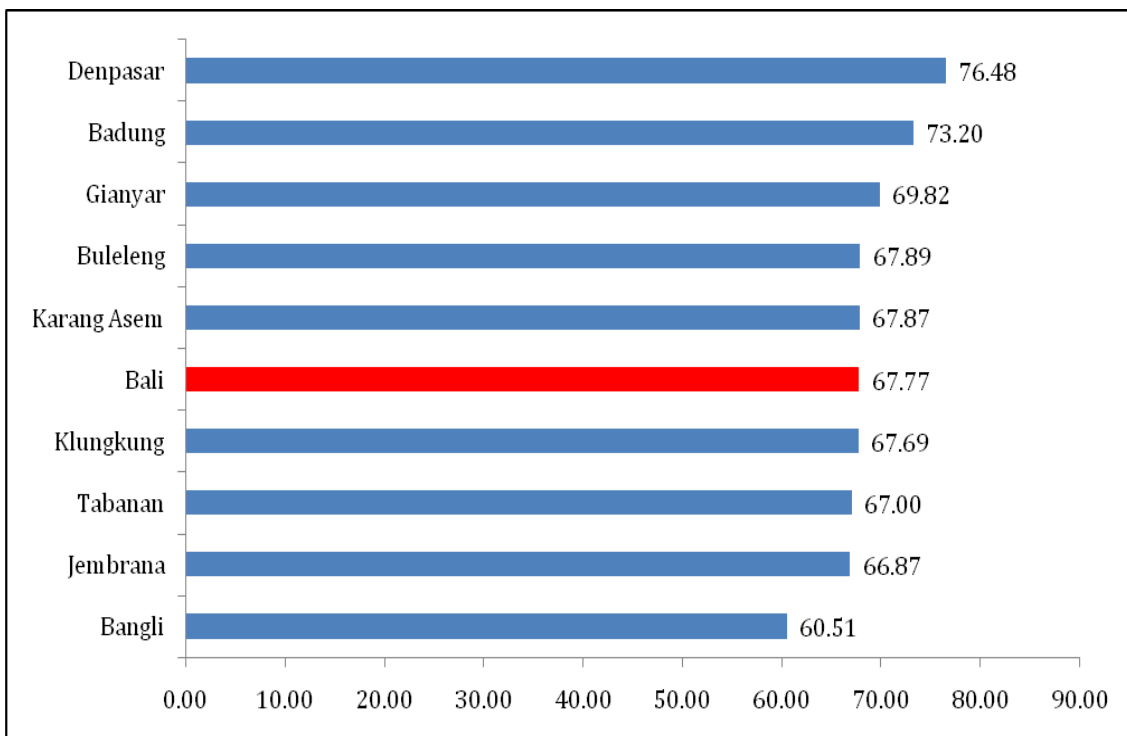
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Pandeglang	56,54	59,47	38,47	73,27	50,74	64,16	21,78	76,99	1,23	326
Lebak	56,88	57,03	39,14	80,85	49,90	59,65	22,65	77,06	0,29	340
Tangerang	66,34	71,99	54,55	74,56	55,20	72,50	0,00	87,40	12,60	246
Serang	61,53	66,00	49,20	73,07	49,11	67,54	3,07	90,18	6,75	326
Banten	59,89	63,01	44,67	75,56	50,97	65,47	12,76	82,55	4,68	1.238

## 16. Provinsi Bali

Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata di Provinsi Bali adalah sebesar 67,77 dengan jumlah desa sejumlah 636 desa. Dari 636 desa tersebut sebanyak 6 desa (0,94%) desa dalam kategori desa tertinggal, 530 desa (83,33%) dalam kategori desa berkembang, dan 100 desa (15,72%) dalam kategori desa mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Bali memiliki nilai

rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 79,92, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 55,78. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 71,83, dimensi pelayanan umum sebesar 56,46, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 72,02.



Gambar 2.25. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Bali

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang tertinggi di Provinsi Bali ada di Kota Denpasar dengan nilai rata-rata indeks sebesar 76,48. Di kota ini, dari 27 desa, terdapat 11 desa dalam kategori desa berkembang, dan 16 desa lainnya dalam kategori desa mandiri. Tidak ada lagi desa dalam kategori tertinggal di Kota Denpasar. Untuk rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang paling rendah ada di Kabupaten Bangli dengan nilai indeks sebesar 60,51. Kabupaten ini memiliki 5 desa dalam

kategori desa tertinggal. Jumlah ini adalah jumlah desa tertinggal yang paling banyak diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Bali.

Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah tidak lagi memiliki desa dalam kategori desa tertinggal. Hanya ada dua kabupaten yang masih memiliki desa tertinggal, yaitu Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng. Secara keseluruhan, desa-desa di Provinsi Bali didominasi oleh desa-desa dalam kategori desa berkembang.



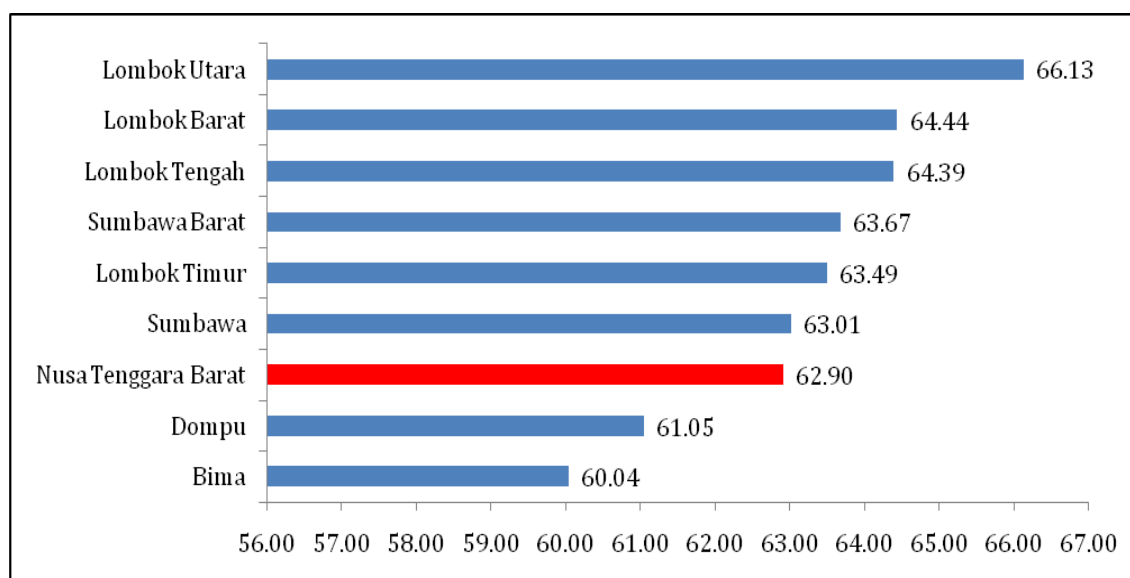
Tabel 2.24. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Bali

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Jembrana	66,87	71,67	54,44	78,90	54,17	71,55	0,00	90,24	9,76	41
Tabanan	67,00	70,84	53,67	81,12	53,08	73,91	0,00	87,22	12,78	133
Badung	73,20	75,92	66,43	78,97	63,96	79,19	0,00	63,04	36,96	46
Gianyar	69,82	75,61	64,70	70,46	60,79	72,21	0,00	76,56	23,44	64
Klungkung	67,69	72,55	52,27	83,26	53,50	73,90	0,00	88,68	11,32	53
Bangli	60,51	66,18	42,69	72,11	52,34	71,31	7,35	91,18	1,47	68
Karang Asem	67,87	71,58	52,32	88,64	53,49	68,31	0,00	90,67	9,33	75
Buleleng	67,89	70,45	55,56	83,13	58,94	69,21	0,78	86,05	13,18	129
Denpasar	76,48	81,02	79,49	73,20	66,04	72,51	0,00	40,74	59,26	27
<b>Bali</b>	<b>67,77</b>	<b>71,83</b>	<b>55,78</b>	<b>79,92</b>	<b>56,46</b>	<b>72,02</b>	<b>0,94</b>	<b>83,33</b>	<b>15,72</b>	<b>636</b>

## 17. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 62,90, di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Jumlah desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 995

desa. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut, sebanyak 36 desa (3,62%) dalam kategori desa tertinggal, 917 desa (92,16%) dalam kategori desa berkembang, dan 42 desa (4,22%) dalam kategori desa mandiri.



Gambar 2.26. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 79,70, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 44,65. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 67,46, dimensi

pelayanan umum sebesar 51,31, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 71,73.

Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang paling tinggi ada di Kabupaten Lombok Utara dengan nilai rata-rata indeks sebesar 66,13 dengan jumlah desa sebanyak 33 desa. Dari 33 desa tersebut tidak ada desa tertinggal. Sebanyak 27 desa dalam kategori desa berkembang, dan sisanya sebanyak 6 desa dalam kategori desa mandiri. Kabupaten

Lombok Utara merupakan satu-satunya kabupaten yang sudah tidak memiliki desa tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang paling rendah ada di Kabupaten Bima. Kabupaten ini memiliki nilai indeks

sebesar 60,04 dengan jumlah desa sebanyak 191 desa. Jumlah desa tertinggal yang ada di kabupaten ini adalah 15 desa yang merupakan jumlah desa tertinggal paling banyak dibandingkan dengan di kabupaten lain.

Tabel 2.25. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Barat

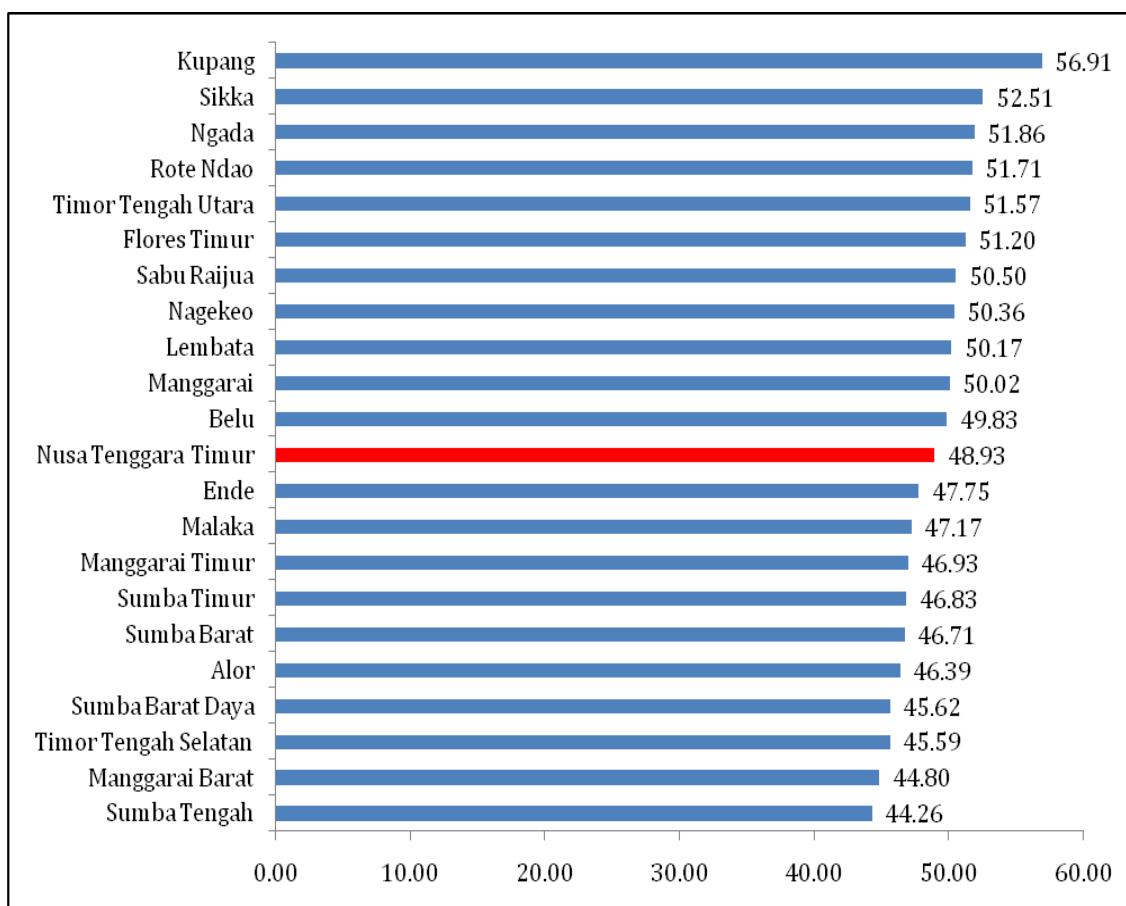
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Lombok Barat	64,44	72,15	48,13	76,74	51,35	69,19	1,68	88,24	10,08	119
Lombok Tengah	64,39	74,14	44,74	75,72	51,50	72,45	2,36	92,91	4,72	127
Lombok Timur	63,49	69,52	47,64	74,40	50,63	74,65	1,26	94,56	4,18	239
Sumbawa	63,01	63,21	42,88	85,11	59,30	71,45	4,46	93,63	1,91	157
Dompu	61,05	61,91	40,79	87,61	48,00	68,78	6,94	93,06	0,00	72
Bima	60,04	62,52	40,08	83,56	45,01	69,94	7,85	90,58	1,57	191
Sumbawa Barat	63,67	66,90	48,17	78,96	55,15	69,87	1,75	94,74	3,51	57
Lombok Utara	66,13	71,80	47,26	80,02	54,57	78,49	0,00	81,82	18,18	33
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>62,90</b>	<b>67,46</b>	<b>44,65</b>	<b>79,70</b>	<b>51,31</b>	<b>71,73</b>	<b>3,62</b>	<b>92,16</b>	<b>4,22</b>	<b>995</b>

## 18. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 48,93. Jumlah desa yang ada di provinsi ini adalah sebanyak 2.950 desa. Sebanyak 1.548 desa (52,47%) dalam kategori desa tertinggal, 1.400 desa (47,46%) dalam kategori desa berkembang, dan 2 desa dalam kategori desa mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai rata-rata indeks tertinggal pada

dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 79,35, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 26,41. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 46,72, dimensi pelayanan umum sebesar 38,26, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 61,53.



Gambar 2.27. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten yang memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Desa paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kabupaten Kupang dengan nilai rata-rata indeks sebesar 56,91 dengan jumlah desa sebanyak 159 desa. Meskipun nilai indeks rata-rata Kabupaten Kupang masih di atas nilai indeks rata-rata secara nasional, namun di kabupaten ini belum ada desa dalam kategori mandiri. 159 desa yang ada di Kabupaten Kupang terdiri dari 25

desa dalam kategori tertinggal dan 134 desa dalam kategori desa berkembang. Untuk rata-rata Indeks Pembangunan Desa paling rendah adalah Kabupaten Sumba Tengah dengan nilai rata-rata indeks sebesar 44,26 dengan jumlah desa sebanyak 65 desa. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagian besar dari kabupaten yang ada belum memiliki desa mandiri.

Tabel 2.26. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Sumba Barat	46,71	44,73	22,59	82,11	35,99	52,98	63,49	36,51	0,00	63
Sumba Timur	46,83	43,27	22,06	80,91	39,05	58,89	58,57	41,43	0,00	140
Kupang	56,91	67,83	29,88	78,14	38,58	65,47	15,72	84,28	0,00	159
Timor Tengah Selatan	45,59	39,90	25,32	79,62	35,97	55,50	69,92	29,70	0,38	266
Timor Tengah Utara	51,57	49,62	28,22	82,24	39,00	66,70	40,00	60,00	0,00	160
Belu	49,83	48,65	27,38	82,49	34,80	59,36	53,62	44,93	1,45	69
Alor	46,39	44,12	24,01	70,72	37,52	68,38	62,03	37,97	0,00	158

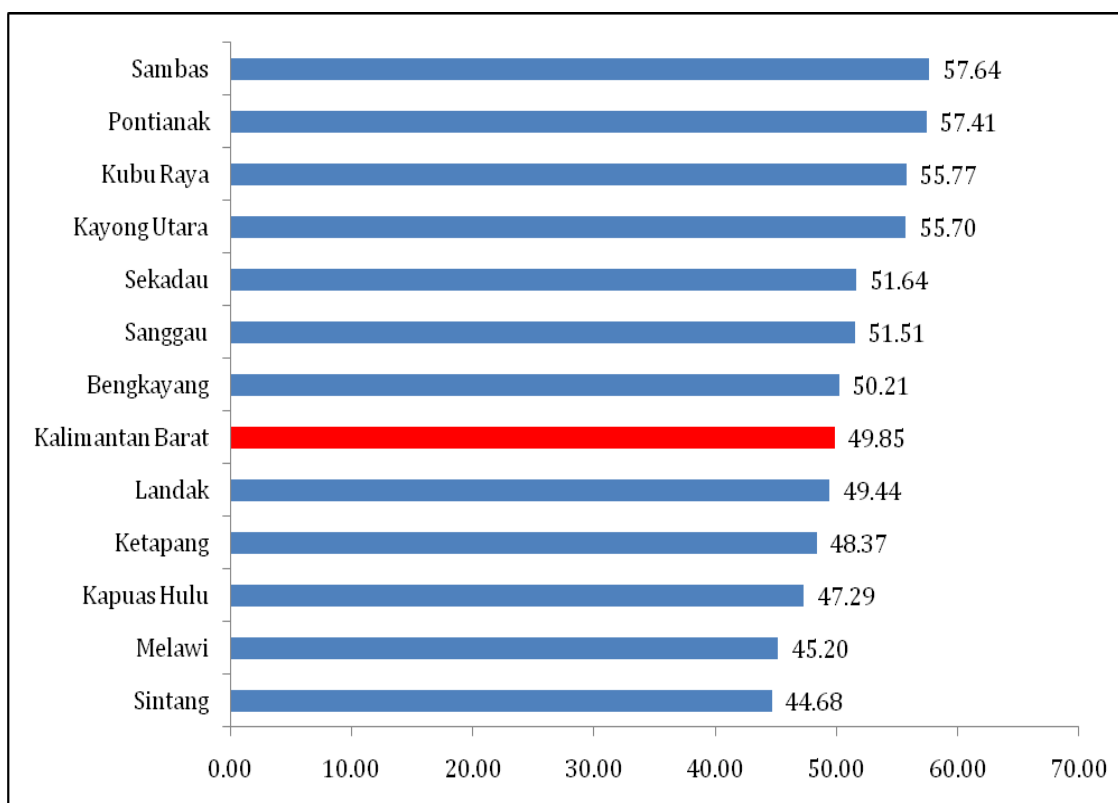
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Lembata	50,17	43,96	27,50	86,72	34,76	68,36	53,47	46,53	0,00	144
Flores Timur	51,20	49,85	28,29	80,87	41,09	62,99	43,23	56,77	0,00	229
Sikka	52,51	52,90	27,10	83,33	37,71	67,38	31,97	68,03	0,00	147
Ende	47,75	40,63	27,06	80,74	39,84	63,22	58,82	41,18	0,00	255
Ngada	51,86	46,03	31,72	84,23	41,26	65,99	36,30	63,70	0,00	135
Manggarai	50,02	45,91	26,08	87,88	41,16	55,83	43,45	56,55	0,00	145
Rote Ndao	51,71	58,18	29,12	72,30	34,94	62,94	23,17	76,83	0,00	82
Manggarai Barat	44,80	36,31	27,64	77,61	38,32	55,10	74,39	25,61	0,00	164
Sumba Tengah	44,26	41,04	22,28	73,49	38,97	55,42	76,92	23,08	0,00	65
Sumba Barat Daya	45,62	47,69	21,37	71,26	37,43	55,87	68,22	31,78	0,00	129
Nagekeo	50,36	46,55	27,52	77,90	45,60	67,97	48,45	51,55	0,00	97
Manggarai Timur	46,93	43,82	23,71	79,07	42,18	54,68	63,52	36,48	0,00	159
Sabu Raijua	50,50	63,99	26,89	61,29	30,31	64,86	43,86	56,14	0,00	57
Malaka	47,17	46,12	25,43	76,81	30,22	62,25	62,20	37,80	0,00	127
Nusa Tenggara Timur	48,93	46,72	26,41	79,35	38,26	61,53	52,47	47,46	0,07	2.950

## 19. Provinsi Kalimantan Barat

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 49,85. Jumlah desa yang ada di provinsi ini sebanyak 1.908 desa. Dari total 1908 unit desa terdapat 50,58% desa dengan kategori tertinggal; 48,27% berkembang; dan sisanya 0,64% berkategori mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Kalimantan Barat

memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 69,07, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 31,25. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 47,79, dimensi pelayanan umum sebesar 54,50, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 58,49.



Gambar 2.28. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten dengan proporsi desa tertinggal paling banyak ada di Kabupaten Melawi sebanyak 68,64% atau sebanyak 116 unit desa. Sementara kabupaten dengan proporsi desa tertinggal paling sedikit ada di Kota Pontianak sebanyak 15% atau sebanyak 9

unit Desa. Sementara kabupaten dengan desa mandiri terbanyak ada di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 4,31% atau sebanyak 5 unit desa. Sementara kabupaten dengan desa mandiri paling sedikit ada di Kabupaten Melawi, Ketapang, dan Mempawah.

Tabel 2.27. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat

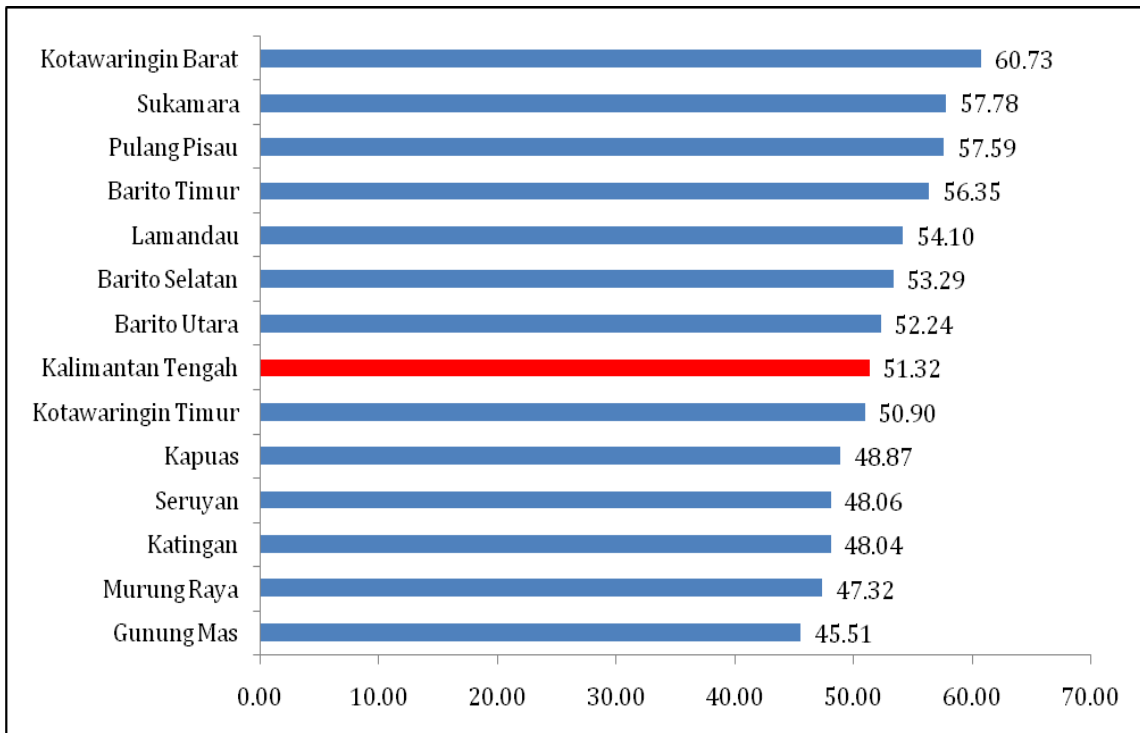
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Sambas	57,64	57,87	40,62	76,16	59,52	59,80	17,10	80,83	2,07	193
Bengkayang	50,21	48,97	30,62	75,12	50,92	52,02	45,90	54,10	0,00	122
Landak	49,44	49,45	27,28	73,60	50,62	54,39	55,77	43,59	0,64	156
Mempawah	57,41	60,30	37,78	77,80	58,09	55,35	15,00	85,00	0,00	60
Sanggau	51,51	49,11	32,16	73,76	56,03	57,34	50,92	46,01	3,07	163
Ketapang	48,37	46,56	32,13	65,88	54,18	52,80	54,58	45,42	0,00	240
Sintang	44,68	36,96	28,77	63,32	53,28	61,22	70,11	29,18	0,71	281
Kapuas Hulu	47,29	43,61	29,38	66,51	51,18	59,96	60,07	39,21	0,72	278
Sekadau	51,64	54,24	30,86	66,44	56,48	59,45	48,28	49,43	2,30	87
Melawi	45,20	40,37	25,54	61,94	53,07	65,99	68,64	31,36	0,00	169
Kayong Utara	55,70	60,72	34,23	72,55	58,21	56,32	23,26	74,42	2,33	43
Kubu Raya	55,77	59,20	33,10	71,37	61,93	62,63	29,31	66,38	4,31	116
Kalimantan Barat	49,85	47,79	31,25	69,07	54,50	58,49	50,58	48,27	1,15	1.908

## 20. Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai indeks sebesar 51,32. Dari total 1434 unit desa terdapat 40,86% desa dengan klasifikasi tertinggal; 58,44% berkembang; dan sisanya 0,7% berkategori mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada

dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 66,06, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 29,00. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 55,09, dimensi pelayanan umum sebesar 54,51, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 60,93.



Gambar 2.29. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten dengan proporsi desa tertinggal paling banyak ada di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 63, 48% atau sebanyak 73 unit desa. Sementara kabupaten dengan proporsi desa tertinggal paling sedikit ada di Kabupaten Sukamara sebanyak 6,90% atau sebanyak 2 unit desa. Sementara Kabupaten

dengan desa mandiri terbanyak ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 4,94% atau sebanyak 4 unit desa. Sementara kabupaten dengan desa mandiri paling sedikit ada di Kabupaten Gunung Mas; Murung raya; Kapuas; Kotawaringin Timur; Lamandau; Pulau Pisang; Sukamara.

Tabel 2.28. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Kotawaringin Barat	60,73	63,76	41,93	71,59	65,07	70,50	9,88	85,19	4,94	81
Kotawaringin Timur	50,90	52,78	29,18	66,78	53,14	63,66	42,26	57,74	0,00	168
Kapuas	48,87	51,07	28,51	64,74	51,78	56,84	45,79	54,21	0,00	214
Barito Selatan	53,29	56,78	28,70	69,50	57,50	65,29	34,88	62,79	2,33	86

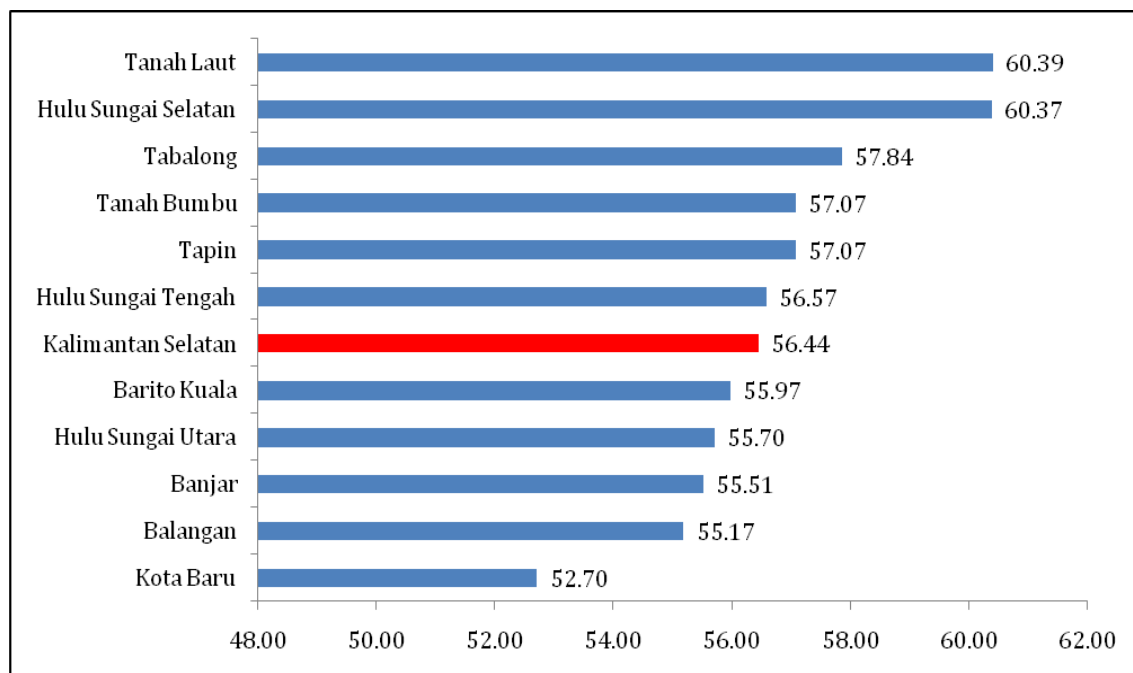
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Barito Utara	52,24	58,09	24,44	67,10	58,76	64,81	38,71	60,22	1,08	93
Sukamara	57,78	63,54	39,25	70,19	58,24	59,74	6,90	93,10	0,00	29
Lamandau	54,10	62,60	27,87	66,66	54,32	65,70	31,76	68,24	0,00	85
Seruyan	48,06	44,10	29,47	66,84	56,27	59,63	50,52	48,45	1,03	97
Katingan	48,04	55,32	25,27	59,94	53,19	51,58	56,49	42,86	0,65	154
Pulang Pisau	57,59	62,46	32,41	75,18	60,42	65,56	15,79	84,21	0,00	95
Gunung Mas	45,51	44,72	23,64	64,48	46,19	62,40	63,48	36,52	0,00	115
Barito Timur	56,35	58,74	40,91	70,99	54,10	59,84	23,76	75,25	0,99	101
Murung Raya	47,32	58,52	19,50	55,98	51,84	57,49	56,90	43,10	0,00	116
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>51,32</b>	<b>55,09</b>	<b>29,00</b>	<b>66,06</b>	<b>54,51</b>	<b>60,93</b>	<b>40,86</b>	<b>58,44</b>	<b>0,70</b>	<b>1.434</b>

## 21. Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai indeks sebesar 56,44. Dari total 1864 unit desa terdapat 20,92% desa dengan klasifikasi tertinggal; 78,17% berkembang; dan sisanya 0,91% berkategori mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada

dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 73,84. Sementara rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur sebesar 41,92. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 58,17, dimensi pelayanan umum sebesar 50,55, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 58,24.



Gambar 2.30. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten dengan proporsi desa tertinggal paling banyak ada di Kabupaten Kota Baru sebanyak 38,38% atau sebanyak 76 unit desa. Sementara kabupaten dengan proporsi desa tertinggal paling sedikit ada di Kabupaten

Tanah Laut sebanyak 6,15 % atau sebanyak 8 unit desa. Sementara kabupaten dengan desa mandiri terbanyak ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 4,83% atau sebanyak 7 unit desa.



Tabel 2.29. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Selatan

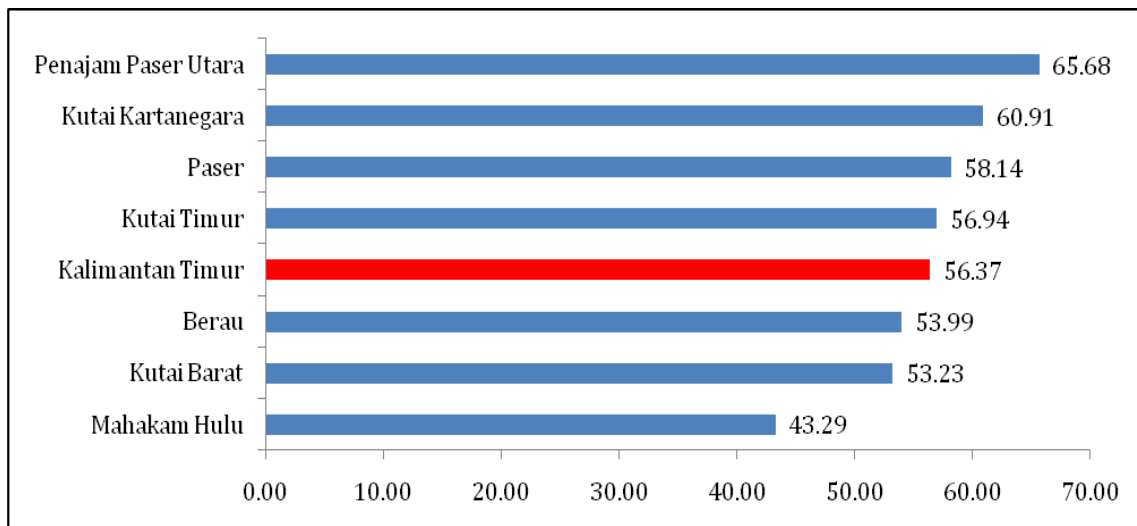
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Tanah Laut	60,39	64,05	47,26	72,35	53,77	64,13	6,15	93,85	0,00	130
Kota Baru	52,70	47,80	38,37	72,72	57,67	58,16	38,38	60,61	1,01	198
Banjar	55,51	59,72	37,60	76,90	46,97	52,90	23,83	75,81	0,36	277
Barito Kuala	55,97	60,10	37,27	74,37	48,56	59,88	20,00	80,00	0,00	195
Tapin	57,07	57,08	46,01	72,23	48,75	62,63	18,25	80,95	0,79	126
Hulu Sungai Selatan	60,37	65,40	44,73	74,62	48,68	66,64	9,03	90,28	0,69	144
Hulu Sungai Tengah	56,57	60,99	42,92	72,78	49,41	51,81	16,77	83,23	0,00	161
Hulu Sungai Utara	55,70	60,39	43,04	69,34	44,30	56,85	24,06	75,94	0,00	212
Tabalong	57,84	58,81	44,17	72,03	58,00	59,93	12,30	86,07	1,64	122
Tanah Bumbu	57,07	52,47	43,47	75,48	54,94	70,03	22,76	72,41	4,83	145
Balangan	55,17	54,27	43,87	78,18	50,59	45,61	25,32	72,73	1,95	154
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>56,44</b>	<b>58,17</b>	<b>41,92</b>	<b>73,84</b>	<b>50,55</b>	<b>58,24</b>	<b>20,92</b>	<b>78,17</b>	<b>0,91</b>	<b>1864</b>

## 22. Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai indeks sebesar 56,37. Dari total 833 unit desa, terdapat 23,17% desa dengan klasifikasi tertinggal; 74,31% berkembang; dan sisanya 2,52% berkategori mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Kalimantan Timur

memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 67,76, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 40,17. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 59,37, dimensi pelayanan umum sebesar 56,23, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 63,46.



Gambar 2.31. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten dengan proporsi desa tertinggal paling banyak ada di Kabupaten Mahakam Hulu sebanyak 68,64% atau sebanyak 34 unit desa. Sementara kabupaten

dengan desa mandiri terbanyak ada di Kabupaten Kutai Kertanegara sebanyak 4,66% atau sebanyak 9 unit desa.

Tabel 2.30. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Timur

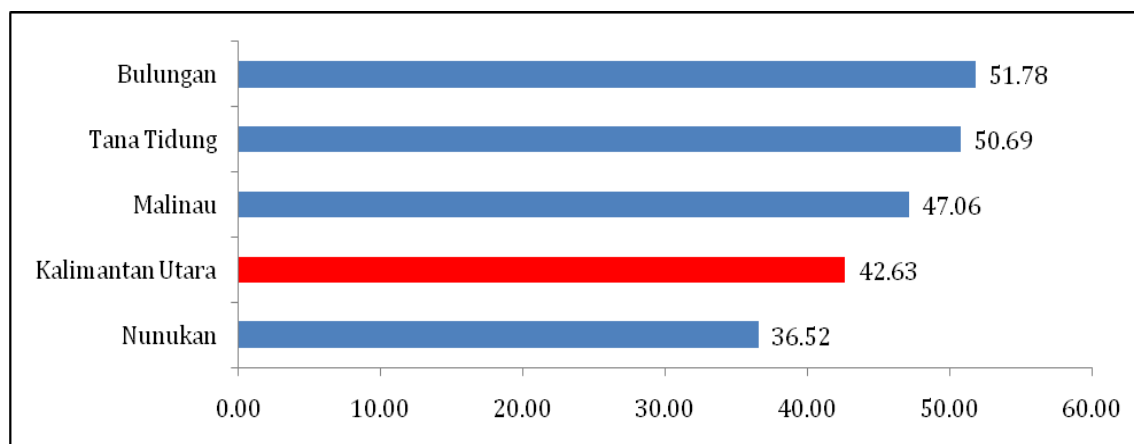
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Paser	58,14	62,33	41,91	71,12	55,82	61,26	17,27	79,14	3,60	139
Kutai Barat	53,23	54,71	34,58	67,98	54,73	62,93	31,58	67,37	1,05	190
Kutai Kartanegara	60,91	63,39	48,23	71,29	57,85	66,48	12,44	82,90	4,66	193
Kutai Timur	56,94	60,97	43,41	63,28	57,62	63,69	16,42	80,60	2,99	134
Berau	53,99	59,66	33,25	65,29	58,40	59,47	29,90	70,10	0,00	97
Penajam Paser Utara	65,68	66,94	50,63	80,98	64,12	69,75	0,00	96,67	3,33	30
Mahakam Hulu	43,29	45,36	23,94	52,83	44,12	63,27	68,00	32,00	0,00	50
Kalimantan Timur	56,37	59,46	40,17	67,76	56,23	63,46	23,17	74,31	2,52	833

### 23. Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai indeks sebesar 49,85. Dari total 447 unit desa terdapat 71,14% desa dengan klasifikasi tertinggal; 28,19% berkembang; dan sisanya 0,67% berkategori mandiri.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada

dimensi aksesibilitas/transportasi dengan nilai rata-rata indeks 59,54, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 25,42. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 41,36, dimensi pelayanan umum sebesar 48,24, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 49,07.



Gambar 2.32. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten dengan proporsi desa tertinggal paling banyak ada di Kabupaten Nunukan sebanyak 88,36% atau sebanyak 205 unit desa. Sementara kabupaten dengan proporsi desa tertinggal paling sedikit ada di

Kabupaten Tana Tidung sebanyak 46,88% atau sebanyak 15 unit desa. Sementara kabupaten dengan desa mandiri terbanyak ada di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 3,13% atau sebanyak 1 unit desa.

Tabel 2.31. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Utara

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Malinau	47,06	51,21	27,33	55,06	53,46	58,97	57,80	40,37	1,83	109
Bulungan	51,78	52,03	33,38	70,21	52,36	58,57	47,30	52,70	0,00	74
Tana Tidung	50,69	53,64	30,18	66,36	60,40	50,31	46,88	50,00	3,13	32

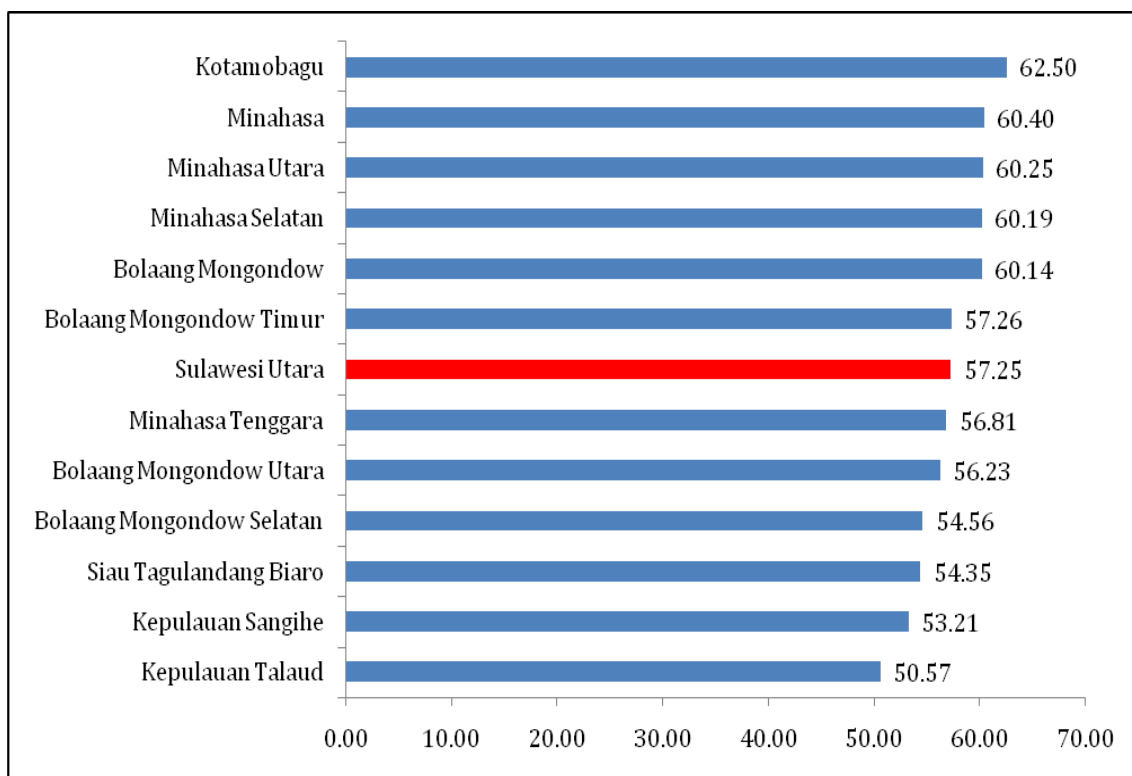
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Nunukan	36,52	31,62	21,33	57,30	42,79	41,23	88,36	11,64	0,00	232
Kalimantan Utara	42,63	41,36	25,42	59,54	48,24	49,07	71,14	28,19	0,67	447

#### 24. Provinsi Sulawesi Utara

Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 57,25, lebih tinggi dari angka rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Dengan jumlah desa di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.490 desa, 275 desa (18,46%) diantaranya dalam kategori desa tertinggal. Sebanyak 1.203 desa (80,74%) dalam kategori

desa berkembang, dan sisanya sebanyak 12 desa (0,81%) dalam kategori desa mandiri.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki nilai rata-rata indeks dengan kategori tertinggal pada dimensi kondisi infrastruktur dan pelayanan umum dengan nilai sebesar 40,56 dan 45,59. Sementara dimensi pelayanan dasar, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kategori berkembang dengan masing-masing nilai 57,04 dan 63,85.



Gambar 2.33. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara

Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 57,25, lebih tinggi dari angka rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Dengan jumlah desa di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.490 desa, 275 desa (18,46%) diantaranya dalam kategori desa tertinggal. Sebanyak 1.203 desa (80,74%) dalam kategori desa berkembang, dan sisanya sebanyak 12 desa (0,81%) dalam kategori desa mandiri.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki nilai rata-rata indeks dengan kategori tertinggal pada dimensi kondisi infrastruktur dan pelayanan umum dengan nilai sebesar 40,56 dan 45,59. Sementara dimensi pelayanan dasar, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kategori berkembang dengan masing-masing nilai 57,04 dan 63,85. Sementara dimensi aksesibilitas/transportasi dalam kategori mandiri dengan nilai sebesar 80,99. Terlihat

jika dimensi paling tinggi di Provinsi Sulawesi Utara adalah aksesibilitas/transportasi dan terendah adalah kondisi infrastruktur.

Nilai Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata yang paling tinggi ada di Kabupaten Kotamobagu dengan nilai rata-rata indeks sebesar 62,50. Dari 10 desa yang ada di Kabupaten Kotamobagu, 10 desa (100%) dalam kategori desa berkembang. Sementara tidak ada desa dalam kategori tertinggal maupun mandiri.

Untuk nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang paling rendah ada di Kabupaten

Kepulauan Talaud. Di kabupaten ini nilai rata-rata indeksnya sebesar 50,57. Jumlah desa yang ada sebanyak 142 desa yang terdiri dari 72 desa (50,70%) dalam kategori desa tertinggal, 70 desa (49,30%) dalam kategori desa berkembang, dan tidak ada desa mandiri. Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki jumlah desa tertinggal paling banyak, sedangkan jumlah desa mandiri terbanyak terdapat di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara masing-masing sebanyak 4 desa.

Tabel 2.32. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Utara

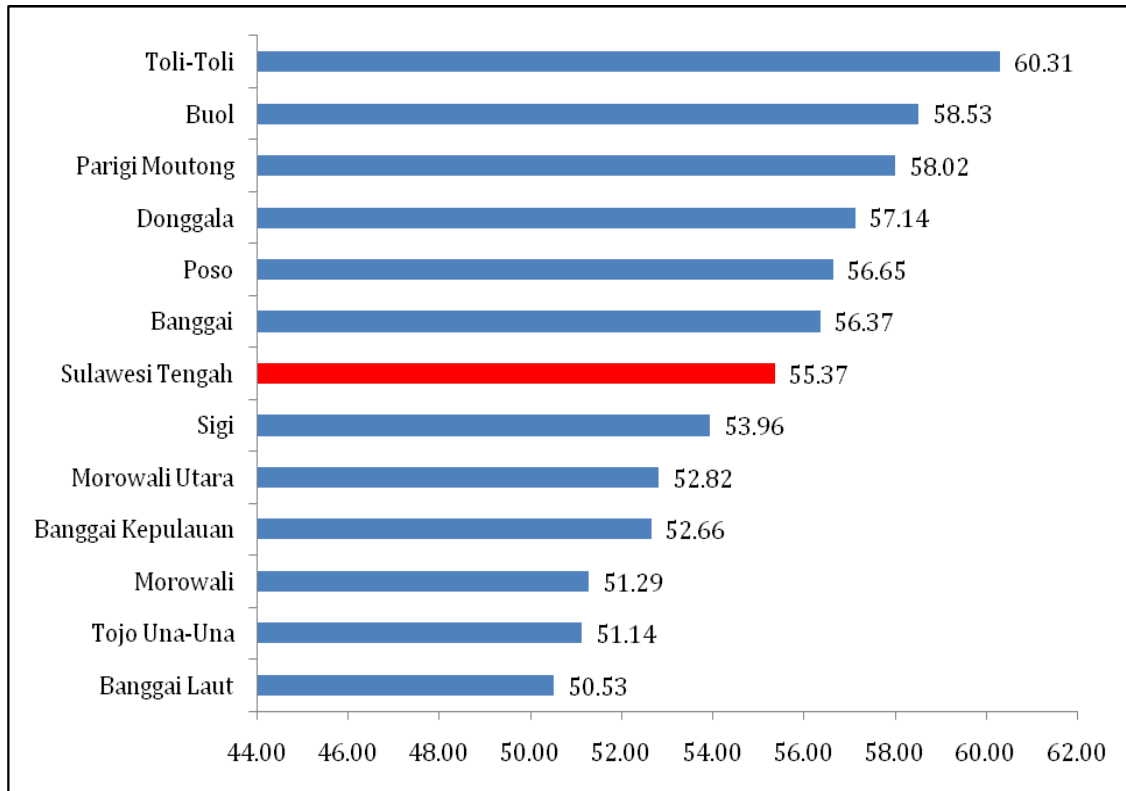
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Bolaang Mongondow	60,14	59,29	43,42	85,31	47,07	67,45	5,50	94,50	0,00	200
Minahasa	60,40	62,97	45,24	82,43	45,98	61,03	7,93	90,31	1,76	227
Kepulauan Sangihe	53,21	56,56	32,02	77,74	39,64	59,93	33,10	66,90	0,00	145
Kepulauan Talaud	50,57	48,55	35,34	73,50	43,82	55,79	50,70	49,30	0,00	142
Minahasa Selatan	60,19	61,01	42,43	83,47	45,02	70,49	9,87	88,16	1,97	152
Minahasa Utara	60,25	58,13	47,03	82,05	49,28	67,40	15,87	80,95	3,17	126
Bolaang Mongondow Utara	56,23	51,19	40,12	82,85	48,04	67,03	18,87	81,13	0,00	106
Siau Tagulandang Biaro	54,35	60,35	31,09	78,12	42,20	58,00	21,69	78,31	0,00	83
Minahasa Tenggara	56,81	55,23	44,74	74,24	41,62	72,14	7,41	92,59	0,00	135
Bolaang Mongondow Selatan	54,56	49,51	33,85	86,36	50,56	62,19	37,35	61,45	1,20	83
Bolaang Mongondow Timur	57,26	54,92	40,26	86,36	51,38	55,12	14,81	85,19	0,00	81
Kotamobagu	62,50	68,80	50,73	71,17	48,83	68,43	0,00	100,00	0,00	10
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>57,25</b>	<b>57,04</b>	<b>40,56</b>	<b>80,99</b>	<b>45,59</b>	<b>63,85</b>	<b>18,46</b>	<b>80,74</b>	<b>0,81</b>	<b>1.490</b>

## 25. Provinsi Sulawesi Tengah

Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 55,37, lebih rendah dari angka rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Dengan jumlah desa di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 1.839 desa, 500 desa (27,19%) diantaranya dalam kategori Desa Tertinggal. Sebanyak 1.330 desa (72,32%) dalam kategori

desa berkembang, dan sisanya sebanyak 9 desa (0,49%) dalam kategori desa mandiri.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki nilai rata-rata indeks dengan kategori tertinggal hanya pada dimensi kondisi infrastruktur (35,89). Sementara dimensi pelayanan dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kategori berkembang dengan masing-masing nilai 52,96; 51,94 dan 62,54.



Gambar 2.34. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

Nilai Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata paling tinggi ada di Kabupaten Toli-Toli dengan nilai rata-rata indeks sebesar 60,31. Dari 99 desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli, 14 desa (14,14%) dalam kategori desa tertinggal, 84 desa (84,85%) dalam kategori desa berkembang dan 1 desa (1,01%) dalam kategori desa mandiri.

Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa paling rendah ada di Kabupaten Banggai Laut. Di kabupaten ini nilai rata-rata indeksnya sebesar 50,53. Jumlah desa yang ada sebanyak

63 desa yang terdiri dari 31 desa (49,21%) dalam kategori desa tertinggal, 32 desa (50,79%) dalam kategori desa berkembang, dan tidak ada desa dalam kategori desa mandiri. Kabupaten Banggai merupakan kabupaten yang memiliki jumlah desa tertinggal yang paling banyak sejumlah 66 desa, sedangkan jumlah desa mandiri terbanyak terdapat di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 3 desa.

Tabel 2.33. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tengah

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Banggai Kepulauan	52,66	49,41	30,21	82,52	50,00	61,17	40,43	59,57	0,00	141
Banggai	56,37	52,38	36,55	87,66	50,12	62,00	22,68	77,32	0,00	291
Morowali	51,29	47,28	36,28	72,29	48,21	61,91	44,44	55,56	0,00	126
Poso	56,65	54,48	37,24	83,07	50,34	65,03	19,58	80,42	0,00	143
Donggala	57,14	54,30	36,55	83,72	55,10	65,63	17,09	82,28	0,63	158
Toli-Toli	60,31	60,72	37,27	86,05	53,41	71,21	14,14	84,85	1,01	99
Buol	58,53	62,71	34,97	83,17	48,99	64,05	11,11	87,96	0,93	108
Parigi Moutong	58,02	55,51	39,88	83,21	55,40	63,05	14,03	84,89	1,08	278

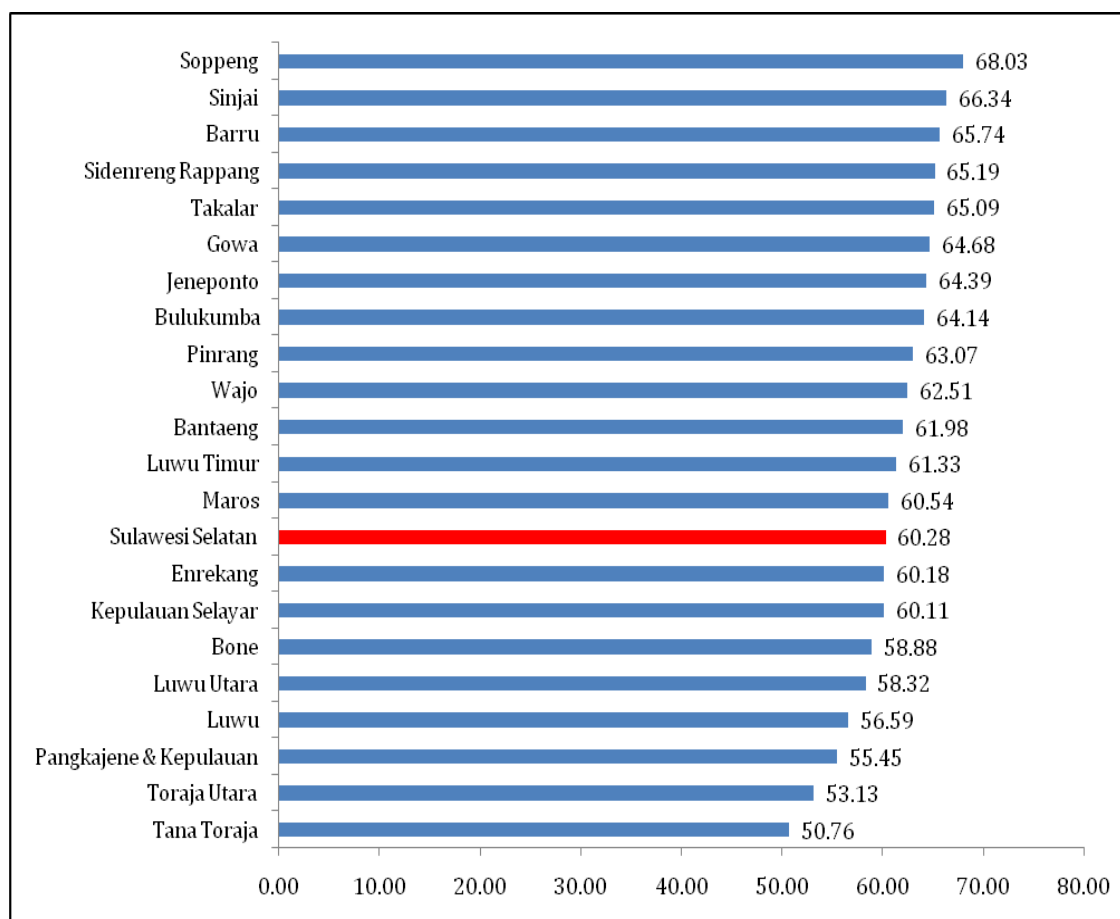
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Tojo Una-Una	51,14	45,94	34,28	75,80	53,01	57,76	46,27	52,99	0,75	134
Sigi	53,96	52,42	34,77	77,95	51,92	60,13	35,80	63,64	0,57	176
Banggai Laut	50,53	52,13	30,37	71,61	51,90	51,63	49,21	50,79	0,00	63
Morowali Utara	52,82	48,99	34,87	75,35	52,57	64,00	36,89	62,30	0,82	122
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>55,37</b>	<b>52,96</b>	<b>35,89</b>	<b>81,33</b>	<b>51,94</b>	<b>62,54</b>	<b>27,19</b>	<b>72,32</b>	<b>0,49</b>	<b>1.839</b>

## 26. Provinsi Sulawesi Selatan

Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 60,28, lebih tinggi dari angka rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Dengan jumlah desa di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2.253 desa, 285 desa (12,65%) diantaranya dalam kategori desa tertinggal. Sebanyak 1.936 desa (85,93%) dalam kategori

desa berkembang, dan sisanya sebanyak 32 desa (1,42%) dalam kategori desa mandiri.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai rata-rata indeks dengan kategori tertinggal hanya pada dimensi kondisi infrastruktur (42,79). Sementara dimensi pelayanan dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kategori berkembang dengan masing-masing nilai 61,01; 50,85 dan 69,13.



Gambar 2.35. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan

Nilai Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata yang paling tinggi ada di Kabupaten

Soppeng dengan nilai rata-rata indeks sebesar 68,03. Dari 49 desa yang ada di Kabupaten

Soppeng, 46 desa (93,88%) dalam kategori desa berkembang, 3 desa (6,12%) dalam kategori desa mandiri dan tidak ada desa tertinggal.

Untuk nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang paling rendah ada di Kabupaten Tana Toraja. Di kabupaten ini nilai rata-rata indeks adalah sebesar 50,76. Jumlah desa yang ada adalah sebanyak 113 desa yang terdiri

dari 51 desa (45,13%) dalam kategori desa tertinggal, 62 desa (54,87%) dalam kategori desa berkembang, dan tidak ada desa mandiri. Kabupaten Luwu merupakan kabupaten yang memiliki jumlah desa tertinggal paling banyak sejumlah 58 desa, sedangkan jumlah desa mandiri terbanyak terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 5 desa.

Tabel 2.34. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Kabupaten/ Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Kepulauan Selayar	60,11	66,19	38,01	75,02	53,91	71,38	11,11	87,65	1,23	81
Bulukumba	64,14	64,82	43,68	92,18	51,51	69,71	0,92	96,33	2,75	109
Bantaeng	61,98	64,42	41,33	86,76	48,38	69,77	0,00	100,00	0,00	46
Jeneponto	64,39	68,53	45,31	86,94	47,29	71,16	0,00	100,00	0,00	82
Takalar	65,09	72,90	50,06	77,54	45,86	72,48	1,32	96,05	2,63	76
Gowa	64,68	70,56	46,42	80,57	51,16	73,16	0,82	97,54	1,64	122
Sinjai	66,34	71,45	43,98	88,34	54,98	73,04	0,00	98,51	1,49	67
Maros	60,54	61,66	44,76	79,70	49,00	69,44	11,25	87,50	1,25	80
Pangkajene Dan Kepulauan	55,45	62,07	38,43	63,14	51,46	64,65	35,38	64,62	0,00	65
Barru	65,74	68,81	46,40	88,54	52,63	71,83	2,50	90,00	7,50	40
Bone	58,88	54,60	43,79	81,90	51,73	70,79	10,98	88,72	0,30	328
Soppeng	68,03	67,96	49,86	89,99	59,21	78,08	0,00	93,88	6,12	49
Wajo	62,51	57,19	49,41	86,91	51,46	74,23	0,70	97,89	1,41	142
Sidenreng Rappang	65,19	64,10	50,34	85,55	56,05	73,91	5,88	86,76	7,35	68
Pinrang	63,07	63,45	49,32	80,36	57,92	66,59	8,70	89,86	1,45	69
Enrekang	60,18	63,56	39,19	81,72	55,60	62,96	9,82	89,29	0,89	112
Luwu	56,59	59,21	36,99	75,83	48,94	65,82	28,02	71,98	0,00	207
Tana Toraja	50,76	48,96	32,36	71,58	44,88	65,71	45,13	54,87	0,00	113
Luwu Utara	58,32	57,23	43,14	79,51	51,49	63,93	18,67	80,12	1,20	166
Luwu Timur	61,33	59,61	45,60	86,09	52,01	65,91	6,45	90,32	3,23	124
Toraja Utara	53,13	55,12	32,17	74,94	40,04	68,06	31,78	68,22	0,00	107
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>60,28</b>	<b>61,01</b>	<b>42,79</b>	<b>81,10</b>	<b>50,85</b>	<b>69,13</b>	<b>12,65</b>	<b>85,93</b>	<b>1,42</b>	<b>2,253</b>

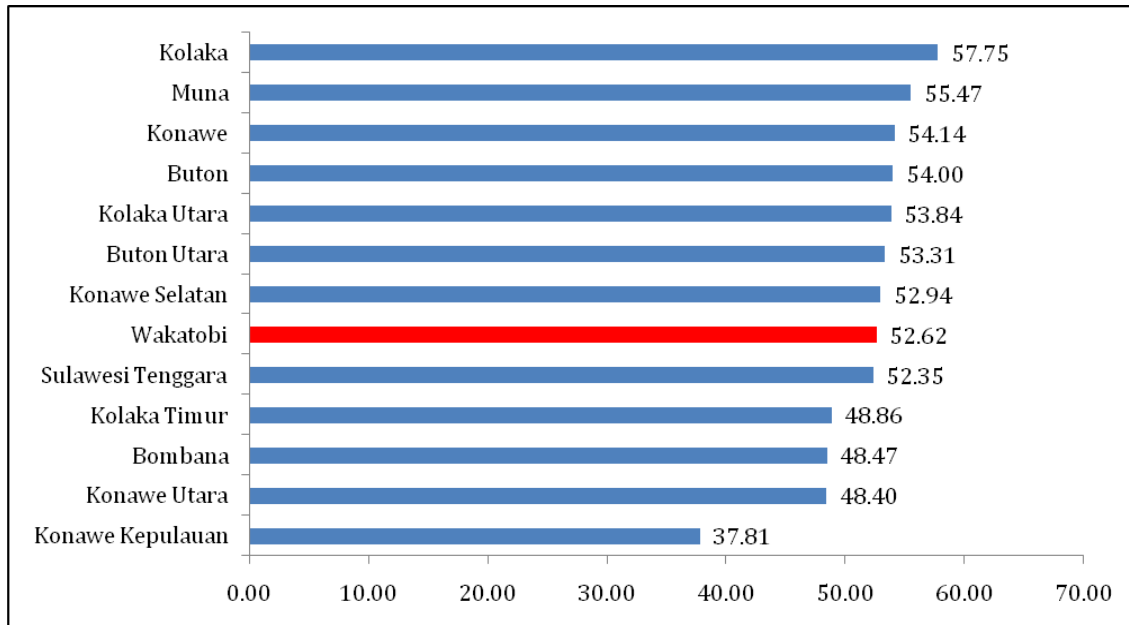
## 27. Provinsi Sulawesi Tenggara

Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 52,35, lebih rendah dari angka rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Dengan jumlah desa di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 1.820 desa, 686 desa (37,69%) diantaranya dalam kategori desa tertinggal. Sebanyak 1.132 desa (62,20%) dalam kategori

desa berkembang, dan sisanya sebanyak 2 desa (0,11%) dalam kategori desa mandiri.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki nilai rata-rata indeks dengan kategori tertinggal pada dimensi pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan pelayanan umum dengan masing-masing nilai 48,48; 33,83 dan 47,09. Sementara dimensi penyelenggaraan pemerintahan dalam kategori berkembang dengan nilai sebesar 64,03.





Gambar 2.36. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara

Nilai Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata yang paling tinggi ada di Kabupaten Kolaka dengan nilai rata-rata indeks sebesar 57,75. Dari 100 desa yang ada di Kabupaten Kolaka, 17 desa (17,00%) dalam kategori desa tertinggal, 83 desa (83,00%) dalam kategori desa berkembang dan tidak ada desa dalam kategori desa mandiri.

Untuk nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa paling rendah ada di Kabupaten Konawe

Kepulauan. Di kabupaten ini nilai rata-rata indeksnya sebesar 37,81. Jumlah desa yang ada adalah 72 desa yang terdiri dari 68 desa (94,44%) dalam kategori desa tertinggal, 4 desa (5,56%) dalam kategori desa berkembang, dan tidak ada desa mandiri. Kabupaten Konawe Selatan memiliki jumlah desa tertinggal paling banyak sejumlah 118 desa, sedangkan desa mandiri di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya terdapat di Kabupaten Konawe.

Tabel 3.35. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara

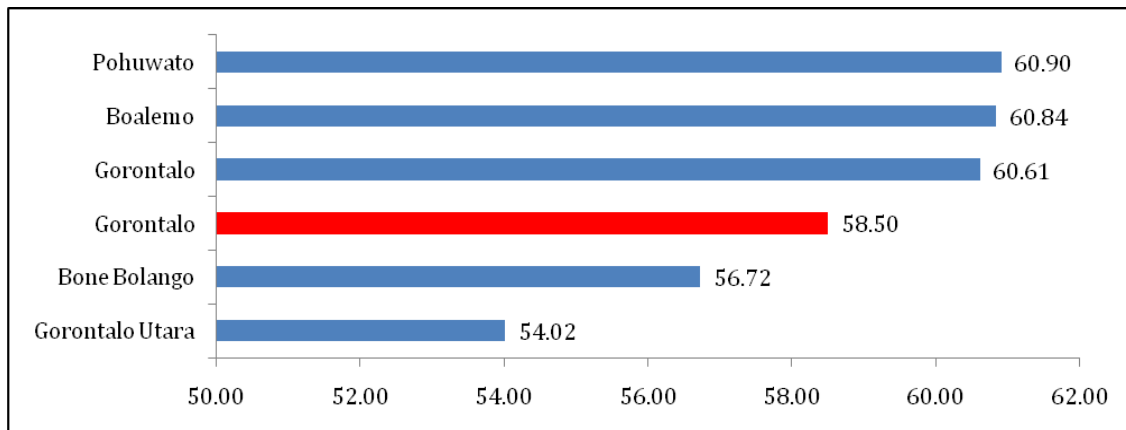
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Buton	54.00	52.35	32.95	82.80	45.78	62.04	35.24	64.76	0.00	210
Muna	55.47	58.68	33.55	75.73	45.28	68.96	24.27	75.73	0.00	206
Konawe	54.14	52.31	36.01	78.33	46.79	63.68	25.31	73.86	0.83	241
Kolaka	57.75	56.17	37.21	82.72	49.42	71.73	17.00	83.00	0.00	100
Konawe Selatan	52.94	44.09	36.05	80.88	50.24	69.03	34.60	65.40	0.00	341
Bombana	48.47	47.03	29.42	72.29	44.46	56.36	54.70	45.30	0.00	117
Wakatobi	52.62	54.41	34.63	72.60	43.23	60.99	34.67	65.33	0.00	75
Kolaka Utara	53.84	50.38	38.17	76.51	47.82	64.10	33.59	66.41	0.00	128
Buton Utara	53.31	54.23	34.04	77.34	47.81	55.77	34.62	65.38	0.00	78
Konawe Utara	48.40	36.12	30.37	83.26	47.55	62.58	61.48	38.52	0.00	135
Kolaka Timur	48.86	41.77	29.89	77.32	47.45	62.22	47.01	52.99	0.00	117
Konawe Kepulauan	37.81	25.88	26.06	60.43	43.59	52.64	94.44	5.56	0.00	72
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>52.35</b>	<b>48.48</b>	<b>33.83</b>	<b>78.07</b>	<b>47.09</b>	<b>64.03</b>	<b>37.69</b>	<b>62.20</b>	<b>0.11</b>	<b>1,820</b>

## 28. Provinsi Gorontalo

Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Gorontalo sebesar 58,50, lebih tinggi dari angka rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Dengan jumlah desa di Provinsi Gorontalo sebanyak 657 desa, 103 desa (15,68%) diantaranya dalam kategori desa tertinggal. Sebanyak 545 desa (82,95%) dalam kategori desa berkembang, dan sisanya

sebanyak 9 desa (1,37%) dalam kategori desa mandiri.

Provinsi Gorontalo memiliki nilai rata-rata indeks dengan kategori tertinggal pada dimensi kondisi infrastruktur dan pelayanan umum sebesar 42,40 dan 45,85. Sementara dimensi pelayanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kategori berkembang dengan masing-masing nilai sebesar 59,70 dan 65,25.



Gambar 2.37. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Gorontalo

Nilai Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata yang paling tinggi ada di Kabupaten Pohuwato dengan nilai rata-rata indeks sebesar 60,90. Dari 101 desa yang ada di Kabupaten Pohuwato, 2 desa (1,98%) dalam kategori desa tertinggal, 97 desa (96,04%) dalam kategori desa berkembang dan 2 desa (1,98%) dalam kategori desa mandiri.

Untuk nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa paling rendah ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Di kabupaten ini nilai rata-rata indeksnya sebesar 54,02. Jumlah desa yang ada sebanyak

123 desa yang terdiri dari 45 desa (36,59%) dalam kategori desa tertinggal, 77 desa (62,60%) dalam kategori desa berkembang, dan 1 desa (0,81%) dalam kategori desa mandiri. Kabupaten Gorontalo Utara merupakan kabupaten yang memiliki jumlah desa tertinggal paling banyak, sedangkan jumlah desa mandiri paling banyak terdapat di Kabupaten Gorontalo sebanyak 4 desa.

Tabel 2.36. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Gorontalo

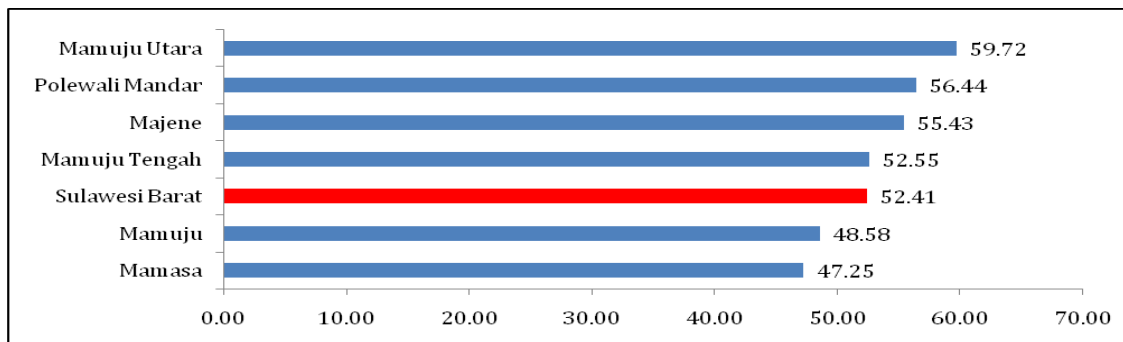
Nama Kabupaten/ Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Boalemo	60.84	60.44	43.85	82.00	54.04	68.63	9.76	87.80	2.44	82
Gorontalo	60.61	62.96	41.81	81.05	47.90	71.63	9.95	87.96	2.09	191
Pohuwato	60.90	58.66	50.52	78.52	52.45	67.19	1.98	96.04	1.98	101
Bone Bolango	56.72	61.65	40.50	75.57	39.46	61.60	18.13	81.88	0.00	160
Gorontalo Utara	54.02	52.46	38.18	82.39	40.09	56.23	36.59	62.60	0.81	123
<b>Gorontalo</b>	<b>58.50</b>	<b>59.70</b>	<b>42.40</b>	<b>79.69</b>	<b>45.85</b>	<b>65.25</b>	<b>15.68</b>	<b>82.95</b>	<b>1.37</b>	<b>657</b>

## 29. Provinsi Sulawesi Barat

Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 52,41, lebih rendah dari angka rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Dengan jumlah desa di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 576 desa, 215 desa (37,33%) diantaranya dalam kategori desa tertinggal. Sebanyak 359 desa (62,33%) dalam kategori

desa berkembang, dan sisanya sebanyak 2 desa (0,35%) dalam kategori desa mandiri.

Provinsi Sulawesi Barat memiliki nilai rata-rata indeks dalam kategori tertinggal pada dimensi kondisi infrastruktur (31,07). Nilai pada masing-masing dimensi sebagai berikut: pelayanan dasar (52,06); aksesibilitas/ transportasi (74,18); pelayanan umum (50,93); dan penyelenggaraan pemerintahan (63,62).



Gambar 2.38. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Nilai Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata yang paling tinggi ada di Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai rata-rata indeks sebesar 59,72. Dari 59 desa yang ada di Kabupaten Mamuju Utara, 55 desa (93,22%) dalam kategori desa berkembang dan 4 desa (6,78%) dalam kategori desa tertinggal. Tidak ada desa di Kabupaten Mamuju Utara dalam kategori desa mandiri.

Untuk nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa paling rendah ada di Kabupaten Mamasa.

Di kabupaten ini nilai rata-rata indeksnya sebesar 47,25. Jumlah desa yang ada sebanyak 168 desa yang terdiri dari 94 desa (55,95%) dalam kategori desa tertinggal, 74 desa (44,05%) dalam kategori desa berkembang, dan tidak ada desa dalam kategori desa mandiri. Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten yang memiliki jumlah desa tertinggal paling banyak, sedangkan jumlah desa mandiri hanya terdapat di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar dengan masing-masing 1 desa.

Tabel 2.37. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Barat

Nama Kabupaten/ Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Majene	55.43	56.60	32.99	82.03	50.93	58.70	20.97	79.03	0.00	62
Polewali Mandar	56.44	56.16	35.20	81.52	52.29	63.72	25.00	74.31	0.69	144
Mamasa	47.25	51.46	22.54	64.00	45.25	62.53	55.95	44.05	0.00	168
Mamuju	48.58	41.44	29.51	72.60	54.67	63.15	52.81	46.07	1.12	89
Mamuju Utara	59.72	63.16	38.40	79.19	54.64	67.49	6.78	93.22	0.00	59
Mamuju Tengah	52.55	43.16	38.98	74.45	54.74	68.94	38.89	61.11	0.00	54
Sulawesi Barat	52.41	52.06	31.07	74.18	50.93	63.62	37.33	62.33	0.35	576

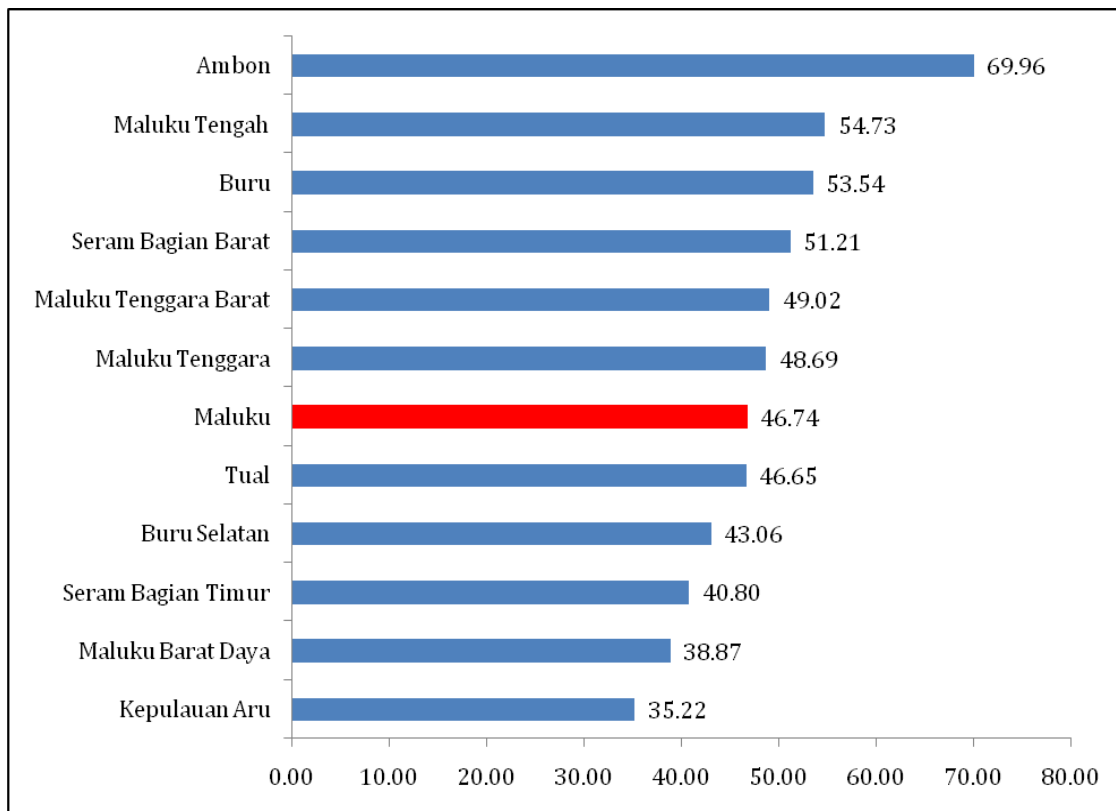
## 30. Provinsi Maluku

Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Maluku sebesar 46,74, lebih rendah dari angka rata-rata Indeks Pembangunan Desa

secara nasional. Dengan jumlah desa di Provinsi Maluku sebesar 1.191 desa, 728 desa (61,13%) diantaranya dalam kategori desa tertinggal. Sebanyak 449 desa (37,70%) dalam kategori

desa berkembang, dan sisanya sebanyak 14 desa (1,18%) dalam kategori desa mandiri. Provinsi Maluku memiliki nilai rata-rata indeks

dengan kategori tertinggal dimensi pelayanan dasar (48,50); kondisi infrastruktur (28,54); dan pelayanan umum (43,06).



Gambar 2.39. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Maluku

Nilai Indeks Pembangunan Desa secara rata-rata paling tinggi ada di Kota Ambon dengan nilai rata-rata indeks sebesar 69,96. Dari 30 desa yang ada di Kota Ambon, 23 desa (76,67%) dalam kategori desa berkembang dan 7 desa (23,33%) dalam kategori desa mandiri. Tidak ada desa di Kota Ambon dalam kategori desa tertinggal.

Untuk nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa paling rendah ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Di kabupaten ini nilai rata-rata indeksnya sebesar 35,22. Jumlah desa yang ada sebanyak 117 desa yang terdiri dari 113 desa

(96,58%) dalam kategori desa tertinggal, 4 desa (3,42%) dalam kategori desa berkembang, dan tidak ada desa dalam kategori desa mandiri. Kabupaten yang memiliki jumlah desa tertinggal paling banyak terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan jumlah desa tertinggal sebanyak 162 desa, sedangkan jumlah desa mandiri paling banyak terdapat di Kabupaten Buru dengan jumlah desa mandiri sebanyak 3 desa.

Tabel 2.38. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Maluku

Nama Kabupaten/ Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Maluku Tenggara Barat	49.02	54.82	27.06	65.40	41.39	59.49	56.25	43.75	0.00	80
Maluku Tenggara	48.69	52.89	29.42	73.76	41.44	41.04	61.05	38.42	0.53	190
Maluku Tengah	54.73	58.85	35.10	77.44	44.50	55.66	30.65	68.28	1.08	186

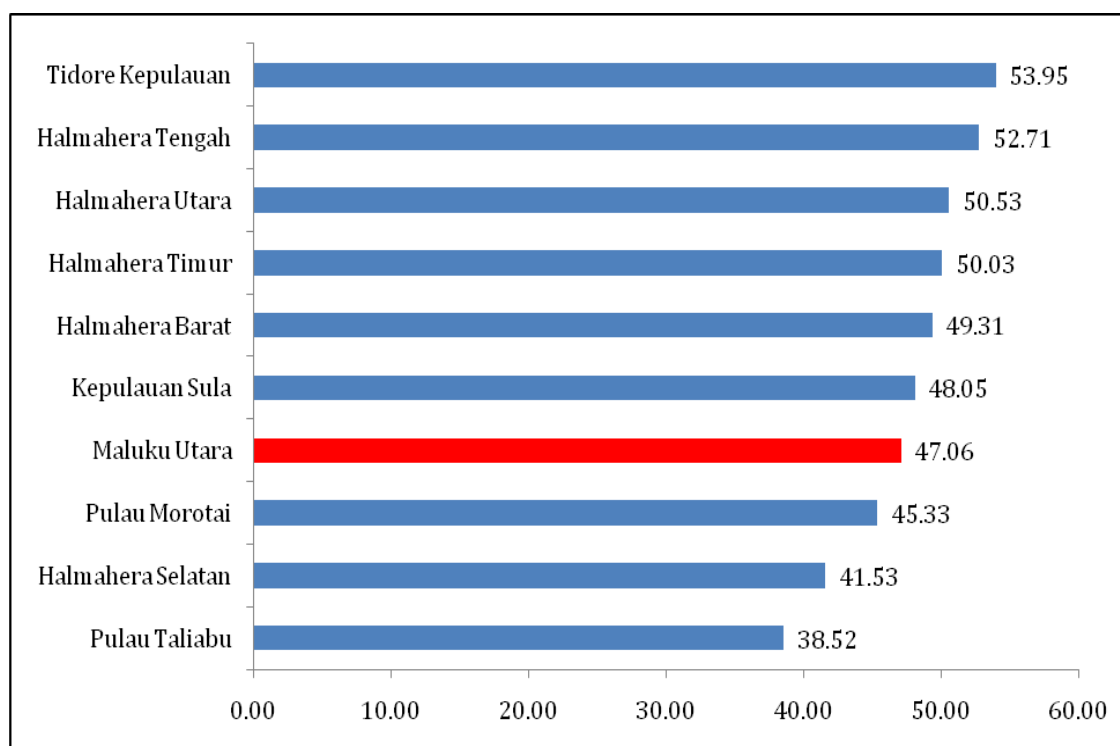
Nama Kabupaten/ Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Buru	53.54	51.80	33.08	78.62	47.51	65.25	34.15	62.20	3.66	82
Kepulauan Aru	35.22	31.62	21.84	47.46	40.32	48.94	96.58	3.42	0.00	117
Seram Bagian Barat	51.21	51.48	32.14	72.46	45.55	60.51	48.91	50.00	1.09	92
Seram Bagian Timur	40.80	41.67	24.62	60.57	42.24	37.20	84.38	15.63	0.00	192
Maluku Barat Daya	38.87	38.42	22.24	51.15	37.94	56.73	80.34	19.66	0.00	117
Buru Selatan	43.06	43.67	23.60	60.65	48.10	48.39	65.82	34.18	0.00	79
Ambon	69.96	78.06	50.53	92.16	51.68	67.51	0.00	76.67	23.33	30
Tual	46.65	54.38	29.64	63.89	43.01	34.25	61.54	38.46	0.00	26
<b>Maluku</b>	<b>46.74</b>	<b>48.50</b>	<b>28.54</b>	<b>66.45</b>	<b>43.06</b>	<b>50.44</b>	<b>61.13</b>	<b>37.70</b>	<b>1.18</b>	<b>1,191</b>

### 31. Provinsi Maluku Utara

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Maluku Utara sebesar 47,06. Dari sebanyak 1.063 desa, ada sebanyak 59,27% desa dengan kategori tertinggal, dan 0,38% berkategori mandiri. Sementara sisanya

(40,36%) berkategori berkembang. Angka ini berada dibawah angka rata-rata nasional.

Provinsi Maluku Utara memiliki nilai rata-rata indeks dengan kategori tertinggal dimensi pelayanan dasar (45,29); kondisi infrastuktur (31,23); dan pelayanan umum (41,65).



Gambar 2.40. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Maluku Utara

Indeks Pembangunan Desa Provinsi Maluku Utara tahun 2014 tertinggi secara rata-rata dimiliki desa-desa di Kabupaten Tidore Kepulauan sebesar 53,95. Dari indeks tersebut

diketahui tidak ada desa dengan kategori mandiri, 61,22% memiliki kategori berkembang, serta 38,78% desa dengan kategori tertinggal.

Hal ini diikuti oleh Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Utara dengan masing-masing nilai rata-rata indeksinya adalah 52,71 dan 50,53. Kabupaten Halmahera Tengah tidak memiliki desa dengan kategori mandiri dari jumlah desa keseluruhan kabupaten. Sementara Kabupaten Halmahera Utara memiliki 1,02% desa dengan kategori mandiri dari jumlah desa keseluruhan kabupaten. Sementara desa dengan kategori Tertinggal sebanyak 34,43% dan 45,92 % dari jumlah desa di setiap kabupaten.

Sementara Kabupaten dengan Indeks Pembangunan Desa paling rendah adalah Kabupaten Pulau Taliabu dengan nilai sebesar 38,52. Di Kabupaten Pulau Taliabu 84,51% desa merupakan desa tertinggal dan 15,49% desa berkembang. Kabupaten Pulau Taliabu tidak memiliki desa mandiri. Kabupaten yang memiliki jumlah desa tertinggal paling banyak adalah Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 198 desa. Sementara Kabupaten yang memiliki desa mandiri paling banyak adalah Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 2 desa.

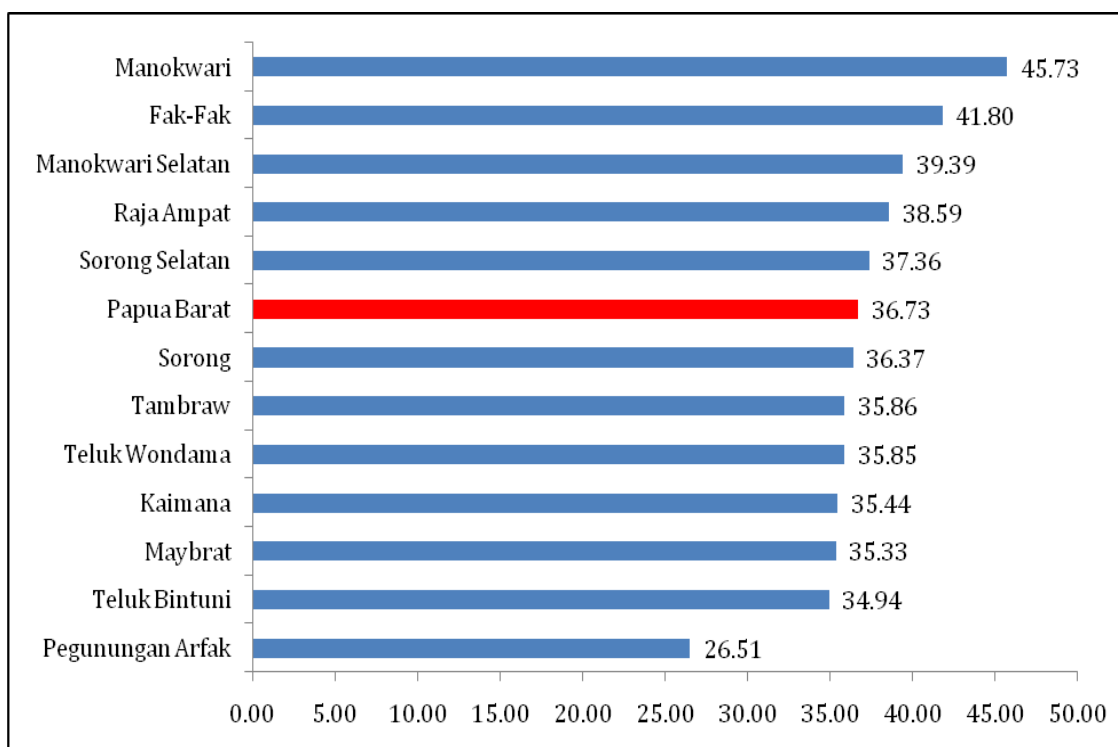
Tabel 2.39. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara

Nama Kabupaten/ Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkem-bang	Mandiri	
Halmahera Barat	49.31	48.32	33.74	71.64	40.62	55.30	48.82	50.59	0.59	170
Halmahera Tengah	52.71	60.24	32.01	69.31	44.58	55.22	34.43	65.57	0.00	61
Kepulauan Sula	48.05	49.72	29.99	67.04	43.57	53.90	58.97	41.03	0.00	78
Halmahera Selatan	41.53	37.69	27.74	61.00	39.82	50.26	79.84	19.76	0.40	248
Halmahera Utara	50.53	48.19	34.36	77.29	41.57	53.94	45.92	53.06	1.02	196
Halmahera Timur	50.03	45.57	33.18	77.81	39.07	61.45	50.98	49.02	0.00	102
Pulau Morotai	45.33	43.50	29.77	68.39	42.25	46.80	69.32	30.68	0.00	88
Pulau Taliabu	38.52	33.11	24.09	55.23	46.74	48.63	84.51	15.49	0.00	71
Tidore Kepulauan	53.95	56.19	37.51	78.39	45.01	48.56	38.78	61.22	0.00	49
Maluku Utara	47.06	45.29	31.23	69.27	41.65	52.90	59.27	40.36	0.38	1,063

### 32. Provinsi Papua Barat

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Papua Barat sebesar 36,73. Dari sebanyak 1.628 desa, ada sebanyak 88,51% desa dengan kategori tertinggal, dan 0,06% berkategori mandiri. Sementara sisanya (11,43%) berkategori berkembang. Angka ini berada dibawah angka rata-rata nasional.

Provinsi Papua Barat memiliki nilai rata-rata indeks dengan kategori tertinggal pada hampir semua dimensi pembangunan. Nilai indeks masing-masing dimensi dalam kategori tertinggal sebagai berikut: pelayanan dasar (32,54); kondisi infrastuktur (22,19); pelayanan umum (40,70); dan penyelenggaraan pemerintahan (44,61).



Gambar 2.41. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Papua Barat

Indeks Pembangunan Desa Provinsi Papua Barat tahun 2014 tertinggi secara rata-rata dimiliki desa-desa di Kabupaten Manokwari sebesar 45,73. Dari indeks tersebut diketahui tidak ada desa dengan kategori mandiri, 32,73% memiliki kategori berkembang, serta 66,67% desa dengan kategori tertinggal.

Hal ini diikuti oleh Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Manokwari Selatan dengan masing-masing nilai rata-rata indeksnya adalah 41,80 dan 39,39. Kedua kabupaten tersebut tidak memiliki desa dengan kategori mandiri dari jumlah desa keseluruhan di masing-masing

kabupaten. Sementara desa dengan kategori tertinggal sebanyak 77,46% dan 75,44% dari jumlah desa di setiap kabupaten.

Sementara Kabupaten dengan Indeks Pembangunan Desa paling rendah adalah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai sebesar 26,51. Di Kabupaten Pegunungan Arfak 100% desa merupakan desa tertinggal. Jumlah desa tertinggal paling banyak terdapat di Kabupaten Maybrat sejumlah 253 desa. Sementara satu desa mandiri di Provinsi Papua Barat terdapat di Kabupaten Manokwari.

Tabel 2.40. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Papua Barat

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Fak-Fak	41,80	39,65	22,17	68,87	40,06	44,79	77,46	22,54	0,00	142
Kaimana	35,44	38,65	18,46	39,91	41,44	50,77	96,43	3,57	0,00	84
Teluk Wondama	35,85	39,35	20,73	44,95	39,46	39,81	89,47	10,53	0,00	76
Teluk Bintuni	34,94	33,21	24,99	43,05	39,66	43,31	84,35	15,65	0,00	115
Manokwari	45,73	39,03	26,72	80,30	42,25	48,63	66,67	32,73	0,61	165
Sorong Selatan	37,36	34,55	21,48	53,37	38,89	51,07	86,78	13,22	0,00	121
Sorong	36,37	33,86	22,08	53,86	41,91	38,77	88,37	11,63	0,00	129
Raja Ampat	38,59	41,30	32,18	31,90	44,74	51,70	88,03	11,97	0,00	117
Tambora	35,86	30,94	20,60	57,38	39,95	41,55	96,95	3,05	0,00	197



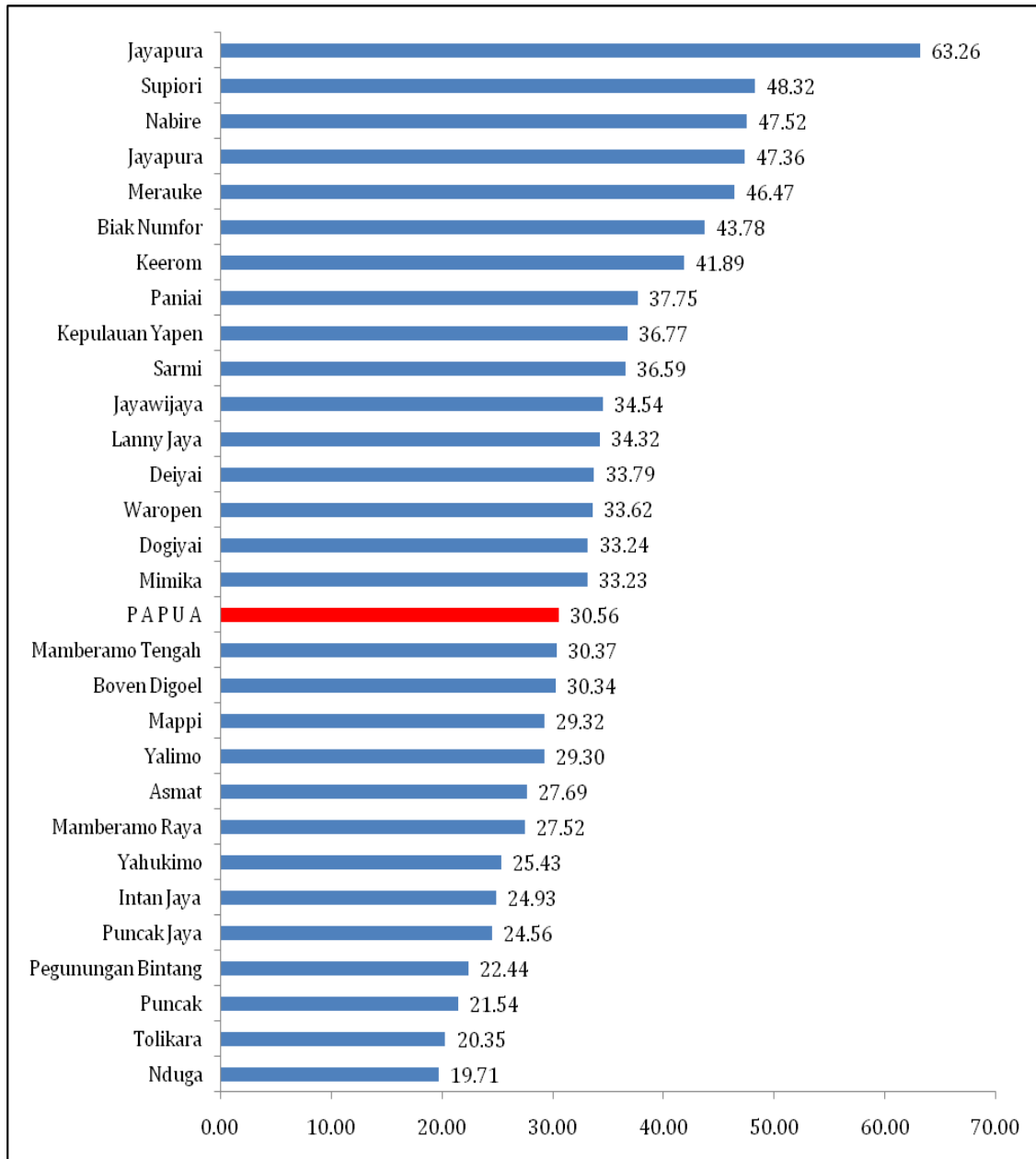
Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Maybrat	35,33	27,61	20,67	55,40	40,45	49,77	97,68	2,32	0,00	259
Manokwari Selatan	39,39	29,96	23,67	69,47	43,34	43,81	75,44	24,56	0,00	57
Pegunungan Arfak	26,51	15,19	15,58	49,25	38,55	31,08	100,00	0,00	0,00	166
<b>Papua Barat</b>	<b>36,73</b>	<b>32,54</b>	<b>22,19</b>	<b>55,08</b>	<b>40,70</b>	<b>44,61</b>	<b>88,51</b>	<b>11,43</b>	<b>0,06</b>	<b>1,628</b>

### 33. Provinsi Papua

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Papua sebesar 30,56. Dari sebanyak 5.118 desa, ada sebanyak 91,79% desa dengan kategori tertinggal, dan 0,10% berkategori mandiri. Sementara sisanya (8,11%) berkategori berkembang. Angka ini berada dibawah angka rata-rata nasional.

Provinsi Papua memiliki nilai rata-rata indeks dengan kategori tertinggal pada semua

dimensi pembangunan. Nilai indeks masing-masing dimensi dalam kategori tertinggal sebagai berikut: pelayanan dasar (32,54); kondisi infrastuktur (22,19); aksesibilitas/transportasi (45,41); pelayanan umum (40,70); dan penyelenggaraan pemerintahan (44,61). Terlihat jika dimensi paling tinggi di Provinsi Papua adalah aksesibilitas/transportasi dan terendah adalah kondisi infrastruktur.



Gambar 2.42. Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Papua

Indeks Pembangunan Desa Provinsi Papua tahun 2014 tertinggi secara rata-rata dimiliki desa-desa di Kota Jayapura sebesar 63,26. Dari indeks tersebut diketahui terdapat 7,69% desa dengan kategori mandiri, 84,62% memiliki kategori berkembang, serta 7,69% desa dengan kategori tertinggal.

Hal ini diikuti oleh Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Nabire dengan masing-masing nilai rata-rata indeksnya adalah 48,32 dan 47,52. Kedua kabupaten tersebut tidak memiliki desa dengan kategori mandiri dari jumlah desa keseluruhan di masing-masing kabupaten.

Sementara desa dengan kategori tertinggal sebanyak 52,63% dan 54,17% dari jumlah desa di setiap kabupaten.

Sementara Kabupaten dengan Indeks Pembangunan Desa paling rendah adalah Kabupaten Nduga dengan nilai sebesar 19,71. Di Kabupaten Nduga 100% desa merupakan desa tertinggal. Selain Kabupaten Nduga, beberapa kabupaten juga terdiri dari 100% desa tertinggal. Kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, dan Deiya.

Tabel 2.41. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Papua

Nama Kabupaten/ Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Merauke	46,47	53,69	26,66	56,20	45,67	53,30	59,12	40,33	0,55	181
Jayawijaya	34,54	29,39	13,42	56,51	38,81	53,55	93,29	6,71	0,00	328
Jayapura	47,36	44,18	31,06	69,27	45,34	55,68	58,27	41,01	0,72	139
Nabire	47,52	51,70	27,66	64,07	40,63	56,96	54,17	45,83	0,00	72
Kepulauan Yapen	36,77	35,00	23,97	54,84	42,53	32,13	84,47	15,53	0,00	161
iak Numfor	43,78	35,98	29,46	76,46	42,46	40,47	73,12	26,88	0,00	253
Paniai	37,75	38,47	17,97	55,06	42,62	44,20	87,01	12,99	0,00	77
Puncak Jaya	24,56	13,87	12,25	42,83	38,52	36,96	98,68	1,32	0,00	302
Mimika	33,23	31,29	19,16	44,69	41,85	41,52	83,46	15,79	0,75	133
Boven Digoel	30,34	22,19	18,46	49,21	41,46	35,82	93,75	6,25	0,00	112
Mappi	29,32	25,79	16,27	41,60	41,13	35,26	95,68	4,32	0,00	162
Asmat	27,69	26,94	10,63	40,29	41,92	31,61	99,55	0,45	0,00	221
Yahukimo	25,43	19,02	11,71	40,77	37,49	35,67	99,22	0,78	0,00	510
Pegunungan Bintang	22,44	12,74	12,57	29,37	39,84	43,96	98,92	1,08	0,00	277
Tolikara	20,35	8,76	12,50	33,16	35,31	34,26	99,82	0,18	0,00	541
Sarmi	36,59	32,24	22,68	56,21	39,56	42,19	84,78	15,22	0,00	92
Keerom	41,89	44,01	21,67	57,78	45,66	48,88	76,92	21,98	1,10	91
Waropen	33,62	32,25	21,13	47,17	32,58	42,32	95,00	5,00	0,00	100
Supiori	48,32	50,07	28,74	70,50	45,64	49,61	52,63	47,37	0,00	38
Mamberamo Raya	27,52	27,04	13,52	31,79	41,61	39,26	98,55	1,45	0,00	69
Nduga	19,71	14,34	9,57	26,53	38,30	27,92	100,00	0,00	0,00	248
Lanny Jaya	34,32	33,55	17,13	44,60	43,91	47,58	99,44	0,56	0,00	354
Mamberamo Tengah	30,37	29,16	11,00	42,14	37,48	49,75	100,00	0,00	0,00	59
Yalimo	29,30	25,73	10,79	50,63	38,53	33,72	98,66	1,34	0,00	299
Puncak	21,54	16,06	12,09	21,43	38,99	42,54	100,00	0,00	0,00	80
Dogiyai	33,24	32,54	18,61	37,98	41,23	52,34	94,94	5,06	0,00	79
Intan Jaya	24,93	20,27	15,55	32,29	41,07	30,65	100,00	0,00	0,00	97
Deiyai	33,79	36,99	13,60	39,18	44,38	50,26	100,00	0,00	0,00	30
Jayapura	63,26	71,75	41,99	86,19	47,69	59,77	7,69	84,62	7,69	13
<b>P A P U A</b>	<b>30,56</b>	<b>25,90</b>	<b>16,25</b>	<b>45,41</b>	<b>40,03</b>	<b>40,43</b>	<b>91,79</b>	<b>8,11</b>	<b>0,10</b>	<b>5,118</b>









Kementerian Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Jl. Taman Surapati No.2 Menteng Jakarta, 10310



Badan Pusat Statistik  
Jl. Dokter Sutomo No. 6 – 8 Jakarta, 10710